bank victoria Syariah

Gedung Graha BIP Lantai 5, Jl.Gatot Subroto Kav. 23

Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi - Jakarta Selatan

Telp: (+62 21)-5600467, (+62 21)-5225285 (Hunting)

Fax: (+62 21)-5664247

Situs Web: https://bankvictoriasyariah.co.id

Laporan Tahunan 2022 Annual Report

bank victoria Syariah

Prudent for quality growth

PT Bank Victoria Syariah

Laporan Tahunan 2022 Annual Report

PT Bank Victoria Syariah

Laporan Tahunan **2022** Annual Report

Pertumbuhan berkualitas yang merujuk pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang antara pertumbuhan yang didasarkan pada strategi dan rencana yang matang, pengambilan keputusan yang bijaksana dalam memanfaatkan/mengelola seluruh sumber daya perusahaan, dan pengembangan strategi bisnis jangka panjang yang *visioner*, dengan tetap mempertimbangkan kualitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam era yang semakin kompleks saat ini, pengambilan keputusan secara bijak dan hati-hati menjadi semakin penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh *stakeholder* dalam jangka panjang.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PT Bank Victoria Syariah
Laporan Tahunan 2022

BAB I
KILAS KINERJA 2022

6 Kesinambungan Tema
6 Makna Tema
8 Ringkasan Kinerja
10 Peristiwa Penting

BAB II
PROFIL PERUSAHAAN

14 Sejarah Singkat Perusahaan
15 Visi dan Misi Perusahaan
16 Nilai Budaya Perusahaan
18 Struktur Grup Perusahaan
20 Struktur Organisasi Utama
22 Jejak Langkah
24 Jaringan Kantor
26 Ikhtisar Keuangan

BAB III
LAPORAN MANAJEMEN

28 Laporan Dewan Komisaris
34 Profil Dewan Komisaris
36 Laporan Direksi
44 Profil Direksi
48 Laporan Dewan Pengawas Syariah
50 Profil Dewan Pengawas Syariah
52 Profil Pejabat Eksekutif
56 Profil Komite-Komite

BAB IV
ANALISA & PEMBAHASAN

58 Tinjauan Industri
62 Tinjauan Bisnis
69 Tresuri
71 Sumber Daya Insani
75 Teknologi Informasi
77 Tinjauan Keuangan

BAB V
TATA KELOLA PERUSAHAAN

86 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
86 Komitmen Dalam Tata Kelola Perusahaan
87 Deklarasi Anti Fraud
88 Direksi
92 Komite Eksekutif Direksi
96 Dewan Pengawas Syariah
100 Penerapan Fungsi Kepatuhan
106 Fungsi Audit Internal atau SKAI
108 Manajemen Risiko
108 Penerapan Manajemen Risiko
110 Pengendalian Internal
120 Rapat Umum Pemegang Saham
121 Perkara Hukum yang dihadapi Perseroan
122 Komite Remunerasi & Nominasi
123 Keterbukaan Informasi

BAB VI
LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

129 Laporan Keuangan (Auditor)

bank victoria Syariah

01

KILAS KINERJA

- Kesinambungan Tema
- Makna Tema
- Ringkasan Kinerja
- Peristiwa Penting

KESINAMBUNGAN TEMA

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan menjadi penting untuk menunjukkan konsistensi Laporan Tahunan. Berikut ini kami sajikan kesinambungan tema selama 5 (lima) tahun terakhir:

MAKNA TEMA

2022

Prudent for Quality Growth

Bijaksana untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

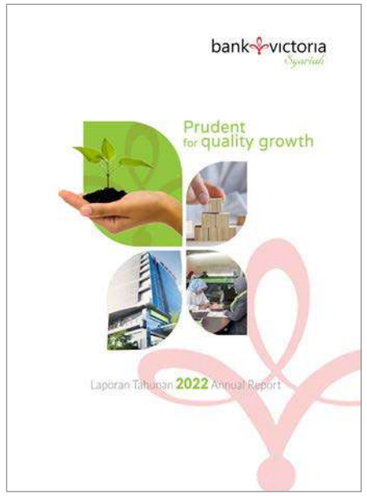

Pertumbuhan berkualitas yang merujuk pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang antara pertumbuhan yang didasarkan pada strategi dan rencana yang matang, pengambilan keputusan yang bijaksana dalam memanfaatkan/mengelola seluruh sumber daya perusahaan, dan pengembangan strategi bisnis jangka panjang yang *visioner*, dengan tetap mempertimbangkan kualitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam era yang semakin kompleks saat ini, pengambilan keputusan secara bijak dan hati-hati menjadi semakin penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh *stakeholder* dalam jangka panjang.

2021

Building for prudent and quality growth

Membangun untuk pertumbuhan yang bijaksana dan berkualitas

Menuju bisnis yang berkelanjutan, Bank Victoria Syariah di tahun 2021 fokus pada pertumbuhan yang berbasis pada kualitas dan prinsip kehati-hatian dengan dukungan pondasi internal yang kuat.

Pencapaian positif tahun 2021 merupakan hasil dari konsistensi Bank Victoria Syariah dalam implementasi proses bisnis perbankan berbasis syariah berdasarkan kaidah industri yang sehat, serta senantiasa berupaya membangun sumber daya yang berkualitas. Selain itu, Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam operasional di semua level dalam Bank.

Tema *"Building for Prudent and Quality Growth"* merupakan salah bentuk nyata implementasi dari Visi Bank Victoria Syariah dalam upaya menjadi Bank Syariah yang Amanah melalui upaya pertumbuhan yang berkelanjutan.

2020

Keep Growing Healthy

Menjadi Bank yang Terus tumbuh sehat

Setelah memperkuat pondasi berkomitmen untuk Terus Maju Menjadi Lebih Kuat dan Lebih Baik yang merupakan sumber inspirasi bagi seluruh insan Bank Victoria Syariah dalam rangka terus menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan dari luar dan penguatan sinergi dengan perusahaan induk, PT. Bank Victoria International Tbk. maka Laporan Tahunan 2020 ini, Bank Victoria syariah menetapkan tema " Terus Tumbuh Sehat *(Keep Growing Health)*"

"Keep Growing Healthy" yang menekankan komitmen dari semua komponen di dalam menuju Bank Victoria Syariah yang terus tumbuh, bergerak maju, berinovasi, mampu menghadapi tantangan ke depan, tetap berkualitas dan sehat.

2019

Keep Moving Forward To be Stronger and Better

Terus Bergerak Maju Menjadi Lebih Kuat dan Lebih Baik

Setelah memperkuat pondasi untuk berkomitmen meningkatkan kualitas pada segala aspek baik bisnis, operasional, sumber daya insani maupun tata kelola perusahaan yang baik dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkualitas dan berkelanjutan maka aporan Tahunan 2019, Bank Victoria Syariah menetapkan tema "Terus Maju Menjadi Lebih Kuat dan Lebih Baik *(Keep moving Forward to be Stronger and Better)*". Tema ini merupakan spirit dan semangat seluruh insan Bank Victoria Syariah untuk terus memberikan yang terbaik bagi Bank Victoria Syariah, dengan memperhatikan prinsip kasih sayang pada seluruh alam.

2018

Komitmen Untuk Berkualitas

Tema tahun ini merupakan komitmen setiap insan Bank Victoria Syariah untuk memberikan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Komitmen untuk berkualitas diterapkan di setiap aspek bisnis, operasional, sumber daya insani maupun tata kelola perusahaan yang baik, sehingga harapan untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka menjadikan Bank Victoria Syariah terdepan dan terpercaya dapat terlaksana.

RINGKASAN KINERJA

Asset

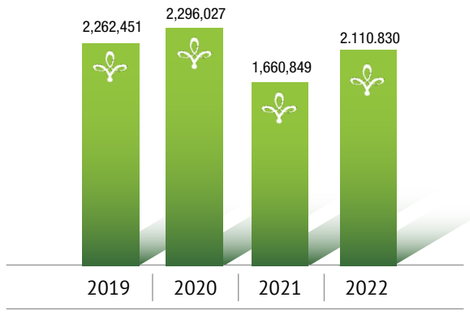

Pembiayaan

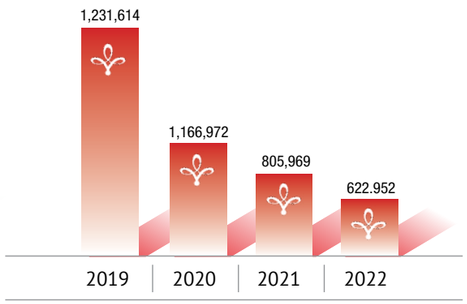

Ekuitas

Laba Sebelum Pajak

RINGKASAN KINERJA

Efek Efek

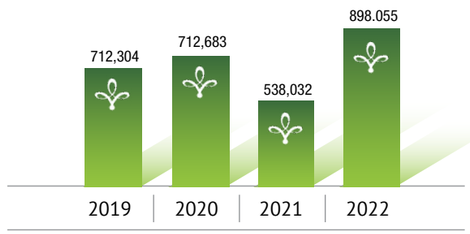

Dana Wadiah & Syirkah Temporer

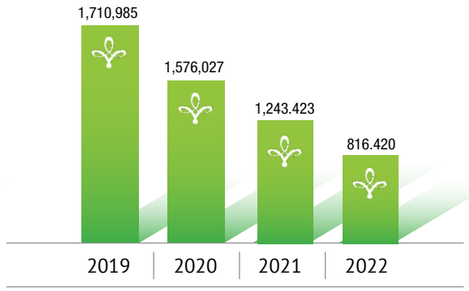

PERISTIWA PENTING

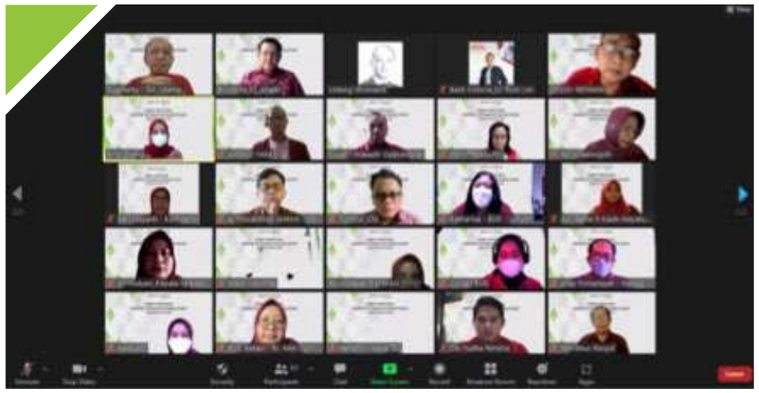

12 Februari 2022

Bank Victoria Syariah melakukan Rapat Kerja Tahunan dengan tema *Building for prudent and quality growth* untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu tahun terakhir dan merencanakan strategi bisnis ke depan. Rapat ini juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan perusahaan seperti pemegang saham, direksi, dan komisaris, serta pimpinan cabang

27 September 2022

Bank Victoria Syariah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pergantian pengurus Bank. untuk memastikan keberlangsungan operasional Bank Victoria Syariah dan menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis di masa depan.

KILAS KINERJA

PERISTIWA PENTING

06 Oktober 2022

Bank Victoria Syariah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) dengan PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Jabar Banten, PT Bank Mega Syariah dan PT Bank Syariah Indonesia.

05 November 2022

Peserta Training APU-PPT 2022 Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang dan pembiayaan terorisme di organisasi masing-masing.

PERISTIWA PENTING

06 Desember 2022

Bank Victoria Syariah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda perubahan kepemilikan saham Bank yang sebelumnya mayoritas dimiliki oleh PT Bank Victoria International Tbk telah diambilalih oleh PT Victoria Investama Tbk.

Selama Tahun 2022

Bank Victoria Syariah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah berpartisipasi dalam program kemaslahatan umat dengan melakukan pemberian sumbangan kepada Taman Pendidikan Al'quran Yayasan Raudhatul Arifin Qiraati dan program sebar Al'quran.

02
PROFIL PERUSAHAAN

- Sejarah Singkat Perusahaan
- Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan
- Struktur Grup Perusahaan
- Struktur Organisasi Utama
- Jejak Langkah
- Jaringan Kantor
- Ikhtisar Keuangan

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna) atau selanjutnya disebut "BVIS", didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 yang dibuat oleh Bebasa Daeng Lalo, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian BVIS telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan No. 62 tanggal 24 Mei 1968, Jo Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-02731. AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah berdasarkan Akta No. 106 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022, Jo. Akta No. 27 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diberitahukan dan telah diterima melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0023368 tanggal 19 Januari 2023.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari oleh Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010.

Adapun kepemilikan saham PT Bank Victoria Syariah pada posisi 31 Desember 2022 sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13

tanggal 6 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

PT Victoria Investama Tbk	:	80,19%
PT Bank Victoria International Tbk	:	19,81%
Masyarakat Lainnya	:	0,01%

Dukungan penuh dari Pemegang Saham Pengendali yaitu PT Victoria Investama Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah dan terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Pada akhir tahun 2022, Bank Victoria Syariah mengelola aset sebesar Rp.2.110 miliar dengan 1 (satu) kantor Cabang yaitu KCU-Tomang. Pengurangan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di tahun 2022 mengikuti perkembangan usaha pelayanan perbankan yang mengedepankan pelayanan perbankan berbasis teknologi.

Dalam memberikan pelayanan keuangan Bank Victoria Syariah menetapkan visi dan misi sebagai bentuk jaminan konsistensinya agar menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi keuangan di masyarakat

VISI, MISI, DAN NILAI BUDAYA

VISI

Visi dan Misi Bank Victoria Syariah yang ditetapkan menjadi penunjuk arah tranformasi operasional untuk menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia.

Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan

MISI

NASABAH
Memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi partner bisnis yang amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah.

KARYAWAN
Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesi-onal dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik yang memahami bahwa tanah dan kekayaan adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya seperti yang ditasbihkanNya.

KOMUNITAS
Peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank Victoria Syariah mendukung keuangan yang berkelanjutan.

PEMEGANG SAHAM
Menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati- hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

REGULATOR
Melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara prudent dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

NILAI BUDAYA

Bank Victoria Syariah telah menetapkan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan (Core Values) sebagai dasar budaya perusahaan yang diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam upaya mendukung visi dan misi perusahaan dalam kegiatan operasional bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah Nilai-nilai budaya perusahaan H-E-B-A-T yang diterapkan oleh Bank Victoria Syariah adalah *Honest, Energic, Brilliant, Accountable*, dan *Trust.* Hal ini menjadi acuan utama dalam upaya mendukung visi dan misi perusahaan dalam kegiatan operasional.

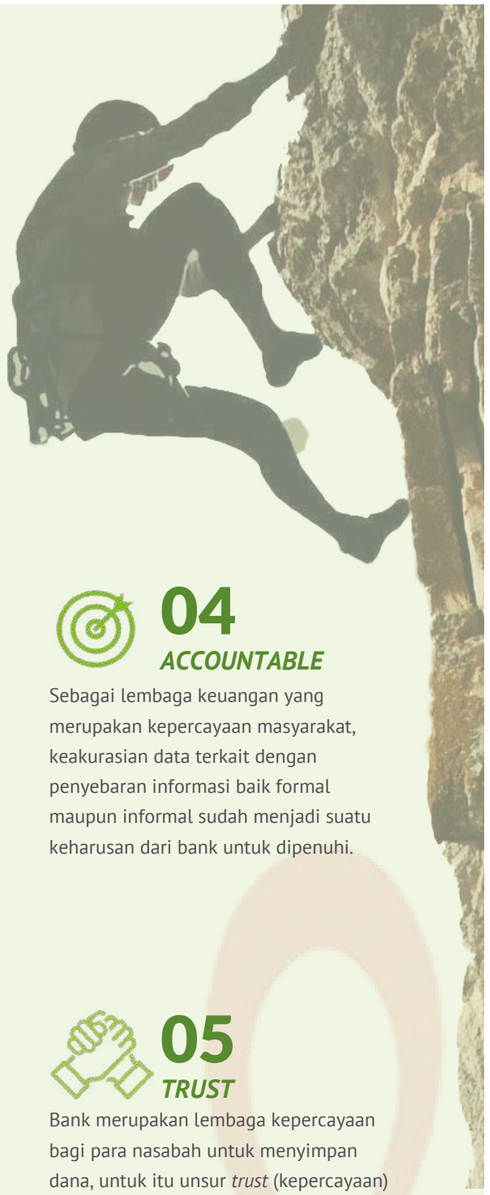

01 HONEST

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Bank. Seluruh Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali arus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

02 ENERGIC

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

03 BRILLIANT

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun team harus memiliki kemampuan yang brilliant untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan *(sustainable growth).*

04 ACCOUNTABLE

Sebagai lembaga keuangan yang merupakan kepercayaan masyarakat, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu keharusan dari bank untuk dipenuhi.

05 TRUST

Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

STRUKTUR KEPEMILIKAN PT BANK VICTORIA SYARIAH

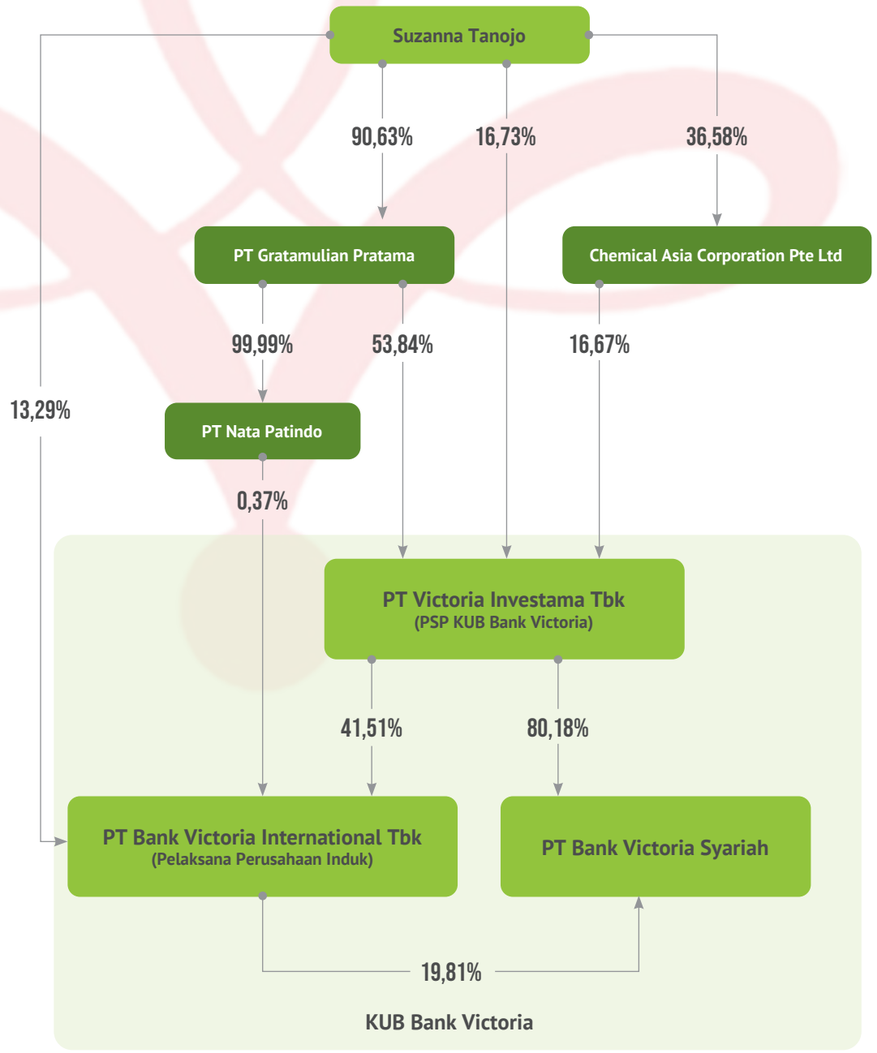

Keterangan:

- ViCO (PSP) merupakan badan hukum bukan lembaga keuangan
- Bank yang dimiliki PSP BVIC dan BVIS
- BVIC merupakan pelaksana perusahaan Induk yang ditunjuk oleh PSP

SHARE HOLDER

PROFIL PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGANISASI UTAMA

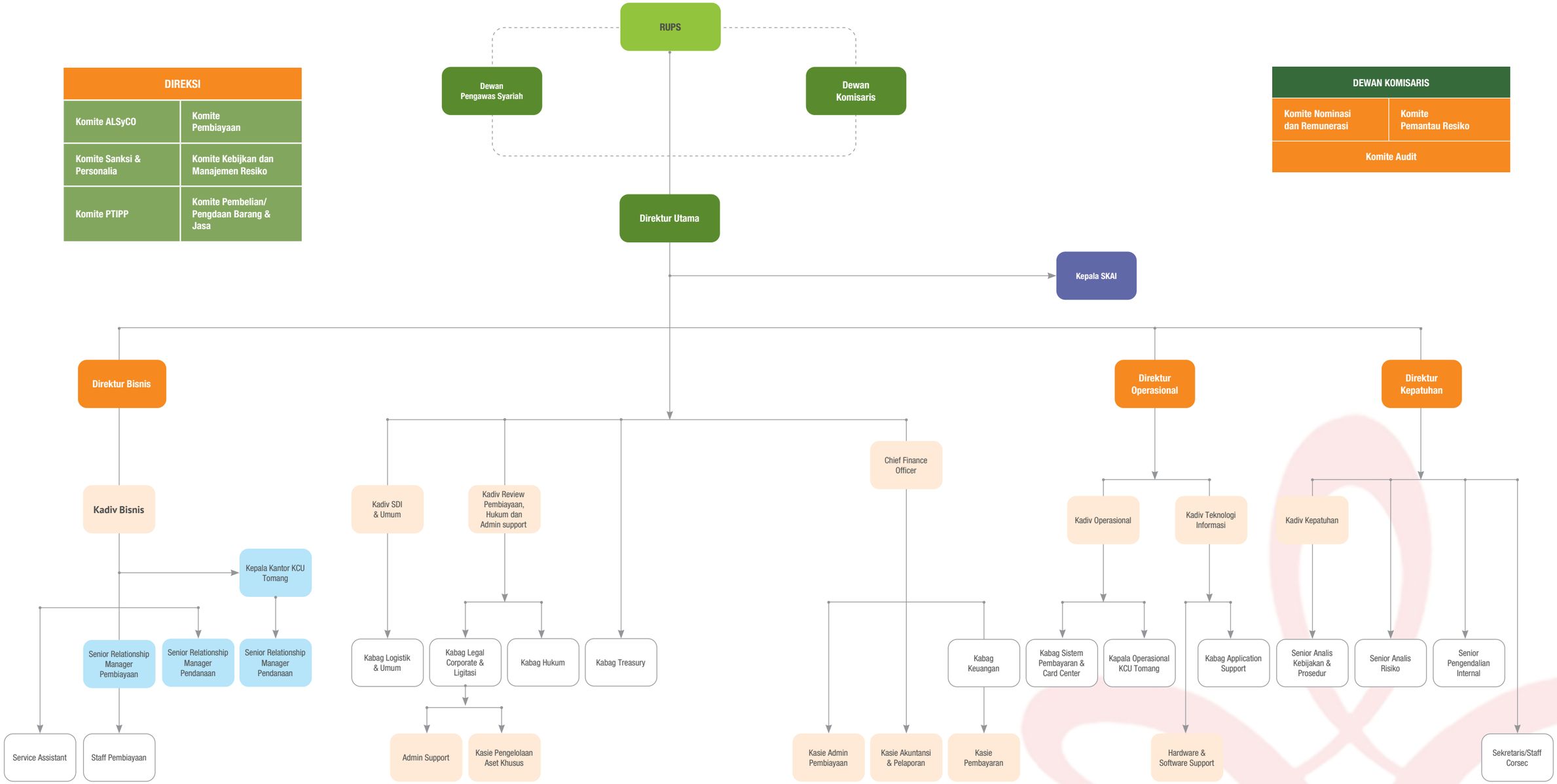

JEJAK LANGKAH

1966-1977
PT Bank Swaguna didirikan di Cirebon pada tahun 1966, Bank ini memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 7 Januari 1967.

2007
PT Bank Victoria mengakusisi 99,99% saham Bank Swaguna dan mendapat persetujuan Bank Indonesia (BI) tanggal 3 Agustus 2007. Modal disetor Bank menjadi Rp90 miliar pada bulan September 2007.

2008
Pada bulan Maret 2008, Pemegang Saham PT Bank Victoria International Tbk kembali memperkuat modal Rp110 miliar.

2010
Bank Swaguna dikonversi menjadi PT Bank Victoria Syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP-GBI/DpG/2010, Bank beroperasi penuh dengan sistem Syariah pada tanggal 1 April 2010.

JEJAK LANGKAH

2011-2012
Entry Point to Sharia Retail Bank menambah jaringan kantor dan memperluas pangsa pasar.

2013
Memperkokoh pondasi melalui pengembangan produk dan segmen bisnis baru.

2014
Penambahan setoran modal Rp50 miliar sehingga modal menjadi Rp160 miliar.

2015
Penataan strategi dan penguataan Good Corporate Governance (GCG).

2016
Tahun transformasi Penambahan setoran modal Rp50 miliar sehingga Modal menjadi Rp210 miliar

2017
Penambahan setoran modal Rp100 miliar sehingga Modal menjadi Rp310 miliar.

2018
Perbaikan Kualitas Aset Produktif dan Profitabilitas.

2019
Penambahan Setoran Modal Rp50 miliar sehingga Modal menjadi Rp360 miliar.

2020
Pertumbuhan Dana Pihak ketiga (DPK) dan Percepatan Recovery Aset Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

2021
Pertumbuhan DPK & Percepatan Recovery Aset Ayda

2022
Bank melakukan peningkatan Modal Dasar yang sebelumnya sebesar Rp.1 Triliun menjadi Rp.1,43 Triliun, dan penambahan modal disetor dari 360 miliar menjadi 1,06 Triliun.

JARINGAN KANTOR

KANTOR PUSAT

Kantor Pusat Operasional
Gedung Graha BIP Lantai 5, Jl.Gatot Subroto Kav. 23 Kel. Karet Semanggi,
Kec. Setiabudi - Jakarta Selatan
Telp: (+62 21)-5600467, (+62 21)-5225285 (Hunting)
Fax: (+62 21)-5664247
Situs Web: https://bankvictoriasyariah.co.id

KANTOR CABANG

Kantor Cabang Utama Tomang
Gedung The Victoria Lt. 1
Jl. Tomang Raya Kav. 35-37
Jakarta Barat 11440
Telp: (+62 21) - 5600468
Fax: (+62 21) - 29200630

IKHTISAR KEUANGAN

NERACA (dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Aset	2.126.019	2.262.451	2.296.027	1.660.849	2.110.830
Jumlah Liabilitas	277.050	220.517	537.287	69.395	255.588
Jumlah Dana Wadiah dan Dana Syirkah Temporer	1.599.141	1.710.985	1.576.027	1.243.423	816.420
Jumlah Ekuitas	291.249	354.244	379.557	360.962	1.060.932

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Pengelolaan Dana	169.987	168.019	148.750	113.818	76.482
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(109.262)	(118.916)	(112.244)	(68.364)	(39.152)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	60.725	49.103	36.506	45.454	37.330
Pendapatan Operasional Lainnya	1.688	4.477	15.970	27.888	21.291
Beban Operasional	(56.195)	(53.232)	(48.860)	(61.088)	(53.780)
Laba Operasional	6.218	348	3.616	12.254	4.841
Penghasilan (Beban) Non-Operasional	118	721	(204)	1.049	2.048
Laba sebelum Pajak	6.336	1.069	3.412	13.303	6.889
Pajak Kini	-	-	-	-	(296)
Laba Setelah Pajak Kini	6.336	1.069	3.412	13.303	6.593
Pajak Tangguhan	(1.362)	(156)	(3.627)	(8.783)	(1.480)
Laba Bersih Setelah Pajak Tangguhan	4.974	913	(215)	4.520	5.113

IKHTISAR KEUANGAN

RASIO KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	22,07%	19,44%	24,60%	33,21%	149,68%
Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	0,32%	0,05%	0,16%	0,71%	0,45%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	2,02%	0,29%	-0,09%	1,79%	1,54%
Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)	96,38%	99,80%	97,80%	91,35%	95,05%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF Gross)	4,00%	3,94%	4,73%	9,54%	1,81%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF Netto)	3,46%	2,64%	2,90%	3,72%	1,36%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	82,78%	80,52%	74,05%	65,26%	76,73%

03

LAPORAN MANAJEMEN

- Laporan Dewan Komisaris
- Profil Dewan Komisaris
- Laporan Direksi
- Profil Direksi
- Laporan Dewan Pengawas Syariah
- Profil Dewan Pengawas Syariah
- Profil Pejabat Eksekutif
- Profil Komite-Komite

DEWAN KOMISARIS

Sari Idayanti
Komisaris Utama

Retno Dwiyanti Widaningsih
Komisaris Independen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

> Dewan Komisaris menghargai segala upaya yang telah dilakukan Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan pegawai dalam meningkatkan kinerja Bank dan yakin bahwa pencapaian dapat terus ditingkatkan dengan kerjasama dari segenap Sumber Daya Insani serta dengan senantiasa memohon izin dan ridho Allah SWT agar Bank Victoria Syariah mampu untuk terus tumbuh berkelanjutan.

Bismillahirohmanirrohim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan ridho – Nya, Kami dapat melalui tahun 2022 dengan baik.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi dan kebijakan pengelolaan aktivitas usaha Bank sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan memastikan bahwa Bank tetap beroperasi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnisnya.

Dewan Komisaris menghargai dan percaya bahwa dengan kerjasama dari segenap Sumber Daya Insani (SDI) serta dengan senantiasa memohon izin dan ridho Allah SWT, Bank dapat melewati tantangan yang ada dengan mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas, menjaga posisi likuiditas dan permodalan yang memadai, sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Dalam hal ini, Dewan Komisaris juga berkomitmen untuk memastikan bahwa Bank selalu beroperasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan, serta memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Semua ini dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank sebagai lembaga keuangan yang aman dan terpercaya.

Pencapaian kinerja Bank Victoria Syariah yang baik ditengah tantangan yang besar sepanjang tahun 2022 ini, memberikan sinyal positif akan keberlangsungan bisnis Bank untuk dapat memberikan nilai tambah dalam jangka panjang bagi segenap pemangku kepentingan. Dewan Komisaris menghargai segala upaya yang telah dilakukan Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan pegawai dalam meningkatkan kinerja Bank dan yakin bahwa pencapaian tersebut dapat terus ditingkatkan dengan kerjasama dari segenap Sumber Daya Insani (SDI) serta dengan senantiasa memohon izin dan ridho Allah SWT agar Bank Victoria Syariah mampu untuk terus tumbuh berkelanjutan.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank yang dijalankan Direksi dengan menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi secara berkala diantaranya untuk membahas kinerja Bank dalam hal-hal strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Bank. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan memastikan bahwa keputusan strategis yang diambil sesuai dengan visi dan misi Bank serta tidak merugikan nasabah dan pemegang saham.

Landasan dasar pengawasan yang digunakan Dewan Komisaris adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan telaah atas laporan dan isu strategis Bank sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan yang dibantu oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Berdasarkan hasil telaah tersebut, Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan menjaga keberlangsungan bisnis Bank.

Berdasarkan hasil pengawasan atas pengelolaan Bank tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah menerapkan inisiatif yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas dan kualitas aset. Dewan Komisaris menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Direksi telah mempertimbangkan pandangan dan masukan yang diberikan Dewan Komisaris.

Perkembangan Usaha dan Kinerja Keuangan

Bank Victoria Syariah berhasil menutup tahun 2022 dengan kinerja yang baik dimana, perolehan laba tahun berjalan yaitu laba sebelum pajak sebesar Rp.6,9 miliar meskipun mengalami penurunan 48% dan rasio KPMM sebesar 149,68% meningkat 350,70% dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya tambahan setoran modal. Sedangkan Total Aset sebesar Rp.2,1 miliar, lebih tinggi 27% dibanding tahun 2021. Realisasi pembiayaan sebesar Rp.623 miliar mengalami penurunan sebesar 23%; dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.813 miliar menurun hingga Rp.35% . Penurunan DPK adalah untuk mengimbangi penyaluran pembiayaan. Seiring dengan penurunan pembiayaan, berdampak pada turunnya pendapatan inti usaha sehingga Laba tahun berjalan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemegang Saham dan Modal

Berdasarkan RUPSLB tanggal 6 Desember 2022, Bank melakukan peningkatan Modal Dasar yang sebelumnya sebesar Rp.1 Triliun menjadi Rp.1,43 Triliun. Sedangkan Modal disetor Bank sebelumnya sebesar Rp.360 Miliar dan dengan tambahan setoran modal sebesar Rp.700 Miliar yang diperoleh dari PT Victoria Investama Tbk (VICO) sebesar Rp.562 Miliar dan PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp.138 Miliar menjadikan modal disetor Bank berjumlah Rp.1.06 Triliun.

Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut, menyebabkan Susunan Pemegang Saham Bank Victoria Syariah berubah menjadi sebagai berikut:

- PT Victoria Investama Tbk : 80,19%
- PT Bank Victoria International Tbk :19,80%
- Masyarakat Lainnya : 0,01%

Penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris percaya bahwa penerapan GCG merupakan aset penting dalam budaya organisasi yang kokoh dan unggul sehingga pengelolaan bisnis Bank dapat memenuhi prinsip transparansi, Selain itu, Dewan Komisaris juga berharap bahwa penerapan GCG dapat membantu Bank dalam mencapai tujuan jangka panjang dan memperkuat kepercayaan nasabah serta pemegang saham.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari penerapan prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*-GCG). Melalui pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa manajemen perusahaan menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mendorong kualitas penerapan prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris mengevaluasi dan memberikan saran atas pelaksanaan GCG diantaranya melalui rapat bersama Direksi serta laporan yang disampaikan Direksi termasuk hasil *self assessment* GCG.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran organisasi terus berupaya membangun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, sistem dan perangkat yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Bank melakukan self assessment secara berkala terhadap pelaksanaan GCG mengacu pada ketentuan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perbankan syariah yang meliputi 11 aspek penilaian. Hasil *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sepanjang tahun 2022 berada pada kategori "Baik".

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran fungsi pengawasan atas pengelolaan Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit

sesuai Surat Keputusan Direksi No.029/DIR-SK/JKT/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung fungsi pengawasan atas halhal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal *(Internal Control System)*, serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Selama tahun 2022 Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 18 kali dan menerbitkan 15 Memo Internal pengawasan.

Komite Pemantau Risiko

sesuai Surat Keputusan Direksi No.014/DIR-SK/JKT/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan penyampaian arahan kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2022 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 8 kali rapat dan menerbitkan 8 Memo Internal pengawasan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

sesuai Surat Keputusan Direksi No.014A/DIR-SK/JKT/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas dan bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan pengawasan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi. Sepanjang tahun 2022 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 5 kali rapat dan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan remunerasi dan nominasi .

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dibawah Komisaris tersebut telah berjalan dengan baik.

Komitmen Dewan Komisaris

Kinerja ekonomi nasional yang berangsur membaik turut didukung dengan kontribusi yang positif dari sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta dukungan & komitmen Pemegang Saham atas penambahan setoran modal, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus menjaga dan berusaha meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan syariah yang sehat dan tumbuh berkelanjutan dengan hal-hal sebagai berikut:

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

1. Konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Konsisten untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola manajemen risiko sesuai *risk appetite*, serta pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
3. Meningkatkan peran dalam rangka mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan memastikan bahwa bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal dan regulator.

Akhir kata dengan mengharap ridho Allah SWT, mari kita tingatkan kerja sama dan sinergi yang telah terjalin baik selama ini agar Bank semakin sehat dan berkembang lebih baik tahun-tahun mendatang. *Aamiin Yaa Robbal Alamiin.*

Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas Nama Dewan Komisaris
PT Bank Victoria Syariah

Sari Idayanti
Komisaris Utama

PT Bank Victoria Syariah
Laporan Tahunan 2022

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Sari Idayanti
Komisaris Utama

WNI, Lahir di Jakarta 21 Desember 1966
Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 1990

- **Sejak September 2022**
  PT. Bank Victoria Syariah sebagai Komisaris Utama
- **Sejak September 2016**
  PT. Bank Victoria Syariah sebagai Komisaris
- **April 2013 - September 2016**
  PT. Bank Victoria Syariah sebagai Direktur Operasional
- **April 2010 - Maret 2013**
  PT. Bank Victoria Syariah sebagai Direktur Utama
- **Mei 2009 - Maret 2010**
  PT. Bank Swaguna sebagai Direktur Utama
- **November 2007 - April 2009**
  PT. Bank Swaguna sebagai Direktur Operasional
- **Agustus 1995 - Oktober 2007**
  PT. Bank Victoria International Tbk. sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan
- **1989 – 1995**
  PT. Bank Bira dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Akunting & Administrasi Keuangan

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Retno Dwiyanti Widaningsih
Komisaris Independent

WNI, Lahir di Jakarta 14 Desember 1959
SLTA Tarakanita 1979

- **Sejak Januari 2021**
  PT. Bank Victoria Syariah sebagai Komisaris Independen
- **Juni 2020**
  PT. Bank Victoria Syariah sebagai Calon Komisaris Independen
- **Agustus 2013 - Juni 2020**
  PT. Bank Victoria Syariah sebagai anggota Komite Audit di Bank Victoria Syariah
- **April 2001 - Mei 2006**
  Deutsche Bank AG sebagai Vice President, Head of Group Audit
- **Januari 1999 - Maret 2001**
  Deutsche Bank AG sebagai Assistant Vice President, Deputy Head of Audit
- **April 1994 - Desember 1998**
  Deutsche Bank AG sebagai Auditor
- **Januari 1991 - Maret 1994**
  Deutsche Bank AG sebagai Deputy Head of Private Banking Back Office
- **Juli 1990 - Desember 1990**
  Deutsche Bank AG sebagai Officer di Remittance Division
- **Juli 1986 - Juni 1990**
  Deutsche Bank AG sebagai Staff di Remittance Division
- **Oktober 1982 - Juni 1986**
  European Asian Bank sebagai Staff Customer Service
- **Agustus 1980 - September 1982**
  Bank Dagang Negara sebagai Staff Operasional

LAPORAN DIREKSI

Dery Januar
Direktur Utama*

Ruly Dwi Rahayu
Direktur Kerpatuhan*

Andy Sundoro
Direktur

*** Menunggu persetujuan Fit & Proper Test OJK**

Dan telah dinyatakan lulus Fit & Proper OJK pada tanggal 13 Januari 2023 sesuai dengan Surat Nomor SR-15/PB.101/2023

LAPORAN DIREKSI

Bismillahirahmanirahiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat Allah SWT, PT Bank Victoria Syariah berhasil melalui tahun 2022 dengan hasil yang optimal. Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan Bank dalam mewujudkan visinya untuk "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil & Peduli Lingkungan", Bank terus mengoptimalkan kapasitas dan perannya dalam meraih pencapaian kerja yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan.

Shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya agar kita semua mendapatkan syafaat Beliau di hari akhir nanti. Amin.

Pencapaian usaha Bank di tahun 2022, seperti yang tertuang dalam laporan tahunan ini, merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiasi strategis yang telah dilakukan manajemen, yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Bank secara berkelanjutan. Dalam mencapai target tersebut, Bank telah meningkatkan layanan digital dan memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis. Selain itu, Bank juga telah melakukan diversifikasi produk dan memperluas jaringan kantor cabang di beberapa wilayah yang potensial. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi Bank Victoria Syariah untuk menyampaikan pengelolaan Bank selama tahun buku 2022.

Kondisi Perekonomian Global

Merujuk kepada data yang dirilis Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mencapai 4,92 persen secara *year-on-year* (yoy), yang menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Namun, tantangan masih ada di sektor ketenagakerjaan dan kesehatan yang perlu terus diperhatikan. kebangkitan ekonomi dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis kesehatan ini sejalan dengan usaha penyelamatan penduduk berpenghasilan rendah oleh pemerintah di berbagai negara untuk meminimalisasi dampak yang terjadi dalam perekonomian secara gradual.

Dalam sektor ketenagakerjaan, masih terdapat masalah seperti pengangguran dan ketidakpastian kerja yang perlu diatasi. Sementara itu, di sektor kesehatan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan agar masyarakat dapat terhindar dari risiko penyakit dan meningkatkan produktivitas. Penanggulangan krisis kemanusiaan di tengah pemulihan ekonomi juga akan mencegah keberlanjutan tren peningkatan global untuk tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga daya beli masyarakat lambat laun akan menguat dan pada akhirnya mendorong perekonomian kembali berjalan.

Laporan Perekonomian Indonesia 2022 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa Tantangan perekonomian global makin naik pada tahun 2022 dipicu ketegangan geopolitik dunia yang memperburuk fragmentasi dan prospek ekonomi global. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, meski penyebaran Covid-19 mulai menurun. Pemburukan kondisi tersebut menyebabkan koreksi prakiraan pertumbuhan ekonomi global dan menambah ketidakpastian pasar keuangan global.

Secara umum perekonomian dunia pada tahun 2022 menghadapi lima tantangan serius yang sangat perlu

LAPORAN DIREKSI

diwaspadai. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang menurun *(slow growth)*. Kedua, inflasi yang sangat tinggi *(high inflation)* dipicu kenaikan harga energi dan pangan global. Ketiga, kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama *(higher for longer)*. Keempat, dolar AS yang sangat kuat *(strong dollar)* sehingga memberikan tekanan depresiasi nilai tukar banyak negara. Kelima, penarikan dana investor global dan mengalihkan ke aset likuid *(cash is the king)*.

Sinergi kebijakan kuat Bank Indonesia, Pemerintah, dan KSSK telah menopang berlanjutnya pemulihan ekonomi pada 2022 dengan ditopang stabilitas ekonomi yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diprakirakan meningkat dalam kisaran 4,5% -5,3% dengan kecenderungan bias atas didorong ekspor yang tetap kuat seiring dengan besarnya permintaan beberapa mitra dagang utama serta dukungan kebijakan Pemerintah. Inflasi meski lebih tinggi dari kisaran sasaran tahun 2022 pascakenaikan harga BBM bersubsidi, tercatat lebih rendah dari proyeksi awal dan diprakirakan akan kembali ke sasaran pada paruh pertama tahun 2023. Stabilitas sistem keuangan juga tetap baik dengan ketahanan yang terjaga dan fungsi intermediasi yang meningkat.

Perbaikan kinerja ekonomi domestik berlanjut pada triwulan II 2022, meskipun risiko pelemahan ekonomi dan kenaikan tekanan inflasi global terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 mencapai 5,45% (yoy), jauh lebih tinggi dari prakiraan dan capaian triwulan sebelumnya.

Capaian positif tersebut didukung oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, serta tetap tingginya kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51% (yoy) didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan makin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sementara, investasi tumbuh melambat sebesar 3,07% (yoy), disebabkan penurunan investasi bangunan, di tengah kinerja investasi nonbangunan yang tetap baik. Konsumsi Pemerintah terkontraksi sebesar 4,86% (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada semester I 2022 tercatat meningkat pada semua kelompok yaitu inti, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food, VF), dan inflasi kelompok harga yang diatur Pemerintah (administered prices, AP). Inflasi IHK pada Juni 2022 tercatat sebesar 4,35% (yoy), lebih tinggi dari 1,33% pada Juni 2021. Kenaikan inflasi IHK tersebut terjadi di seluruh wilayah dengan disparitas yang juga terpantau melebar. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih adanya permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi VF khususnya terkait pola produksi dan kelancaran distribusi di daerah.

Inflasi inti meningkat namun tetap dalam level yang rendah, sejalan dengan permintaan domestik yang membaik secara gradual pasca kebijakan pelonggaran mobilitas serta berlanjutnya transmisi inflasi komoditas global dan depresiasi nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian sedang dalam proses pemulihan yang stabil, namun tetap perlu diwaspadai terhadap risiko inflasi yang lebih tinggi di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang tepat perlu diterapkan untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi inti pada Juni 2022 tercatat sebesar 2,63% (yoy), meningkat dibandingkan 1,49% pada tahun sebelumnya didorong oleh kenaikan pada semua disagregasinya. Inflasi inti food 3,73% (yoy) pada Juni 2022, meningkat dibanding 3,69% (yoy) pada Juni 2021, disumbang oleh peningkatan kelompok food non-traded. Namun demikian, kelompok food traded mengalami penurunan.

Suku bunga BI 7-Days Reverse Repo tetap dipertahankan rendah sampai dengan Juli 2022 sejalan dengan inflasi inti yang masih terjaga. Sampai dengan

LAPORAN DIREKSI

sekitar pertengahan tahun 2022, inflasi inti masih terus terjaga pada level yang rendah di bawah 3,0% (yoy) di tengah kenaikan tekanan eksternal terkait dengan peningkatan risiko stagflasi di berbagai negara. Hal ini menunjukkan kebijakan moneter yang akomodatif dan stabil dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, perlu diwaspadai potensi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi inflasi dan stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan.

Terjaganya inflasi inti tersebut ditopang oleh dampak inflasi dari sisi permintaan yang masih terbatas, ekspektasi inflasi yang terjangkau, stabilitas nilai tukar yang terjaga, serta dukungan kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM. Dengan tekanan inflasi inti yang masih rendah dan perbaikan ekonomi nasional yang masih berada pada tahap awal pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR rendah sebesar 3,50%. Pertumbuhan kredit terus meningkat hingga mencapai 11,35% pada Desember 2022 seiring dengan perbaikan baik di sisi permintaan maupun penawaran.

Di sisi penawaran, terdapat permintaan yang tinggi untuk produk tersebut, sehingga harga pasarannya cenderung naik dalam beberapa bulan terakhir. Namun, persaingan yang ketat di industri ini juga dapat mempengaruhi harga jual produk." pertumbuhan kredit tersebut juga ditopang oleh kebijakan pemberian insentif GWM kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang mampu memicu kredit sektor prioritas tumbuh tinggi.

Perbaikan pertumbuhan kredit juga ditopang oleh kredit perumahan dan kendaraan bermotor yang terus menunjukkan perbaikan sejalan dengan kebijakan LTV properti dan Uang Muka Kendaraan Bermotor yang tetap longgar.

Di samping itu, perbaikan pertumbuhan kredit pada tahun 2022 juga didukung oleh pelonggaran indeks lending requirement sejalan dengan penurunan SBDK dan suku bunga kredit yang ditopang oleh kebijakan Transparansi SBDK.

Sejalan dengan kinerja perekonomian domestik, kinerja sektor jasa keuangan pada tahun 2022 juga terpantau cukup solid. Intermediasi lembaga jasa keuangan masih tumbuh, tercermin dari kenaikan penyaluran kredit perbankan sebesar 11,35% (yoy) dan pembiayaan perusahaan pembiayaan sebesar 10,68% (yoy). Penghimpunan dana di pasar modal hingga akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp267,73 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 36 emiten. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.850,62 dengan nilai kapitalisasi pasar saham sebesar Rp9.495 triliun.

Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen.

Sementara itu dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Ekonomi Indonesia tahun 2022 terhadap 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen.

Sepanjang tahun 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat melemah 9,31%. Pelemahan ini didorong oleh menurunnya pasokan dollar AS di dalam negeri karena adanya arus modal keluar yang dipicu kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed. Nilai tukar rupiah pada perdagangan terakhir di 2022, ditutup pada level Rp15.592 per dollar AS atau menurun 9,31%

LAPORAN DIREKSI

dibandingkan perdagangan terakhir di 2021, yang pada level Rp14.263 per dollar AS.

Kondisi Perbankan Syariah

Sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi, kondisi industri perbankan syariah di dalam negeri menunjukkan kondisi yang solid dan terus membaik. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Indonesia periode November 2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijelaskan bahwa:

1. Rasio Kecukupan Modal *(Capital Adequacy Ratio)* bank umum syariah tetap tinggi yakni sebesar 23,65%.
2. Kualitas aset bank umum syariah juga tercatat membaik. Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (NPF) terjaga stabil di level 2,50%.
3. Fungsi intermediasi perbankan syariah nasional secara perlahan mengalami perbaikan, hal ini terlihat dari penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang mulai bertumbuh positif. Pada November 2022, posisi total pembiayaan bank umum syariah mengalami akselerasi menjadi Rp489,5 triliun atau tumbuh 21,98% (yoy).
4. Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum syariah, posisinya masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 13,39% (yoy) menjadi Rp581,4 triliun per November 2022.

Strategi Dan Kinerja Tahun 2022

Perekonomian global pada tahun 2022, secara umum bergerak melemah di tengah kembali meningkatnya tensi geopolitik dunia dan normalisasi kebijakan oleh Bank-Bank Sentral utama dunia. Di tengah dinamika tersebut, perekonomian domestik terus melanjutkan tren penguatan seiring masih solidnya kinerja sektor eksternal dan terkendalinya kondisi pandemi domestik, di tengah peningkatan inflasi seiring penyesuaian harga BBM.

Dalam hal ini Direksi secara cermat mengupayakan pengambilan berbagai keputusan, menjalankan ragam inisiatif dan langkahlangkah strategis dengan selalu memperhatikan penerapan manajemen risiko yang pruden dan tata kelola perusahaan yang baik.

Sejalan hal tersebut, Bank mampu menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi dari para pemangku kepentingan, sebagaimana tercermin dari berbagai apresiasi yang diterima dari regulator, investor dan berbagai lembaga independen lainnya.

Pada periode Desember 2022, Bank berhasil mencatat kinerja yang sangat baik meskipun dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah nasabah baru serta pertumbuhan laba yang signifikan. Bank juga berhasil mempertahankan kualitas asetnya meskipun situasi ekonomi yang tidak stabil. Bank Victoria Syariah mampu membukukan laba sebelum beban pajak sebesar Rp6,9 miliar atau turun sebesar 48,8% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dari hak atas bagi hasil sebesar Rp8,3 miliar atau 19,08% dari Rp45,6 miliar di tahun 2021 menjadi Rp37,3 miliar pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, posisi Pembiayaan mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 22,71% dibandingkan posisi tahun 2021 menjadi Rp623,0 miliar sedangkan untuk posisi Surat Berharga yang dimiliki Bank juga mengalami peningkatan sebesar 66,9% (yoy) menjadi Rp898,1 miliar. Posisi Dana Pihak Ketiga di tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 34,25% (yoy) dari Rp1.234,9 miliar di periode Desember 2021 menjadi Rp811,9 miliar pada periode Desember 2021.

Didasari atas beratnya tantangan ke depan, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik agar dapat menghadapinya dengan percaya diri dan optimis.

LAPORAN DIREKSI

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman serta membangun jaringan yang kuat. sejalan dengan adanya penambahan Modal Bank sebesar Rp 700Milyar, maka kebijakan Bank menitikberatkan pada pertumbuhan pembiayaan yang sehat, perbaikan proses bisnis, penyempurnaan organisasi, diversifikasi produk serta program-program yang produktif untuk mendukung peningkatan DPK retail dan *Fee Base Income*, dengan skema sinergi dan partnership berdasarkan prinsip syariah. Sejalan kebijakan perusahaan, manajemen memiliki sejumlah strategi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan asset produktif melalui optimalisasi pengelolaan Surat Berharga dan Penguatan struktur pembiayaan melalui percepatan ekspansi pembiayaan yang sehat/prudent dengan prioritas sektor UMKM, disertai program penyelesaian NPF, AYDA, WO dan review portofolio Restrukturisasi.
2. Memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan volume CASA (intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan Tabungan/dana ritel, peningkatan volume transaksi nasabah pembiayaan), serta perluasan sebaran customer base deposito, agar sekaligus dapat menekan ketergantungan kepada nasabah inti.
3. Penguatan bisnis proses agar dapat secara efektif mendukung percepatan peningkatan aset produktif dan lebih kompetitif dengan bank lain.
4. Terus berinovasi mengembangkan model bisnis, produk dan layanan yang sesuai kebutuhan nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip syariah.
5. Membangun *self awareness* dan *self confidence* pada semua Sumber daya Insani Bank Victoria Syariah, disertai peningkatan profesionalisme, kompetensi teknis dan integritasnya.
6. Penerapan KPI sebagai driver dalam program peningkatan kinerja dan kontribusi individu/team, pada semua level, secara konsisten dan transparan, sekaligus mendukung penguatan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan, dan implementasi Budaya "HEBAT".
7. Penguatan infrastruktur IT secara bertahap, melalui skema kolaborasi dan kerjasama yang saling menguntungkan

Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas dan andal akan mampu memberikan kontribusi penting terhadap upaya pencapaian visi dan misi Bank Victoria Syariah. Oleh karena itu, Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM-nya melalui program pelatihan dan pengembangan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inspiratif. Karena itulah, Bank Victoria Syariah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDI.

Tahun 2022, pengelolaan SDI masih tetap menjadi fokus utama Perseroan. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai terus ditingkatkan kualitasnya, agar lebih efektif mendukung kinerja perseroan.

Adapun strategi pengembangan SDI diarahkan pada:

1. Menerapkan *Performance Management Process* di seluruh organisasi yang didukung oleh *key performance indicator* yang jelas dan transparan serta reward mekanisme yang kuat dan adil.
2. Penempatan SDI harus sesuai antara profil dan kompetensi *(the right man in the right place)* yang didukung oleh struktur organisasi yang baik.
3. Mengembangkan program serta kebijakan dalam rangka membangun etos kerja yang berorientasi pada budaya perusahaan HEBAT *(Honest, Energic, Brilliant, Accountable, Trust)* kejujuran, semangat

LAPORAN DIREKSI

jiwa muda, cerdas, akurasi dan dapat dipercaya serta mempunyai integritas yang baik dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan searah dengan prinsip syariah.

4. Pemenuhan Program Sertifikasi dan Program Training Reguler berupa *Soft Skil* dan *Hard Skill*.

Selain itu, pada tahun 2022, Bank Victoria Syariah juga berupaya untuk melakukan penyesuaian standar remunerasi agar memiliki posisi yang lebih baik dari market, yang dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi internal Perseroan dan menyesuaikan dengan kondisi pasar/industri.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pemangku Kepentingan yang yang telah memberikan dukungan penuh kepada Bank Victoria Syariah dapat melewati seluruh tantangan dan menutup tahun 2022 dengan kinerja yang baik dan berkelanjutan.

Kepada seluruh Nasabah, Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya untuk tetap tumbuh berkembang bersama Bank Victoria Syariah disegala situasi, dan merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat melayani dengan sepenuh hati.

Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas nama Direksi
PT Bank Victoria Syariah

Dery Januar
Direktur Utama*

*** Menunggu persetujuan Fit & Proper Test OJK**
Dan telah dinyatakan lulus Fit & Proper OJK pada tanggal 13 Januari 2023 sesuai dengan Surat Nomor SR-15/PB.101/2023

PT Bank Victoria Syariah
Laporan Tahunan 2022

PROFIL DIREKSI

PROFIL DIREKSI

Dery Januar

Direktur Utama*

WNI, Lahir di Bandung 3 Januari 1969

- Magister Manajemen, Universitas Indonesia, tahun 2008
- Sarjana Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Institut Pertanian Bogor, tahun 1992
- **Sejak September 2022**
  PT Bank Victoria Syariah sebagai Direktur Utama*
- **April 2022 – September 2022**
  PT Raksasa Laju Lintang sebagai Advisor (SVP Partnership)
- **Februari 2020 – November 2021**
  PT Bank KB Bukopin Syariah sebagai Direktur Utama
- **Oktober 2017 – Februari 2020**
  PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Pejabat Eksekutif General Manager of Credit Analyst
- **April 2017 – Oktober 2017**
  PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Pejabat Eksekutif Division Head of HR Development
- **Juni 2015 – April 2017**
  PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Pejabat Eksekutif Division Head of Credit Product Development
- **April 2011 – Juni 2015**
  PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Pejabat Eksekutif Branch Manager, Kantor Cabang Mataram, Palembang, dan Pekanbaru
  Bank Dagang Negara sebagai Staff Operasional

*** Menunggu persetujuan Fit & Proper Test OJK**

Dan telah dinyatakan lulus Fit & Proper OJK pada tanggal 13 Januari 2023 sesuai dengan Surat Nomor SR-15/ PB.101/2023

PROFIL DIREKSI

Ruly Dwi Rahayu

Direktur Kepatuhan*

WNI, Lahir di Jakarta 17 Maret 1965

- Sarjana Kimia, Universitas Indonesia, tahun 1990.
- **Sejak September 2022**
  PT Bank Victoria Syariah sebagai Direktur Kepatuhan
- **November 2021 – September 2022**
  PT Victoria Alife sebagai Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
- **September 2021 – September 2022**
  PT Emperor Finance Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan
- **Juni 2019 – Januari 2021**
  PT Bank Victoria International sebagai Pejabat Eksekutif Kepala Divisi Kepatuhan UKPN / Integrated dan Sisdur
- **April 2016 – Juni 2019**
  PT Bank Victoria International sebagai Pejabat Eksekutif Kepala Divisi Corporate Secretary
- **Agustus 2011 – April 2016**
  PT Bank Victoria International sebagai Pejabat Eksekutif Kepala Divisi Manajemen Risiko
- **Agustus 2006 – Agustus 2011**
  PT Bank Victoria International sebagai Pejabat Eksekutif Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- **November 1995 – Agustus 2006**
  PT Bank Victoria International sebagai Pejabat Eksekutif Kepala Satuan Kerja Audit Intern
- **September 1995 – November 1995**
  PT Bank Victoria International sebagai Staf Satuan Kerja Audit
- **Juli 1991 – Agustus 1995**
  PT Bank Panin sebagai Staf Auditor
- **Januari 1991 – Juli 1991**
  PT Bank Panin sebagai ODP

*** Menunggu persetujuan Fit & Proper Test OJK**

Dan telah dinyatakan lulus Fit & Proper OJK pada tanggal 13 Januari 2023 sesuai dengan Surat Nomor SR-15/ PB.101/2023

PROFIL DIREKSI

Andy Sundoro
Direktur Bisnis

WNI, Lahir di Yogyakarta 11 Maret 1968

- Sarjana Teknik Elektro, Universitas Trisakti Jakarta, tahun 1990
- Master of Business Administration, Colorado State University - USA, tahun 1994

- **Sejak Juni 2015**
  PT Bank Victoria Syariah sebagai Direktur
- **Juli 2006- 2015**
  PT Bank Victoria International, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Divisi Commercial Banking, Kepala Divisi Corporate Banking, dan Kepala Divisi Credit Analyst
- **2005 - 2006**
  PT Bank DBS Indonesia sebagai Relationship Manager Enterprise Banking
- **1997 - 2005**
  PT Bank Panin Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Corporate Banking
- **1994 - 1997**
  PT Bank LTCB Central Asia sebagai Account Officer
- **1989**
  PT Suwantara Indonesia sebagai Engineering Sales

PT Bank Victoria Syariah
Laporan Tahunan 2022

LAPORAN DEWAN PENGAWAS PENGAWAS SYARIAH

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah bagi Allah SWT atas segala berkat yang diberikan kepada Bank Victoria Syariah di sepanjang tahun 2022. Semoga keberkahan ini terus berlanjut dan Bank Victoria Syariah dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai bank umum syariah yang beraktivitas di tengah industri perbankan nasional, Bank victoria Syriah telah berhasil mencatat perkembangan dan kinerja usaha yang positif. Dengan perkembangan perekonomian yang masih lesu pasca pandemi Covid-19, Dewan Pengawas Syariah berharap optimisme seluruh stakeholder Bank Victoria Syariah tetap tinggi dalam upaya meningkatkan kinerja Bank Victoria Syariah pada tahun 2023.

Dengan penerapan business model yang fokus dan konsisten, serta partisipasi dari seluruh stakeholder, insha Allah kinerja Bank Victoria Syariah pada tahun mendatang akan menjadi lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Victoria Syariah dapat terus secara berkelanjutan utuk meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan, Selain itu, Bank Victoria Syariah juga dapat melakukan inovasi-inovasi baru yang dapat menarik minat nasabah dan meningkatkan daya saing di pasar perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan terkait.serta memperluas jangkauan pasar dengan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Kita juga wajib bersyukur, indikator pencapaian kinerja Bank Victoria Syariah pada tahun 2022 telah mengalami peningkatan dari sisi kualitas, meskipun terdapat adanya fluktuasi baik pada sisi jumlah Aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga serta hasil laba usaha di tahun berjalan.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Keadaan ini tentu tidak terlepas dari usaha, kerja keras dari seluruh pihak di Bank Victoria Syariah dan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat secara umum dan khususnya nasabah terhadap kinerja Bank Victoria Syariah. Amanah yang diberikan oleh masyarakat dan nasabah tentu haruslah dijaga dan dipertahankan dengan baik.

Dewan Pengawas Syariah, sebagai pihak independen yang mendapat amanah untuk menjaga kepatuhan Bank Victoria Syariah atas pemenuhan aspek syariah, secara periodik melakukan on-site supervision untuk memastikan kepatuhan syariah pada operasional Bank Victoria Syariah. Di samping itu, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan review atas produk yang akan dikeluarkan termasuk akad serta operasionalisasi produk-produk tersebut.

Lebih lanjut diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara konsisten dapat terjaga dengan baik.

Mudah-mudahan semua hal yang kita lakukan untuk memajukan Bank Victoria Syariah mendapat pertolongan Allah serta curahan keberkahan-Nya. Semoga kita juga selalu berada dalam taufik dan hidayah serta inayah-Nya untuk dapat mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak dan kepada-Nyalah kita selalu berserah diri.

Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 31 Januari 2023
Atas nama Dewan Pengawas Syariah
PT Bank Victoria Syariah

H. Misbahul Ulum, M.Si.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

PROFILE DEWAN PENGAWAS SYARIAH

H. Misbahul Ulum, M.Si.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

WNI, lahir di Pasuruan, 15 Februari 1976

- S1 (S.Ag), STAI Az Ziyadah, tahun 2001
- S2 (M.Si), Universitas Indonesia, tahun 2004

- **Tanggal 22 Agustus 2022**
  bergabung di PT Bank Victoria Syariah sebagai Profesional Staff
- **Tanggal 30 November 2022**
  Disetujui Oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, MA, CHC
Anggota Dewan Pengawas Syariah

WNI, lahir di Jakarta, 23 Desember 1987

- S1 (S.S.I), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2005
- S2 (M.A), Institute Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tahun 2009
- S3 (Dr.), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012

- **Tanggal 22 Agustus 2022**
  bergabung di PT Bank Victoria Syariah sebagai Profesional Staff
- **Tanggal 30 November 2022**
  Disetujui Oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah

PT Bank Victoria Syariah
Laporan Tahunan 2022

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

TUMBUR PARULIAN LIMBONG
Chief Finance Officer

Lahir di Jakarta 19 Juli 1974
Sarjana Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta tahun 1996

1997-2018 : PT Bank Victoria International, Tbk dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Akunting & Pengawasan Keuangan

2018-Saat ini: PT Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Chief Finance Officer

AGUNG PRASETIAWAN
Kepala Divisi Review Pembiayaan, Hukum dan Admin Support

Lahir di Banjarnegara 15 Juli 1980
Sarjana Teknik, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta
Sarjana MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta

2006-2008 : PT Duta Citra Design Consultant sebagai Staff Ahli Teknik Lingkungan

2008-2009 : PT Bank Danamon sebagai Sales Officer

2009-2010 : PT Bank Mega Syariah sebagai Unit Manager KCP Pasar Kemis Tangerang

2010-2011 : PT BRI Syariah sebagai Kepala Unit Kedoya.

2011-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Review Pembiayaan, Hukum & Admin Support

ENDRO PURWOKO
Kepala Divisi Teknologi Informasi

Lahir di Jakarta 23 Juni 1969
Sarjana Management Informatika, STMIK Gunadarma Depok, Tahun 1994

1995-1999 : PT. Bank Dagang dan Industri, Tbk sebagai IT and Operation Staff

2000-2011 : PT. Bank ICB Bumiputera Tbk dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai IT Group-ATM & Electronic Channel Develop

2011-2017 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian Teknologi Sistem Informasi

2017- Saat ini : PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

SUYAT
Wakil Kepala Divisi Operasional

Lahir di Yogyakarta 21 Juni 1978
Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta

2002-2008 : PT. Bank Kesawan (QNB) dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Operasional KC Tanah Abang

2008-2011 : PT. Bank Mega Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Regional Internal Control Manager

2011-Saat ini : PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Divisi Operasional

IRVAN DERMAWAN
Kepala SKAI

Lahir di Jakarta 10 Maret 1982
Sarjana Ekonomi STIE Swadaya Jakarta tahun 2010

2010-2011 : Kantor Akuntan Publik Adriansyah & Gurarso sebagai Auditor

2011-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

LUSY RAHMAWATI
Kepala Divisi SDI dan Umum

Lahir di Jakarta 2 Juli 1989
Sarjana Ekonomi Universitas Pancasila tahun 2011

2011-2012 : PT Bank Victoria International, Tbk. sebagai Staff Human Capital Management

2012-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi SDI dan Umum

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

ASRI RATNA PUTRI
Kepala Divisi Kepatuhan

Lahir di Jakarta 29 Februari 1984
Sarjana Ekonomi Universitas Trisaksi tahun 2006
Master of Business Administration (MBA) Universitas Gajah Mada 2010

2007-2010 : PT Asuransi Allianz Indonesia sebagai Staff Marketing Communication
2010-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Kepatuhan

HAVIFI MIFTAH
Kepala Bagian Pengendalian Internal

Lahir di Jakarta 22 September 1972
Ahli Madya STIE Perbanas tahun 1996

1996-2002 : PT Bank Bali, Tbk. Sebagai Branch Banking Operation Staff
2002-2003 : PT Bank Permata Sebagai Branch Banking Operation Staff
2003-2009 : PT Bank Akita Sebagai Kepala Operasional
2011-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Pengendalian Internal

EMY MEI INDAHATI
Kepala Bagian Treasury

Lahir di Tulungagung 16 Mei 1972
Sarjana Ekonomi Universitas Widya Mandala Surabaya tahun 1996

1993-1994 : PT Serdam Mitsubishi Surabaya sebagai Staf Akunting
1995-2001 : PT Bank Ekonomi Raharja Jakarta dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Asisten Manager International Dept.
2004-2007 : PT Bank Victoria International Jakarta sebagai Kepala Seksi Treasury
2007-2015 : PT Bank Swaguna Jakarta (sekarang berubah nama menjadi Bank Victoria Syariah) sebagai Kepala Divisi Treasury
2017-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah Jakarta sebagai Kepala Bagian Treasury

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EVI WAHYUNI
Kepala Bagian Analis Risiko

Lahir di Jakarta 31 Mei 1975
D1 Pajak - tahun 1996 – Institute Pendidikan Bisnis dan Perpajakan Jakarta

1995-1996 : PT Bank SINO sebagai Staf Akuntansi
1996-2000 : PT Bank Shinta Indonesia dengan berbagai jabatan dan Jabatan terakhir sebagai Senior Officer Bussiness Development
2000-2007 : PT Bank Victoria Int'l Tbk sebagai Kepala Bagian Umum
2008-2010 : PT Bank Swaguna sebagai Kepala Bagian Umum
2010-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Analis Risiko.

SRI MULYATI
Kepala Kantor Cabang Utama

Lahir di Sukabumi 3 Januari 1977
Sarjana Hukum Universitas Bung Karno tahun 2014

2000-2004 : PT Dagang Bali sebagai Funding Officer
2004-2008 : PT Harda International sebagai Account Officer
2008-2013 : PT Bank Victoria International sebagai Kepala Area Jakarta Pusat
2013-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Cabang Utama

DYANG FALILA PRAMESTI
Kepala Bagian Pembiayaan

Lahir di Mataram 26 Februari 1994
Sarjana Teknik Informatika Universitas Brawijaya Malang tahun 2017

2018 – 2019 : PT Bank Victoria Syariah sebagai Customer Service
2019 – 2019 : PT Bank Victoria Syariah sebagai Teller
2019 – 2021 : PT Bank Victoria Syariah sebagai AO
2021 – 2022 : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kasie Pembiayaan
2022 – Saat ini : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kabag Pembiayaan

PROFIL KOMITE - KOMITE

MEDI SEJATI

Anggota Komite Audit

WNI, Lahir di Jakarta 29 September 1965
D3 Manajemen Perbankan, AKPI tahun 1989

- 1984-1986 : PT Jasa Marga sebagai Kolektor/ Pengumpul Tol
- 1990-1991 : PT Bank Swadesi sebagai Teller
- 1991-1999 : PT Bank Intan sebagai Kepala Seksi Kredit Support
- 1999-2002 : Kantor Akuntan Publik Edi Kaslim dan Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi (GPJ) sebagai Auditor
- 2002-2007 : PT Bank Harmoni sebagai Kepala Bagian Akunting
- 2007-2008 : PT Bank Index Selindo sebagai Kepala Bagian Akunting
- 2008-2010 : PT Bank Swaguna sebagai Kepala Divisi Akunting
- 2010-2019 : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
- 2010-2020 : PT Bank Victoria Syariah. Dengan berbagai jabatan dan Jabatan terakhir adalah sebagai Kepala Divisi Kepatuhan
- 2021-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah sebagai komite Audit

MARDINUS RASYID

Anggota Komite Pemantau Risiko

WNI, Lahir di Bukittinggi 3 Maret 1961
SMEA Bukittinggi tahun 1980

- 1982-1995 : PT Bank Nasional dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Operasional, Kepala Bagian Supervisi Cabang dan Kepala Bagian Resident Audit
- 1995-1997 : PT Bank Mashill Utama, Tbk. dengan berbagai jabatan yaitu Domestic Head Office Operation Manager dan Credit Support Manager.
- 1999-2004 : Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan tugas Tim Pemberesan Sementara PT Bank Mashill Utama dan Loan Work Out, Asset Disposal Division.
- 2007-2010 : PT Bank Swaguna dengan berbagai jabatan Staff Remedial, Team Counterpart konversi sistem konvensional ke dalam sistem syariah, Kepala Bagian Akuntansi dan Tim Penyusunan Rencana Bisnis Bank.
- 2010-2016 : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Strategi Keuangan
- 2018-2020 : BMT Amanah Syariah sebagai Manager Operasional dan Keuangan
- 2021-Saat ini : PT Bank Victoria Syariah sebagai Komite Pemantau Risiko

04

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

- Tinjauan Industri
- Tinjauan Bisnis
- Tresuri
- Sumber Daya Insani
- Teknologi Informasi
- Tinjauan Keuangan

TINJAUAN INDUSTRI

Tinjauan Perekonomian Global

Tahun 2022, perekonomian dunia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan di semua sektor imbas dari penyebaran Covid-19. Pemulihan perekonomian global mulai dilakukan di masing-masing negara dengan mendorong dan memperkuat infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. *Focus* utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi global dengan mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Kinerja perekonomian global terindikasi mengalami pemulihan secara gradual seiring dengan kebijakan relaksasi pembatasan aktivitas. Namun, pemulihan tersebut masih rentan terhadap kemungkinan adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang dapat memperburuk situasi ekonomi global Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengatasi potensi ancaman tersebut.

Konflik Rusia-Ukraina juga memberikan dampak signifikan bagi perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Komoditas utama ekspor ke kedua negara, merupakan komoditas utama Indonesia, yakni CPO dan turunannya, sebagian besar impor tepung gandum berasal dari Ukraina. Salah satu dampak yang berat adalah kenaikan harga energi secara global. Kenaikan ini menekan kondisi fiskal karena meningkatnya subsidi untuk penggunaan BBM dan LPG. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif agar tingkat inflasi terkendali di tengah harharga beberapa komoditas global yang meningkat.

Bank Dunia mengumumkan risiko resesi global yang diperkirakan tahun 2023, mencatat resesi 2023 dipicu keadaan saat bank-bank sentral seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuan sebagai respons terhadap inflasi.

Forum G20 yang dilaksanakan di Indonesia untuk menemukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global saat ini, yang diharapkan mampu untuk merangkul negara-negara maju maupun berkembang untuk mengatasi krisis. Termasuk Pembahasan mengenai pemulihan ekonomi global pasca terjadinya pandemic Covid-19.

Perekonomian Nasional

Kondisi ekonomi nasional yang kuat secara fundamental, memacu aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami pasang surut. Berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 5,31% secara *year on year* (yoy), lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan 3,70%, angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,20%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 19,87%.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat juga tecermin secara Lapangan Usaha (LU) dan spasial. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tercatat tetap kuat di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS), pada Desember 2022, Inflasi IHK tercatat menjadi 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK

TINJAUAN INDUSTRI

2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3.01%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022.

Industri Perbankan Nasional

Pandemi covid-19 berpengaruh signifikan terhadap kondisi Perbankan nasional dan sektor usaha lainnya, khususnya sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, juga pada sektor pertambangan dan UMKM, dimana sebelumnya dapat bertahan terhadap krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Kondisi sektor perbankan pada 2022 secara umum masih relatif terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid pada triwulan II tahun 2022 dengan CAR tercatat sebesar 24,66%. Fungsi intermediasi perbankan di triwulan II tahun 2022 cenderung naik seiring dengan meningkatnya permintaan kredit/pembiayaan di tengah menurunnya pandemi Covid-19, yang terindikasi dari kredit yang tumbuh 7,08% dibanding triwulan IV tahun 2021, sedangkan DPK tumbuh 1,64% dibanding triwulan IV tahun 2021. Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan yang lebih tinggi dibanding dibandingkan DPK menyebabkan rasio LDR naik ke level 81,25% dari 77,13% di triwulan IV tahun 2021. Di tengah permintaan kredit yang terus meningkat dan gangguan aktivitas ekonomi selama masa pandemi Covid-19, perlu diperhatikan potensi peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas ke depan. (Sumber: SPI Triwulan II tahun 2022).

Pemerintah melalui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan berbagai kebijakan dan stimulus yang mendukung dunia usaha termasuk industri keuangan. Diantaranya OJK mengeluarkan peraturan relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan untuk debitur terkena dampak pandemi Covid-19, dan BI mengeluarkan kebijakan Suku Bunga Acuan, melonggarkan ketentuan Giro Wajib Minum (GWM) bank, melakukan operasi pasar, dan diperkenankan untuk membeli surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Dengan adanya kebijakan, stimulus, dan relaksasi diatas serta titik terang ditemukannya Vaksin Covid-19 maka Pemerintah berkeyakinan dan optimis perekono-mian Indonesia akan mulai membaik di tahun 2023. Demikian halnya Bank harus tetap *survive* dalam pemulihan kondisi pandemi Covid-19 dan menghadapi tantangan di tahun 2023 maka Bank dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang tepat sehingga diharapkan Bank dapat tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Industri Perbankan Syariah

Perbankan syariah di tantang untuk mampu berinovasi dengan setidaknya 7 (tujuh) tantangan utama yang harus diantisipasi yaitu Bank-bank syariah harus memiliki produk-pruduk yang inovatif agar mampu berkembang dengan baik dan berkelanjutan, sekuritisasi aset Bank Syariah, menjaga kualitas aset, memperkuat permodalan, persaingan dalam mengumpulkan dana nasabah, terlebih dana murah (CASA), penguatan Sumber Daya Insani (SDI), peningkatan teknologi sistem keuangan syariah. Bagi Bank Victoria Syariah sendiri, tantangan-tantangan tersebut di atas merupakan suatu hal yang harus disikapi secara cermat, cerdas dan optimis.

Kondisi pasca Pandemi Covid-19 yang sudah berangsur membaik memberikan dampak terhadap pertumbuhan perbankan syariah Indonesia, hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan industri perbankan syariah yang mengalami kenaikan jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pertumbuhan aset BUS mencapai 20,39% (yoy) atau lebih baik jika dibanding pertumbuhan aset perbankan konvensional yang berada di angka 9,90%. Untuk pembiayaan yang diberikan (PYD) juga relatif baik yakni tumbuh 25,91%, jika dibanding perbankan konvensional yang sebesar 11,63%. Sedangkan untuk DPK tumbuh 17,41% atau berada di atas perbankan konvensional yang tumbuh 9,01%.

TINJAUAN INDUSTRI

Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan yang ditunjukkan Bank Umum Syariah (BUS) mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah yang semakin baik. Kinerja keuangan BUS terhitung masih cukup solid selama pandemi, dapat dilihat dari CAR *(Capital Adequacy Ratio)* berada di angka 26,28%, NPF *(Non Performing Financing)* gross 2,35% dan Net 0,64%, FDR berada di angka 75,19%, BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) 77,28%, dan ROA *(Return on Asset)* di angka 2,00%.

Rencana Strategis ke Depan

Bank Victoria Syariah telah melakukan pembenahan melalui perbaikan proses tata kelola yang baik (GCG) pada semua fungsi bisnis, operasional, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah dengan menghadirkan inovasi-inovasi digital yang memudahkan transaksi perbankan Hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada nasabah serta menjaga keberlangsungan bisnis bank secara berkelanjutan. Dan *Alhamdulilah* puji syukur saat ini kondisi Bank Victoria Syariah secara berangsur mulai membaik dan menunjukkan kinerja yang positif. berkat kerja keras dan tekad dari seluruh sumber daya yang ada.

Proses perbaikan akan terus dilanjutkan pada tahun mendatang agar pertumbuhan Bank Victoria Syariah lebih baik dan berkelanjutan. Rencana Bisnis Bank Victoria Syariah untuk tahun 2023-2025 merupakan Proses perbaikan akan terus dilanjutkan pada tahun mendatang agar pertumbuhan Bank Victoria Syariah lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, bank juga akan memperbanyak jaringan kantor cabang di beberapa daerah strategis untuk meningkatkan penetrasi pasar. Rencana Bisnis Bank Victoria Syariah untuk tahun 2023–2025 merupakan periode penting di dalam mendorong pertumbuhan yang lebih sehat dan kuat, baik secara volume bisnis, pendapatan *(revenue)*, kualitas layanan, atau aspek penting lainnya.

Didasari atas besarnya tantangan ke depan, maka kebijakan Bank adalah menitikberatkan pada beberapa aspek, antara lain penguatan modal inti bank dengan cara merencanakan penambahan modal melalui pengambilalihan dan restrukturisasi organisasi group Victoria Yang diimbangi dengan peningkatan volume dan kualitas asset produktif secara selektif dan prudent agar menghasilkan nilai tambah yang maksimal bagi perusahaan.

Kebijakan manajemen dan strategi bank dalam rencana Bisnis Bank kedepan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang akan didasarkan pada road map yang meliputi antara lain percepatan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitasnya, Selain itu, bank juga akan fokus pada pengembangan produk dan layanan yang inovatif serta memperkuat sinergi antar unit bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar. "percepatan dan perbaikan proses bisnis, penyempurnaan organisasi, strategi pengembangan jaringan, diversifikasi produk serta program-program efisiensi dan produktivitas.

Sejalan dengan arah kebijakan Bank di atas, Bank telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam yang sekurangnya menyangkut beberapa aspek besar sebagai berikut:

1. Pemenuhan syarat kecukupan Permodalan (POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum).
2. Melakukan Sinergi Perbankan sesuai dengan POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dimana Bank Victoria Syariah termasuk dalam struktur kelompok usaha bank dari organisasi keuangan group Victoria. Sinergi Perbankan adalah kerjasama antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum.

TINJAUAN INDUSTRI

3. Meningkatkan aset produktif melalui optimalisasi pengelolaan Surat Berharga dan Penguatan struktur pembiayaan melalui percepatan ekspansi pembiayaan yang sehat/*prudent* dengan prioritas sektor UMKM, disertai program penyelesaian NPF, AYDA, WO dan *review* portofolio.
4. Memperkuat struktur pendanaan melalui pening-katan volume CASA (intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan Tabungan/dana ritel, peningkatan volume transaksi nasabah pembiayaan), serta perluasan sebaran *customer base* deposito, agar sekaligus dapat menekan ketergantungan kepada nasabah inti.
5. Penguatan bisnis proses agar dapat secara efektif mendukung percepatan peningkatan aset produktif dan lebih kompetitif dengan bank lain.
6. Terus berinovasi mengembangkan model bisnis, produk dan layanan yang sesuai kebutuhan nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip syariah.
7. Penguatan infrastruktur IT yang kekinian, secara bertahap melalui skema Kolaborasi dan Kerjasama yang saling menguntungkan.
8. Membangun *self awareness* dan *self confidence* pada semua Sumberdaya Insani Bank Victoria Syariah, disertai peningkatan profesionalisme, kompetensi teknis dan integritasnya, dan penerapan KPI sebagai driver, sekaligus mendukung penguatan *Good Corporate Governance* dan implementasi Budaya "HEBAT".

TINJAUAN BISNIS

Selama masa pandemi Covid-19 sejak akhir bulan Februari 2020, hampir seluruh sektor ekonomi terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun di tahun 2021, perekonomian Indonesia perlahan mulai mengalami pemulihan dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2022. Hal ini terlihat dari beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, peningkatan investasi, dan kenaikan ekspor. Namun, pemulihan ekonomi masih perlu dukungan kebijakan yang tepat agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh sektor.

Perkembangan perbankan Di tahun 2022 secara nasional terlihat tetap terjaga dimana pada triwulan II tahun 2022 CAR tercatat sebesar 24,66% yang menunjukkan kemampuan bank yang cukup memadai dalam menyerap risiko. Selain itu fungsi intermediasi yang cenderung naik dengan meningkatnya permintaan pembiayaan sebesar 7,08% dan juga pertumbuhan DPK sebesar 1,64% seiring menurunnya pandemi Covid-19. Tingginya pertumbuhan pembiayaan dibandingkan dengan pertumbuhan DPK menyebabkan rasio FDR naik menjadi 81,25% dari 77,13% di triwulan IV tahun 2021.

Sedangkan dari sisi perkembangan perbankan syariah dimana terjadi pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,93% di triwulan ke II tahun 2022. Sementara untuk DPK tercatat tumbuh sebesar 4,22% di triwulan ke II tahun 2022. Untuk CAR perbankan syariah mengalami perbaikan yaitu sebesar 23,27% di triwulan II tahun 2022 dari sebelumnya yaitu sebesar 25,71% di triwulan ke IV tahun 2021.

Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) masih terus berupaya menjaga kinerja perekonomian Indonesia yang mulai berangsur membaik, dengan menjalankan berbagai kebijakan dan stimulus yang mendukung dunia usaha termasuk industri keuangan agar terus bergerak guna menjaga kinerja perekonomian Indonesia untuk dapat berangsur membaik dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berkelanjutan.

Diantaranya OJK masih memberlakukan peraturan relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan untuk debitur terkena dampak pandemi Covid- 19 sedangkan BI melonggarkan ketentuan *Financing to Value* (FTV) sebesar 100% untuk pembiayaan properti serta ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) bank, melakukan operasi pasar, dan diperkenankan untuk membeli surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Selama tahun 2022 Bank Victoria Syariah terus berusaha mengembangkan bisnisnya terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor Komersial dan UKM namun tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, sektor industri yang baik serta memperhitungkan tingkat risiko sesuai *risk appetite* Bank. Selain itu Bank berupaya untuk mengelola portofolio pembiayaan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan mengantisipasi menurunnya kualitas portofolio pembiayaan.

Dalam mewujudkan pertumbuhan bisnis, Bank Victoria Syariah juga senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas SDI, Hal ini dilakukan agar Bank Victoria Syariah mampu memberikan layanan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan cepat dan tepat. Peningkatan kompetensi SDI juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di dalam perusahaan. mempercepat proses pelayanan, dan secara konsistense dalam meningkatkan *account management* dan *risk management* bidang pembiayaan.

Pembiayaan Komersial

Jenis Pembiayaan Komersial

Bank Victoria Syariah tetap fokus pada penyaluran pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi untuk bisnis umum maupun untuk segmentasi khusus. Segmentasi dilakukan terhadap nominal plafond yang diusulkan minimal sebesar Rp 5 Milyar dan maksimal sesuai Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD).

TINJAUAN BISNIS

Strategi Pengembangan Pembiayaan Komersial

Guna merespon tantangan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang masih belum kondusif karena adanya pandemi Covid-19, Bank Victoria Syariah melakukan beberapa strategi pembiayaan komersial sebagai berikut:

- **Melakukan ekspansi pembiayaan lebih selektif kepada sektor ekonomi yang masih memiliki prospek bagus. Selektif diutamakan untuk debitur existing yang mempunyai track record bonafide dan masih mempunyai ruang untuk penambahan fasilitas.**
- **Menerapkan pola pembiayaan dengan model value chain terhadap debitur komersial guna mendapat prospek bisnis yang dapat dikembangkan.**
- **Mengoptimalkan peran Divisi Pembiayaan Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama dan Layanan Syariah Bank (LSB) untuk melakukan penetrasi pasar komersial pada sektor unggulan, sesuai dengan potensi wilayah sekitar dan segmen debitur.**
- **Memperkuat kerjasama dengan perusahaan induk Bank Victoria Syariah yaitu PT. Bank Victoria International Tbk di bidang pembiayaan terutama untuk pembiayaan komersial.**
- **Melakukan *cross selling* ke nasabah pendanaan yang memiliki usaha dan membutuhkan pembiayaan dalam rangka ekspansi usahanya.**

Langkah Strategis ke Depan

1. Memperbaiki proses pembiayaan yaitu melakukan proses pembiayaan yang cepat, tepat dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian.
2. Me-review ulang segmentasi, target market dan positioning pembiayaan komersial.
3. Konsolidasi, yaitu melakukan monitoring existing account dan penataan terhadap Kantor Cabang Utama dan Layanan Syariah Bank (LSB) yang telah ada dan melakukan inisiasi account komersial dengan tujuan untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan.
4. Mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan dari strategi sebelumnya yang mendukung kebijakan Bank Victoria Syariah seperti melakukan cross selling dalam me-reprofile pembiayaan.

Pembiayaan Multifinance

Di tahun 2021 merupakan tahun evaluasi bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan multifinance karena pada tahun tersebut terdapat beberapa perusahaan multifinance yang kegiatan usahanya dibekukan bahkan dicabut ijin usahanya. Hal ini menunjukkan pentingnya perbankan dalam melakukan analisis risiko sebelum menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan multifinance.

Bank perlu memastikan bahwa perusahaan multifinance yang akan diberikan pembiayaan memiliki kinerja dan *track record* keuangan yang baik dan mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk itu di tahun 2022, Bank Victoria Syariah terus mengevaluasi dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan yang baru maupun pembiayaan tambahan kepada perusahaan multifinance.

TINJAUAN BISNIS

Pada tahun 2022, porsi pembiayaan multifinance dari keseluruhan portofolio pembiayaan Bank Victoria Syariah adalah sebesar Rp. 74,6 Milyar, naik sebesar Rp. 29,9 Milyar atau 67% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp. 44,7 Milyar, hal tersebut dikarenakan adanya penyaluran baru kepada perusahaan multifinance.

Langkah Strategis ke Depan

Ditengah perekonomian yang sudah mulai berangsur pulih Bank Victoria Syariah tetap akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan mutifinance dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, analisis dan review terhadap perusahaan multifinance existing maupun perusahaan multifinance yang akan menjadi target market akan lebih diperdalam.

Pembiayaan Usaha Kecil

Bank Victoria Syariah telah berkomitmen untuk pemenuhan penyaluran pembiayaan UMKM selama tahun 2022, sesuai dengan ketentuan regulator (RPIM). mengacu pada kondisi perekonomian saat ini, Bank Victoria Syariah akan lebih selektif dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan lebih bijaksana dalam menyalurkan pembiayaan pada segmen ini dikarenakan Bank pernah mengalami kendala terkait dengan kualitas pembiayaan UMKM.

Pembiayaan Ritel / Konsumer

Sejalan dengan strategi Bank Victoria Syariah dalam melakukan reprofiling pembiayaan ke segmen bisnis retail, Divisi Pembiayaan bertanggungjawab dalam melakukan set up produk, bisnis model, bisnis proses, dan sales force untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan. Selain itu, Divisi Pembiayaan juga bertanggung jawab melakukan supervisi Kantor Cabang Utama dan Layanan Syariah Bank (LSB) Bank Victoria Syariah dalam melakukan proses penjualan produk-produk pembiayaan ritel/konsumer.

Jenis Pembiayaan Konsumer yang dimiliki Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR Vis iB) KPR ViS iB merupakan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) untuk perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah membiayai pembelian rumah yang diperlukan oleh debitur sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati.
2. Pembiayaan Pemilikan Mobil (PPM Vis iB)Realisasikan impian anda memiliki mobil idaman melalui PPM ViS iB, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Mobil.
3. Pembiayaan Multiguna (PMG Vis iB) Realisasikan impian anda memiliki barang multiguna atau melaksanakan umroh sesuai impian melalui PMG Vis iB, Pembiayaan Multi Guna.

TINJAUAN BISNIS

Target Market Pembiayaan Ritel/ Konsumer

Target market Pembiayaan Konsumer adalah debitur perorangan yang berprofesi sebagai karyawan, pengusaha, dan profesional. Pembiayaan untuk kepemilikan rumah difokuskan untuk membiayai debitur di segmen perumahan menengah dengan harga sampai dengan Rp 5 Milyar. Namun untuk *case* tertentu, dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dan harga rumah yang dibeli.

Sedangkan pembiayaan pemilikan mobil difokuskan untuk membiayai karyawan perusahaan/institusi secara kolektif. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi karyawan untuk memiliki mobil dengan harga yang lebih terjangkau dan cicilan yang ringan. Sementara itu, pembiayaan umroh difokuskan untuk membiayai debitur yang berniat pergi umroh dalam suatu komunitas tertentu dan dilakukan secara kolektif.

Strategi Bisnis Pembiayaan Ritel/ Konsumer ke Depan

Strategi bisnis dilakukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis Pembiayaan Ritel/konsumer adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan produk PPR yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan selaras dengan produk yang dikembangkan oleh *property developer*.
2. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan developer, *agent property*, *travel agent* dan dealer.
3. Mengembangkan program khusus *company collective* untuk pembiayaan kepada karyawan perusahaan / institusi.
4. Menyempurnakan *Business Process* dengan mengembangkan sistem untuk meningkatkan *service level approval* kepada debitur.
5. Mengembangkan kemitraan atau aliansi dengan para rekanan strategis untuk penyaluran pembiayaan ritel/konsumer kepada masyarakat yang wilayahnya tidak terjangkau oleh cabang.

TINJAUAN BISNIS

Pendanaan / Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah terus berupaya mengedepankan pertumbuhan yang berimbang antara Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga pada rasio yang menguntungkan bagi Bank. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan serta mengoptimalkan teknologi yang digunakan agar dapat memberikan kepuasan kepada nasabah dan memperluas jangkauan pasar. Disamping itu, Bank secara berkesinambungan berusaha menekan Dana Pihak Ketiga berbagi hasil tinggi seperti Deposito dengan *focus* kepada CASA untuk mengoptimalkan net imbalan.

Pencapaian di Tahun 2022

Melanjutkan target seperti di tahun-tahun sebelumnya, dimana salah satu target pencapaian Dana Pihak Ketiga adalah menambahkan *current account savings account* (CASA). Untuk mencapai target tersebut, bank akan meningkatkan program promosi dan memberikan insentif kepada nasabah yang membuka rekening CASA. Selain itu, bank juga akan memperluas jaringan kantor cabang untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga saat ini menyebabkan pendapatan banyak orang menurun, bahkan kehilangan pekerjaan yang berdampak langsung pada kurangnya kemampuan untuk menabung.

Dalam upaya meningkatkan target CASA, Bank Victoria Syariah telah menambah dan bekerjasama dengan satu lembaga *switching* lagi (ALTO) dengan jaringan yang luas di Indonesia, sehingga diharapkan dapat membantu Bank Victoria Syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah potensial. untuk memperluas jaringan *switching* dalam rangka meningkatkan layanan transaksi kartu ATM Bank Victoria Syariah. Sebelumnya, hanya ada satu lembaga *switching* Yaitu Prima.

TINJAUAN BISNIS

Penambahan jaringan tidak hanya berupa jaringan *switching*, melainkan juga jaringan kantor dimana Bank Victoria Syariah telah bersinergi dengan perusahaan induk yaitu PT. Bank Victoria International Tbk dengan membuka layanan perbankan syariah di PT. Bank Victoria International Tbk Kantor Cabang utama Fatmawati, Jakarta. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Victoria Syariah dalam memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan perbankan syariah. Selain itu, inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan untuk menambah DPK adalah:

1. **Produk dan layanan**
   a. Melakukan review *product lifecycle* dan review produktivitas produk dana *(closed or expand)*
   b. Melakukan pendalaman terhadap nasabah yang ada *(customer deepening)* melalui pola marketing dan komunikasi yang efektif.
   c. Melakukan Referral terhadap nasabah-nasabah Pembiayaan
2. **Peningkatan Sales dan Service**
   a. Pemenuhan tenaga sales secara memadai di seluruh jaringan kantor guna menutup gap antara kebutuhan dan ketersediaan.
   b. Mendorong peningkatan produktivitas seluruh tenaga marketing dan sales. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penetapan fokus tugas antara marketing dan *sales funding* dan *financing*.
   c. sistem evaluasi kinerja akan diberikan secara lebih ketat dengan mengembangkan *Sales Tracking System* dengan dibarengi oleh sistem *reward* dan *punishment* yang berbasis pada kinerja.
   d. Pengembangan *skill* dengan training secara reguler terhadap seluruh tenaga sales yang ada.

Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah fokus untuk meningkatkan jumlah dana retail dibawah Rp 2 Miliar dan meningkatkan dana CASA secara proaktif dengan penekanan pada pendanaan dari institusi berlabel islami dan perorangan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengaktifkan kegiatan *marketing communication* bersama pelaku jasa keuangan lainnya seperti gerakan ekonomi syariah dan iB Vaganza.
2. Melakukan kegiatan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dll untuk menginformasikan produk-produk dan kegiatan Bank Victoria Syariah sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas
3. Meningkatkan pertumbuhan dana retail melalui kegiatan *open table*, pameran, atau kunjungan langsung ke nasabah yang berada di pusat-pusat perdagangan, perbelanjaan, sekolah-sekolah atau perkantoran.
4. Meningkatkan kerjasama atau aliansi strategis dalam penjualan produk-produk pendanaan dengan cara melakukan pemetaan terhadap komunitas, perusahaan-perusahaan, lembaga pendidikan, atau instansi Pemerintah dan Yayasan yang berpotensi, serta secara aktif melakukan pendekatan agar komunitas, perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi Pemerintah dan Yayasan mau menggunakan produk Bank Victoria Syariah.
5. Mengembangkan layanan digital seiring dengan era digitalisasi yang semakin berkembang sebagai upaya *Brand Loyalty* terhadap nasabah dengan harapan dapat menambah dana retail.
6. Memfokuskan pada pendanaan dari Lembaga Institusi Islam dengan cara:
   a. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Zakat, Lembaga Sosial Islami, dan Mesjid berskala menengah
   b. Melakukan *Strategic Partnership* dengan Ormas dan Lembaga Islam

TINJAUAN BISNIS

Strategi Pencapaian Target Penghimpunan CASA

Strategi penghimpunan CASA disesuaikan dengan tipe nasabah dan juga keterkaitannya nasabah tersebut dengan Bank Victoria Syariah. Adapun strategi dan program yang dijalankan oleh Bank Victoria Syariah untuk meningkatkan CASA adalah:

1. Untuk nasabah *existing*, Bank akan memberikan Loyalty Program berupa pemberian gimmick yang menarik.
2. Program Akuisisi nasabah baru untuk menambah CIF retail di Kantor Cabang Bank akan terus berjalan sehingga dapat memperluas basis customer-nya. Program dan strategi untuk peningkatan jumlah customer yang dilakukan adalah:
   a. Bank juga akan meningkatkan akuisisi nasabah CASA baru dari *value chain* debitur-debitur pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari *Integrated Account Management*, dimana *Relationship Manager Funding* dapat mensolisitasi *potential customer* yang direferensikan oleh debitur pembiayaan, terutama yang ada keterkaitan hubungan bisnis dengan debitur pembiayaan
   b. Bank terus meningkatkan penetrasi terhadap pasar-pasar emosional, yang berbasis organisasi keagamaan dan sosial, terutama pendidikan. Untuk itu, Bank akan membentuk satu lini bisnis, yang khusus menangani nasabah-nasabah yang berafiliasi dengan organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persis, Pondok Pesantren, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dll.
3. Referral dari Nasabah-Nasabah pembiayaan maupun Pendanaan.

Selain itu, inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan untuk menambah DPK adalah:

1. **Produk dan Layanan**
   a. Melakukan *review product lifecycle* dan *review* produktifitas produk dana *(closed or expand)*.
   b. Melakukan pendalaman terhadap nasabah yang ada *(customer deepening)* melalui pola marketing dan komunikasi yang efektif.
2. **Peningkatan Sales dan Service**
   a. Pemenuhan tenaga sales secara memadai di seluruh jaringan kantor guna menutup gap antara kebutuhan atas tenaga sales dan ketersediaan.
   b. Mendorong peningkatan produktivitas seluruh tenaga marketing dan sales. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penetapan fokus tugas antara marketing dan *sales funding* dan *financing*.
   c. Sistem evaluasi kinerja akan diberikan secara lebih ketat dengan mengembangkan Sales Tracking System dengan dibarengi oleh sistem reward dan punishment yang berbasis pada kinerja.
   d. Pengembangan skill dengan melakukan training secara reguler terhadap seluruh tenaga sales yang ada.

TRESURI

Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup menantang bagi dunia perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu dan berdampak pada sektor perbankan, serta adanya persaingan yang semakin ketat antar bank-bank di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum terkait ketentuan pemenuhan modal minimum bagi bank yang harus dipenuhi di akhir tahun 2022 membuat bank-bank yang belum memenuhi syarat harus segera mendapatkan dana setoran modal, tidak terkecuali bagi Bank Victoria Syariah.

Dengan pemenuhan modal minimum sebesar Rp.1 triliun, untuk Kelompok Usaha Bank, berhasil dipenuhi oleh Bank Victoria Syariah dengan adanya penambahan modal sebesar kurang lebih Rp.700 miliar dari PT. Victoria Investama sebagai pemegang saham mayoritas

TRESURI

Bank Victoria Syariah dapat memperkuat posisinya di industri perbankan dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada nasabah. Selain itu, pergantian kepemilikan saham PT. Victoria Investama sebagai pemegang saham mayoritas juga dapat membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis Bank.

Masuknya dana setoran modal di akhir tahun 2022 membuat kondisi likuiditas bank menjadi berlebih sehingga untuk sementara waktu harus di kelola oleh bagian Tresuri dengan melakukan penempatan-penempatan yang bersifat jangka pendek. Namun, kelebihan likuiditas ini juga dapat memberikan peluang bagi bank untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, bank perlu mempertimbangkan strategi yang tepat dalam mengelola kelebihan likuiditas tersebut.

Dibandingkan dengan tahun 2021, posisi penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat sebesar 108% menjadi Rp.385milyar dari tahun sebelumnya yaitu Rp.185milyar. Sementara untuk portofolio surat berharga juga mengalami peningkatan sebesar 67% menjadi Rp.898milyar dari tahun sebelumnya yaitu Rp.538milyar. Disini fungsi Tresuri mengambil peran yang cukup penting sebagai pengganti sementara fungsi pembiayaan yang belum berjalan. Peningkatan portofolio Tresuri dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal.

Dari sisi ketentuan terkait Giro Wajib Minimum (GWM) juga terjadi perubahan dimana untuk posisi Desember 2022 GWM yang wajib dijaga adalah sebesar 7.5% untuk perbankan syariah. Perubahan ketentuan GWM ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perbankan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Dengan adanya ketentuan tersebut, posisi giro pada Bank Indonesia posisi 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 179%.

Dengan kondisi tersebut diatas maka Bank Victoria Syariah pada tahun 2022 berhasil mencapai pertumbuhan asset sebesar +/-27% dan pemenuhan modal minimum sesuai dengan ketentuan regulator menjadi yaitu Rp.1.063miliar.

Dengan masuknya modal disetor dari pemegang saham baru diharapkan Bank Victoria Syariah akan semakin memperkuat bisnis dan posisinya di antara bank-bank syariah lainnya, juga semakin mendapat kepercayaan dari seluruh nasabah dan *counterparty* khususnya dibidang Tresuri yaitu terkait kerjasama *Money Market Line* (MML) atau Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Saat ini, Tresuri telah melakukan kerjasama dengan MML dengan beberapa bank syariah maupun bank konvensional dalam transaksi pasar uang syariah (SIMA/SIPA). Kerjasama ini memungkinkan Tresuri untuk memperluas jangkauan bisnisnya di pasar uang syariah dan meningkatkan layanan keuangan yang ditawarkan kepada pelanggan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Diharapkan ditahun-tahun mendatang akan semakin banyak kerjasama yang bisa dilakukan oleh Tresuri dengan *counterparty* yang lain, baik bank maupun non-bank.

SUMBER DAYA INSANI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan bagian terpenting dalam proses pertumbuhan usaha Bank Victoria Syariah. Tahun 2022, Bank Victoria Syariah tetap terus berupaya melakukan pengembangan SDI melalui pelatihan dan pengembangan karir, serta memberikan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan, untuk dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pengelolaan SDI difokuskan pada peningkatan kompetensi dalam pelayanan yang berprinsip syariah, mulai dari proses seleksi, rekrutmen, dan pelatihan.

1. **Seleksi dan Rekrutmen**
   Untuk memperkuat organisasi, setiap tahun Bank Victoria Syariah melakukan seleksi SDI existing dan/atau proses rekrutmen melalui website, kerjasama dengan grup usaha, atau *experience hire*. SDI akan diberikan pelatihan agar dapat memahami visi, misi, dan nilai perusahaan dengan lebih baik, Dengan adanya seleksi SDI dan rekrutmen secara berkala, Bank Victoria Syariah dapat memastikan bahwa organisasi terus berkembang dan memiliki karyawan yang berkualitas. Selain itu, pelatihan yang diberikan pada SDI juga dapat membantu

SUMBER DAYA INSANI

meningkatkan pemahaman mereka terhadap visi, misi, dan nilai perusahaan.serta akan diikutsertakan dalam pelatihan dasar perbankan syariah, sertifikasi-sertifikasi mandatori, dan pelatihan-pelatihan lainnya.

Selama tahun 2022, jumlah karyawan yang telah direkrut sebanyak 12 orang, Diharapkan dengan penambahan karyawan ini, produktivitas perusahaan dapat meningkat dan memperkuat posisi perusahaan di pasar, di mana perekrutan tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan administrasi dengan memperhatikan *composition* yang seimbang antara supporting dan bisnis.

2. **Pendidikan dan Pelatihan**
   Tahun 2022, Bank Victoria Syariah telah melakukan pelatihan dan pendidikan yang dilakukan secara *in-house* atau *public*. Adapun pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan adalah penanganan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), pendidikan dasar perbankan syariah, identifikasi transaksi. Semua pelatihan dan pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawan Bank Victoria Syariah. pelatihan terkait masyarakat profesi penilai indonesia (MAPI) serta *sharing session* unit kerja. Bank Victoria Syariah juga

SUMBER DAYA INSANI

melakukan pemenuhan atas Sertifikasi dan *Refreshment* Manajemen Risiko, Sertifikasi Pengawas Syariah, serta Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR).

3. **Pengelolaan Kinerja**
   Untuk mendorong karyawan agar senantiasa berupaya mencapai kinerja yang optimal, Bank Victoria Syariah mendorong penerapan dan perbaikan seluruh tahapan dalam proses pengelolaan kinerja yang mencakup penyusunan indikator kinerja dan pembinaan periodik dari kepada supervisinya dalam memantau pencapaian target kerja. Untuk pelaksanaan penilaian kinerja karyawan menggunakan parameter yang terukur berupa *key performance indicator* (KPI).

RENCANA KE DEPAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI

Rencana pengembangan sumber daya insani untuk tahun mendatang adalah menyiapkan *performance oriented personnel* sebagai *key driver* pertumbuhan bisnis yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, melalui strategi utama adalah sebagai berikut :

- **MEMBENTUK PERFORMANCE *ORIENTED CULTURE***
  Menerapkan *Performance Management Process* di seluruh organisasi yang didukung oleh *key performance indicator* yang jelas dan transparan, serta mekanisme reward yang kuat dan adil.

SUMBER DAYA INSANI

- **MELENGKAPI CABANG DENGAN TIM KOMPETEN DAN MEMADAI**

  Menempatkan *Branch Manager* yang memiliki kompetensi tinggi untuk memimpin Kantor Cabang dan didukung oleh *sales team* yang cukup, disiplin dan agresif dalam melakukan penetrasi pasar.

- **MEMPERKUAT TALENT POOL**

  Memiliki data terkait *talent pool* di Kantor Pusat dan Cabang dengan profil dan kompetensi yang sesuai *(right number, right people on the right place)* yang didukung oleh organisasi yang baku (sebagai *baseline* untuk *recruitment* dan menciptakan *alignment equality)*.

- **UPAYA PENERAPAN CODE OF CONDUCT**

  Code of Conduct berlaku bagi setiap insani yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan. Setiap insan Bank Victoria Syariah memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan *Code of Conduct* dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab insan Bank Victoria Syariah adalah melaporkan setiap tindakan pegawai lain atau rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran *Code of Conduct* dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *Whistleblowing* kepada Unit Kerja Anti *Fraud*.

TEKNOLOGI INFORMASI

Revolusi industri 4.0 membawa berbagai macam perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu perubahan yang dirasakan adalah perubahan pada era digital yang mempengaruhi beberapa aspek diantaranya adalah industri perbankan syariah. Di era digital, industri perbankan syariah semakin mengembangkan inovasi teknologi perbankan digital. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan secara online dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, teknologi juga memungkinkan perbankan syariah untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan berkualitas kepada nasabahnya, salah satunya dengan tujuan untuk menarik minat para calon nasabah baru, khususnya bagi kalangan modern atau kaum milenial yang hampir seluruh kegiatannya dilakukan dengan melalui teknologi digital.

Dalam mengembangkan teknologi informasi, Bank Victoria Syariah harus memperhatikan risiko operasional yang dapat timbul dari penggunaan teknologi tersebut, seperti risiko keamanan data dan risiko kegagalan sistem. Oleh karena itu, Bank Victoria Syariah perlu melakukan evaluasi dan pengendalian risiko secara terus-menerus dalam penerapan teknologi informasi.

PROGRAM KERJA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Pada tahun 2022 Divisi Teknologi Informasi telah melakukan beberapa pemenuhan dan pengembangan antara lain:

1. **Proyek Pemenuhan Kepatuhan pada Regulator Perbankan**
   - Pengembangan aplikasi yang mendukung Bank Indonesia dan OJK sebagai regulator dalam mengembangkan serta mengimplementasikan sistem pelaporan yang terintegrasi.
   - Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikuti pendidikan serta pelatihan yang di selenggarakan internal maupun eksternal.
   - Menindaklanjuti dan mengimplementasikan hasil temuan dari OJK.
2. **Proyek Operasional Support**
   - Bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia dengan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Perbankan.
   - Memberikan dukungan dalam melakukan maintenance Kantor Cabang Utama yang meliputi update antivirus, pemeliharaan infrastruktur, jaringan dan perangkat hardware, personal computer dan peralatan pendukung lainnya.
   - Melakukan pengujian pada mesin backup yang berada di cabang Bekasi *(Business Continuity Plan)* dan Data Center Surabaya *(Disaster Recovery Centre)*.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi

Pertumbuhan teknologi yang semakin cepat ini bukan hanya disebabkan oleh semakin banyaknya ide-ide yang tumbuh, tetapi juga disebabkan oleh pertukaran informasi yang cepat melalui search engine machine. yang memungkinkan orang untuk dengan mudah mencari informasi dan memperoleh akses ke sumber daya yang terkait dengan topik tertentu, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan teknologi.

Untuk mendapatkan idea yang cerdas adalah dengan cara mencari bisnis dan market yang sudah ada lalu mengimprovisasi dan membuat inovasi menggunakan teknologi yang lebih maju sehingga produk yang dihasilkan akan lebih efisien, Dalam hal ini, juga penting untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta menyesuaikan produk dengan tren yang sedang berkembang. Dengan begitu, bisnis dapat terus berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Dalam implementasi Sistem Informasi, Bank Victoria Syariah mengoptimalkan dan memanfaatkan Tek-

TEKNOLOGI INFORMASI

nologi Informasi dengan tepat, sehingga diharapkan mampu menjalankan pengelolaan Bank secara strategis, menyediakan dan mengembangkan proses bisnis yang efisien dan efektif dengan memperhatikan keselarasan dengan tujuan Bank, Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah serta memperkuat posisi Bank Victoria Syariah di pasar perbankan Indonesia.serta memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko Teknologi Informasi yang kuat dan komprehensif.

STRATEGI YANG DILAKUKAN

Perbankan Syariah harus dapat bertransformasi dengan melakukan mengoptimalkan ekosistem dan keuangan syariah, mempunyai keunikan model bisnis yang berdaya saing tinggi, mampu mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Teknologi Informasi yang mutakhir.

Pengembangan Teknologi Informasi tahun 2022 ditujukan untuk mendukung corporate plan bisnis dengan fokus pada seluruh aspek, baik dari sisi infrastruktur, organisasi, kompetensi maupun etos kerja, meningkatkan produktivitas dan memitigasi risiko serta meningkatkan kemampuan pengelolaan data dan pengamanan informasi agar peningkatan kualitas dan kehandalan layanan Teknologi Informasi dapat terlaksana dengan konsisten.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Kelangsungan operasional perusahaan tak lepas dari peran Tata Kelola Teknologi Informasi perusahaan yang dimiliki dalam internal organisasi. Perusahaan memiliki standar dan menjalankan prosedur operasional untuk mencapai tujuan yang memiliki nilai strategis. Tata Kelola Teknologi Informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

operasional perusahaan, serta mengurangi risiko keamanan informasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa Tata Kelola Teknologi Informasi diimplementasikan dengan baik dan dikelola secara terus-menerus.

Pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi dalam sebuah organisasi, dibangun dengan memberikan nilai tambah yang mungkin akan bermanfaat bagi stakeholder. Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan dilaksanakan untuk menyelaraskan *(alignment)* antara pengembangan Teknologi Informasi dengan bisnis, mengelola risiko-risiko bisnis dengan lebih baik.Pengembangan Teknologi Informasi yang seimbang dengan penerapan strategi bisnis Bank dapat memitigasi adanya risiko dan ancaman baru berdasarkan perkembangan teknologi. Bank Victoria Syariah melaksanakan semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan *(confidentiality)*, integritas *(integrity)* dan ketersediaan *(availability)* informasi dari asset digital.

TINJAUAN KEUANGAN

TINJAUAN KEUANGAN

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris *(An Independent member of Moore Global Network Limited)*.

Dengan opini tidak menyatakan pendapat. Posisi keuangan PT Bank Victoria Syariah pada tanggal 31 Desember 2022, kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

POSISI KEUANGAN

Tabel Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2022	2021	Mutasi	
			Nominal	%
Kas	714	1,245	(530)	-42.62%
Giro pada Bank Indonesia	132,022	47,399	84,623	178.53%
Penempatan pada bank lain & Bank Indonesia	386,435	190,413	196,022	102.95%
Efek-Efek yang dimiliki	898,055	538,032	360,023	66.91%
Pembiayaan yang diberikan	622,952	805,969	(183,017)	-22.71%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6,201)	(50,753)	44,552	-87.78%
Aset tetap - bersih	2,259	5,534	(3,275)	-59.18%
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	65,975	112,655	(46,680)	-41.44%
Cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	(18,485)	(23,527)	5,043	-21.43%
Rupa-rupa aset	27,103	33,882	(6,780)	-20.01%
Jumlah Aset	**2,110,830**	**1,660,849**	**449,981**	**27.09%**

TINJAUAN KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

LIABILITAS	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Dana Wadiah dan Syirkah Temporer	816.420	1.234.923	(418.502)	-33,89%
a. Giro Wadiah	22.111	12.930	(418.502)	-33,89%
b. Giro Mudharabah	-	9	9.181	71,00%
c. Tabungan Mudharabah	22.130	20.251	(9)	-100,00%
d. Deposito Mudharabah	772.180	1.201.733	1.879	9,28%
Simpanan dari bank lain	225.000	50.500	(429.553)	-35,74%
Utang pajak	650	1.018	174.500	345,54%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.577	3.721	(367)	-36,08%
Liabilitas lain-lain	5.250	9.726	(1.143)	-30,73%
Jumlah Liabilitas	**1.049.898**	**1.299.887**	**(4.477)**	**-46,03%**

(dalam jutaan Rupiah)

EKUITAS	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal disetor	1.060.000	360.000	700.000	194,44%
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	(1.677)	291	(1.969)	-675,98%
Cadangan umum	9.156	9.156	-	0,00%
Keuntungan aktual program manfaat pasti	(110)	3.065	(3.174)	-103,58%
Laba tahun-tahun lalu	(11.550)	(16.070)	4.520	-28,13%
Laba tahun berjalan	5.113	4.520	593	13,12%
Jumlah Ekuitas	**1.060.932**	**360.962**	**699.970**	**193,92%**

TINJAUAN KEUANGAN

Total aset Bank Victoria Syariah pada 31 Desember 2022 mencapai Rp2,11 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 27,09% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1,66 triliun. Kenaikan aset tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit yang signifikan serta peningkatan dana pihak ketiga yang terkumpul pada tahun 2022.

Kenaikan jumlah aset lebih disebabkan oleh penerima modal disetor sebesar Rp700M yang terdiri dari atas setoran PT. Victoria Investama Rp562M dan setoran PT. Bank Victoria International Rp138M. serta memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko Teknologi Informasi yang kuat dan komprehensif.

Atas setoran modal tersebut, Bank menyalurkan ke aset produktif sehingga aset produktif mengalami kenaikan, penyaluran tersebut terdiri atas Penempatan pada BI baik berupa Giro Pada BI maupun Fasbis, Penempatan pada Bank Lain berupa SIMA, Surat Berharga dan Pembiayaan.

Kas

Posisi Kas pada akhir tahun 2022 berada pada posisi Rp 0,7 miliar atau mengalami penurunan 42,62% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,2 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja bisnis serta adanya persaingan yang semakin ketat di industri tersebut. Hal ini dikarenakan Bank Victoria Syariah selalu berupaya menempatkan kas yang dimiliki pada instrumen yang lebih produktif dan memberi imbal hasil yang optimal namun pada saat yang bersamaan posisi kas senantiasa dijaga pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan transaksi uang tunai nasabah.

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp132,0 miliar, naik 178,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp47,4 miliar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia semakin dipercayai oleh masyarakat dalam menyimpan uang mereka. Selain itu, kenaikan giro ini juga dapat memperkuat posisi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Posisi Giro pada Bank Indonesia selalu dijaga agar berada di atas ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM).

Penempatan Pada Bank Lain & Bank Indonesia

Penempatan dana pada Bank Lain dan Bank Indonesia per Desember 2022 sebesar Rp386,4 miliar atau naik 102,95% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2021 yang sebesar Rp190,4 miliar. Kenaikan penempatan dana tersebut dapat diartikan sebagai upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memilih instrumen investasi yang lebih menguntungkan. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait risiko dan keamanan investasi pada bank yang dipilih. Kenaikan jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain berasal dari penempatan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA).

Efek-efek (Surat Berharga)

Efek-efek per Desember 2022 sebesar Rp898,0 miliar atau naik 66,91% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2021 yang sebesar Rp538,0 miliar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan tersebut pada akhir tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan kenaikan penempatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp174,9 miliar dan Rekasadana Syariah sebesar Rp185,0 miliar.

TINJAUAN KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

JENIS SURAT BERHARGA	2022	2021	Mutasi	
			Nominal	%
Surat Berharga Syariah Negara	697,975	523,008	174,968	33.45%
Reksadana Syariah	200,080	15,024	185,055	1231.70%
Jumlah Efek-Efek	**898,055**	**538,032**	**360,023**	**66.91%**

(dalam jutaan Rupiah)

TINJAUAN KEPEMILIKAN	2022	2021	Mutasi	
			Nominal	%
Diukur pada nilai wajar melalui laba (rugi)	200,080	49,546	150,534	303.83%
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	45,601	349,057	(303,456)	-86.94%
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	652,374	139,430	512,945	367.89%
	898,055	**538,032**	**360,023**	**66.91%**

Pembiayaan

Total Pembiayaan per Desember 2022 sebesar Rp622,9 miliar atau turun 22,71% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2021 yang sebesar Rp805,9 miliar.

Penurunan terjadi pada pembiayaan kepada pihak ketiga sebesar 26,50% dari Rp805,3 miliar menjadi Rp591,9 miliar.

(dalam jutaan Rupiah)

KOMPONEN	2022		2021		Pertumbuhan	
					Nominal	%
Pihak Berelasi	31,056	4.99%	634	0.08%	30,422	4800.87%
Pihak Ketiga	591,896	95.01%	805,336	99.92%	(213,439)	-26.50%
Jumlah Pembiayaan	622,952	100.00%	805,969	100.00%	(183,017)	-22.71%
CKPN	(6,201)	-	(50,772)	-	44,571	-87.79%
Jumlah Pembiayaan Bersih	**616,751**	**100.00%**	**755,197**	**100.00%**	**(138,446)**	**-18.33%**

TINJAUAN KEUANGAN

Kualitas Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian selalu diterapkan Bank Victoria Syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Bank senantiasa menjaga hubungan yang baik dan terbuka dalam berkomunikasi dengan nasabah, melakukan pemantauan atas perkembangan usaha nasabah serta kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya.

Bank Victoria Syariah fokus pada upaya-upaya menjaga kualitas pembiayaan yang sehat di antaranya meliputi:

- menjaga kualitas pembiayaan dan melakukan penyelamatan pembiayaan melalui proses restrukturisasi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah ini sejalan dengan program d an kebijakan stimulus regulator dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
- menerapkan kebijakan pencadangan penurunan nilai secara prudent sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi kondisi yang penuh ketidak-pastian dan risiko kredit yang masih cenderung tinggi;
- mengembangkan kapasitas SDM yang terkait dengan proses pembiayaan secara konsisten mulai dari pelaksana fungsi pemasaran, fungsi inisiasi, fungsi pengolahan, fungsi pencairan dan administrasi hingga fungsi penyelamatan pembiayaan;
- memastikan kecukupan kebijakan pembiayaan serta melakukan evaluasi secara berkala.
- Dari total pembiayaan yang disalurkan, sebesar Rp610,2 miliar atau 97,96% dari total pembiayaan berada pada kategori 'Lancar' mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp685,5 miliar atau 85,05% dari total pembiayaan. Sementara itu, pembiayaan pada kategori 'Dalam Perhatian Khusus' tercatat sebesar Rp1,4 miliar atau 0,23% dari total pembiayaan, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp43,5 miliar. Sementara pembiayaan kategori NPF mengalami perbaikan dari Rp76,9 miliar (rasio 9,54% gross dan 3,72% net) menjadi Rp11,2 miliar (rasio 1,81% gross dan 1,36% net), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KOMPONEN	2022		2021		Pertumbuhan	
					Nominal	%
Lancar	610,236	97.96%	685,499	85.05%	(75,263)	-10.98%
Dalam Perhatian Khusus	1,435	0.23%	43,559	5.40%	(42,125)	-96.71%
Kurang Lancar	-	0.00%	488	0.06%	(488)	-100.00%
Diragukan	-	0.00%	1,630	0.20%	(1,630)	-100.00%
Macet	11,282	1.81%	74,793	9.28%	(63,511)	-84.92%
Jumlah Pembiayaan	622,952	100.00%	805,969	100.00%	**(183,017)**	**-22.71%**
CKPN	(6,201)	-	(50,772)	-	**44,571**	**-87.79%**
Jumlah Pembiayaan Bersih	**616,751**	**100.00%**	**755,197**	**100.00%**	**(138,446)**	**-18.33%**

TINJAUAN KEUANGAN

Dana Wadiah dan Syirkah Temporer

Pada tahun 2022, Bank Victoria Syariah menghimpun Dana Wadiah dan Syirkah Temporer sebesar Rp0,81 triliun atau turun sebesar 33,89% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,23 triliun. Penurunan jumlah dana yang dihimpun oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2022 kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi di bank tersebut. Penurunan ini lebih disebabkan untuk menjaga rasio Financing to Deposits Ratio (FDR) agar tidak di bawah 65% agar rentabilitas bank juga terdampak lebih dalam. Penurunan yang signifikan terjadi pada posisi deposito mudharabah yang turun sebesar 35,84%, sedangkan untuk Giro Giro Wadiah naik 70,29%, dan Tabungan mudharabah naik sebesar 8,42%.

(dalam jutaan Rupiah)

DANA WADIAH DAN SYIRKAH TEMPORER	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pihak Berelasi	**3,663**	**3,293**	**370**	**11.23%**
Giro wadiah	92	-	92	0.00%
Giro mudharabah	-	9	(9)	-100.00%
Tabungan mudharabah	400	209	191	91.26%
Deposito mudharabah	3,171	3,075	96	3.13%
Pihak Ketiga	**812,757**	**1,231,630**	**(418,873)**	**-34.01%**
Giro wadiah	22,019	12,930	**9,089**	**70.29%**
Giro mudharabah	-	-	**-**	**0.00%**
Tabungan mudharabah	21,730	20,042	**1,688**	**8.42%**
Deposito mudharabah	769,008	1,198,658	**(429,650)**	**-35.84%**
Jumlah Dana	**816,420**	**1,234,923**	**(418,503)**	**-33.89%**

TINJAUAN KEUANGAN

Ekuitas

Ekuitas Bank Victoria Syariah posisi 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.060,9 miliar atau naik 193,92% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp360,9 miliar. Kenaikan ekuitas Bank Victoria Syariah tersebut dapat diatribusikan pada peningkatan laba bersih yang dicapai oleh bank pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari Bank Victoria Syariah dalam mengelola aset dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Kenaikan tersebut lebih disebabkan kenaikan oleh penerima modal disetor sebesar Rp700M yang terdiri dari atas setoran PT. Victoria Investama Rp562M dan setoran PT. Bank Victoria International Rp138M, selain itu kenaikan juga disebabkan karena laba rugi tahun berjalan yang positif dampak dari kinerja Bank yang semakin membaik.

Laporan Laba (Rugi) Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

KOMPONEN	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Pengelolaan Dana	76,482	113,818	(37,336)	-32.80%
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(39,152)	(68,364)	29,212	-42.73%
Net Pengelolaan Dana	**37,330**	**45,454**	**(8,124)**	**-17.87%**
Pendapatan Operasional Lainnya	21,291	27,888	(6,597)	-23.65%
Beban Operasional	(53,780)	(61,088)	7,308	-11.96%
Laba Operasional	**4,841**	**12,254**	**(7,413)**	**-60.49%**
Laba (Rugi) Non Operasional	2,048	1,049	**998**	**95.14%**
Laba Sebelum Pajak	6,889	13,303	**(6,414)**	**-48.22%**
Beban (penghasilan) Pajak	(1,776)	(8,783)	**7,007**	**-79.78%**
Laba Bersih Setelah Pajak	**5,113**	**4,520**	**593**	**13.12%**

TINJAUAN KEUANGAN

Pendapatan Pengelolaan Dana

Pada tahun 2022, Bank Victoria Syariah dapat membukukan pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp76,5 miliar yang mengalami penurunan Rp37,3 miliar atau 32,80% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp113,8 miliar. Penurunan terbesar dikontribusi oleh penurunan pendapatan dari bagi hasil musyarakah sebesar Rp17,6 miliar atau sebesar 43,31%

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah

Pada tahun 2022, Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah dibukukan sebesar Rp39,1 miliar yang mengalami penurunan sebesar Rp29,1 miliar atau sebesar 42,61% dari Rp112,2 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp68,2 miliar. Hal ini lebih disebabkan penurunan dari oustanding simpanan dana pihak ketiga yang menurun 33,89% yang bertujuan untuk menjaga tingkat realisasi Dana Pihak Ketiga masih bisa dipertahankan agar tetap terjaga likuiditasnya sesuai dengan rasio FDR yang optimal.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya hingga Desember 2022 tercatat sebesar Rp21,3 miliar, turun sebesar Rp6,5 miliar atau 23,65% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2021 yang sebesar Rp27,8 miliar.

Beban Operasional

Pada posisi 31 Desember 2022, beban operasional yang dibukukan oleh Bank Victoria Syariah sebesar Rp53,8 miliar, turun sebesar Rp7,3 miliar atau 11,96% dibandingkan posisi tahun 2021 yang sebesar Rp61,1 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan atas penurunan biaya CKPN sebesar Rp19,3 miliar sebagai bagian komitmen Bank dalam menjaga rasio NPF bersih serta dalam memitigasi risiko kredit atas kemungkinan terjadi pada pembiayaan dan penyelesaian AYDA. Sedangkan untuk biaya administrasi dan umum serta biaya personalia, Bank mengalami efisiensi dikisaran 23,22% hingga 25,97%.

Bank Victoria Syariah akan memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan biaya-biaya baik berupa biaya tenaga kerja maupun biaya-biaya lainnya sehingga pada akhir tahun 2023 diharapkan rasio BOPO tercapai lebih efektif dari periode sebelumnya. Program efisiensi dilakukan pada berbagai sisi, salah satunya dalam bidang operasional akan dilakukan re-engineering proses dan melakukan beberapa enhancement proses sehingga transaksi dapat lebih efisien, dengan tetap memperhitungkan sisi risiko dan kontrol transaksi.

05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

- Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
- Komitmen Dalam Tata Kelola Perusahaan
- Deklarasi Anti Fraud
- Direksi
- Komite Eksekutif Direksi
- Dewan Pengawas Syariah
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
- Fungsi Audit Internal atau SKAI
- Manajemen Risiko
- Penerapan Manajemen Risiko
- Pengendalian Internal
- Rapat Umum Pemegang Saham
- Perkara Hukum yang dihadapi Perseroan
- Komite Remunerasi & Nominasi
- Keterbukaan Informasi

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi guna mendukung upaya Bank dalam mencapai tujuan serta visi, misi dan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan bank yang transparan dan sehat dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan berbagai pihak, baik para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Bank senantiasa menjunjung tinggi norma-norma baik norma moral dan sosial serta mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif. membangun sistem Tata Kelola yang baik secara keseluruhan dapat memperkuat kinerja bank lebih optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank dapat menjalankan usaha secara transparan dan bertanggung jawab tanpa adanya konflik kepentingan.

Pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* Bank Victoria Syariah mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Penilaian penerapan GCG sesuai Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Peraturan OJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
7. Peraturan OJK No. 16/ POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. Peraturan OJK No. 37/ POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Prinsip-prinsip GCG menjadi referensi dalam pengambilan keputusan, optimalisasi kinerja, menghindari konflik kepentingan, keterbukaan informasi, serta peningkatan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan global. Oleh karena itu, GCG menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Dalam mencapai visi dan misinya, Bank Victoria Syariah telah mengimplementasi prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

KOMITMEN DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas Bank Victoria Syariah dan keragaman produk dan jasa yang ditawarkan, perusahaan terus berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank Victoria Syariah untuk menjadi bank syariah terdepan di Indonesia. menjadikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting untuk diterapkan guna membangun kepercayaan yang lebih baik dan memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)*.

Komitmen Bank Victoria Syariah dalam menerapkan GCG tercermin dari disahkannya Kebijakan dan prosedur *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No.020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)*, dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022

dan Surat Keputusan Direksi No.002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022. Pedoman tersebut menjadi landasan bagi Bank untuk menerapkan prinsip GCG pada seluruh aktivitas operasionalnya. Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha.

Bank Victoria Syariah memiliki Parameter Keberhasilan Bank dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi dapat maju apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif, yang bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari Sumber Daya Insani Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan kinerja organisasi.

Bank terus mendorong Sumber Daya Insani untuk selalu berkarya dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan yaitu *Honest, Energic, Brilliant, Accurate* dan *Trust* atau HEBAT.

Kerangka Kerja Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan

Bank Victoria Syariah senantiasa melakukan penguatan proses penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Bank Victoria Syariah dalam menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Bank Victoria Syariah juga memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnisnya selalu mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku.

DEKLARASI ANTI *FRAUD*

Bank Victoria Syariah menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang teguh oleh Bank Victoria Syariah. untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi dan tidak melakukan tindakan fraud dan tindakan yang tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku *(Code of Conduct)*

Bank Victoria Syariah dalam melaksanaan pedoman etika dan perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen Bank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, etis, dan bertanggung jawab, serta menjaga reputasi Bank Victoria Syariah sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan berkualitas. Pedoman Etika dan Perilaku berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank Victoria Syariah serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Bank Victoria Syariah yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud*.

Customer Awareness

Bank Victoria Syariah melaksanakan edukasi untuk meningkatkan *customer awareness* dengan melalui pemasangan banner di Cabang dengan maksud mengingatkan nasabah atas penggunaan layanan yang benar dan tepat, termasuk tanggung jawab ke dua belah pihak, baik bank maupun nasabah Dan juga

Bank Victoria Syariah turut aktif mendukung Program Literasi dan Inklusi Keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan *customer awareness*.

Penerapan Anti Pencucian Uang

Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Victoria Syariah dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 2010 (UU TPPU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan perubahannya POJK No. 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019.

Dalam rangka menerapkan APU-PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah, secara konsisten dan berkelanjutan Unit Kerja APU-PPT Bank Victoria Syariah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Menyusun program-program dalam rangka penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyusun kebijakan dan prosedur APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah untuk seluruh karyawan.
- Melakukan pengawasan/audit terhadap penerapanAPU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah
- Menyiapkan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah

Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan di atas, Bank Victoria Syariah berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan di atas, Bank Victoria Syariah berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Bank Victoria Syariah juga terus meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar serta mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis dan operasional Bank serta memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2022, susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa:

1. tanggal 14 Juni 2022
2. tanggal 27 September 2022

telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/PJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.

Anggota Direksi Bank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya.

Anggaran Dasar menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 2 (dua) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah;

1. Akta No. 53 tanggal 14 Juni 2022
2. Akta No. 106 tanggal 27 September 2022

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Posisi RUPS LB 14 Juni 2022

- Direktur Utama* : Sugiharto**)
- Direktur : Andy Sundoro
- Direktur Kepatuhan : Deddy Effendi Ridwan

*) fungsi Direktur Operasi dirangkap oleh Direktur Utama

**) Bapak Sugiharto telah mengundurkan diri dari Direktur Utama PT. Bank Victoria Syariah sesuai RUPS LB tanggal 27 September 2022

Posisi RUPS LB 27 September 2022

- Direktur Utama* : Dery Januar
- Direktur : Andy Sundoro
- Direktur : Deddy Effendi Ridwan**)
- Direktur Kepatuhan* : Ruly Dwi Rahayu

*) Bapak Dery Januar telah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Bank Victoria Syariah dan Ibu Ruly Dwi Rahayu sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai RUPS LB tanggal 27 September 2022, dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Januari 2023.

**) per tanggal 27 September 2022 Bapak Deddy Effendi Ridwan telah melepas jabatan Direktur Kepatuhan dan diangkat sebagai Direktur dan dalam proses fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

a. Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain:

- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Tugas Direksi antara lain sebagai berikut :

i. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah

ii. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku

iii. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya

iv. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

v. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

vi. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

c. Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

i. Mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.

ii. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

iii. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.

iv. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.

v. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

vi. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

d. Board Manual

Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagaimana yang telah diatur Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022. Yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

e. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal setiap bulan dan apabila dipandang perlu, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala bersama Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2022, telah diselenggarakan sebanyak 40 (empat puluh) kali rapat Direksi dan 12 (dua belas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Direksi dengan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sugiharto*)	33	82,5%	8	66,6%
Andy Sundoro	40	100%	12	100%
Deddy Effendi Ridwan	39	97,5%	12	100%
Total Rapat	**40**	**100%**	**12**	**100%**

**) Bapak Sugiharto telah mengundurkan diri dari Direktur Utama PT. Bank Victoria Syariah sesuai dengan RUPSLB tanggal 27 September 2022*

Acara rapat Direksi seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan.

f. Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga keuangan lainnya.

KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

a. Komite Aset, *Liabilities Committee* & *Temporary Syirkah Fund Management* (ALSyCO)

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)*, dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

i. Struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut: Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO
   - Direktur Bisnis, sebagai Wakil Ketua ALSyCO
   - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagai Anggota
   - Direktur Operasi, sebagai Anggota
   - Kepala Bagian Unit kerja Tresuri, sebagai Sekretaris

Tim pendukung ALSyCO untuk mempersiapkan pembahasan yang lebih komprehensif, antara lain:
   - Kepala Bagian Unit Kerja Tresuri sebagai Koordinator
   - *Chief Financial Officer*, sebagai Wakil Koordinator
   - Kepala Divisi Komersial, Jaringan Cabang dan Pendanaan Produk
   - Koordinator Unit Kerja Pendanaan dan Produk
   - Kepala Bagian Analsis Risiko

ii. Rapat Komite ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2022 ALSyCO telah mengadakan rapat/ pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali.

iii. Wewenang dan Tanggung jawab Komite ALSyCO adalah sebagai berikut :
   - Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
   - Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain:
     i. Nisbah untuk Pemilik Dana
     ii. Besarnya Marjin, Sewa dan Bagi Hasil
     iii. Likuiditas
     iv. *Maturity Profile*
     v. *Market Risk* Syariah
   - Memberikan arahan dalam manajemen risiko terkait alokasi sumber dan penggunaan dana.
   - Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal.

b. Komite Pengarah Tehnologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)

Komite PTI-PP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

i. Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:
   - Direktur Operasi, sebagai Ketua PTI-PP
   - Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua PTI
   - Direktur Bisnis, sebagai Anggota
   - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagai Anggota
   - Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Unit Kerja Pendanaan dan Produk, sebagai Sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.

Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
   - Kepala Divisi Operasional
   - *Chief Financial Officer*

ii. Wewenang dan Tanggung Jawab
   - Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu: Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi; Pengelolaan operasional teknologi informasi; Pengembangan jaringan komunikasi; Pengelolaan *business continuity plan* dan *disaster recovery plan*; Pengelolaan terhadap *end user computing*; Pengembangan *electronic banking*; Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi.

- Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu: Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru; Pengelolaan operasional produk dan aktvitas baru; Pengembangan jaringan komunikasi yang dibutuhkan; Pengelolaan terhadap produk dan activity life yang diharapkan; Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan; Pengaruh terhadap keuangan Bank.
- Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/activity baru secara berkala.

iii. Rapat diadakan 2 (dua) kali selama setahun dan apabila diperlukan.

Selama tahun 2022 rapat komite telah terlaksana sebanyak 1 (satu) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

c. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan pemberian pembiayaan baru, penambahan, dan perpanjangan dalam batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Bisnis
- Direktur Operasional
- Kepala Divisi Riviu Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support merangkap sebagai Sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite.

i. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:
  - Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
  - Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
  - Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral.* (mengacu pada aspek 5C-Constrain).
  - Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
  - Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.
- Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

ii. Rapat diadakan apabila diperlukan.

d. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah Komite yang dibentuk berdasarkan dibentuk Surat Keputusan Bersama Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No.002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagai Ketua
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- Direktur Operasional, sebagai Anggota
- Kepala Unit Kerja Analisis Risiko, sebagai Sekretaris
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
  - Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
  - Chief Financial Officer
  - Kepala Divisi Kepatuhan
  - Kepala Divisi Riviu Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support
  - Kepala Divisi Pembiayaan Komersial dan Jaringan Cabang
  - Kepala Divisi Sumber Daya Insani
  - Kepala Wakil Divisi Operasional
  - Kepala Unit KerjaTreasury
  - Kepala Divisi Teknologi Informasi (TI)
  - Kepala Unit Kerja Pendanaan dan Produk

i. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.

ii. Rapat komite dilaksanakan setiap bulan

Selama tahun 2022, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas kali).

e. Komite Sanksi dan Personalia

Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Susunan anggota Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

i. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua. Susunan anggota, antara lain:

- Direktur Operasional
- Direktur Bisnis.
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- Kepala SKAI.

ii. Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua. Susunan anggota, antara lain:

- Direktur Operasional
- Direktur Bisnis.
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- Kepala Divisi SDI

iii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
- Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
- Memberikan penghargaan (reward) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan punishment terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

iv. Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

f. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

Komite Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No.020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2022 dan Surat Keputusan Direksi No.002/DIR-SK/JKT/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Susunan anggota Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- Direktur Operasional, sebagai Ketua
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- Kepala Divisi SDI dan Umum, merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite

Apabila proses persetujuan melalui rapat komite, maka pihak lain dapat diundang dan tidak memiliki hak suara, yaitu:

- Chief Financial Officer
- Kepala Unit Kerja Analisis Risiko
- Kepala Unit Kerja Pendanaan dan Produk

i. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Menyampaikan informasi terkait pembelian /pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal
- Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap pembelian / pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.

ii. Mengevaluasi hubungan dengan vendor secara berkala dengan mengkategorikan penilaian yang "Direkomendasikan" dan "Tidak Direkomendasikan". Hal ini penting untuk memastikan bahwa vendor yang dipilih tetap memenuhi standar kualitas dan layanan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam kerjasama dengan vendor tersebut. Hasil penilaian yang masuk daftar direkomendasikan dipakai sebagai masukan dalam proses pembelian / pengadaan barang dan jasa untuk periode tahun berikutnya.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Bank Victoria Syariah, mengutamakan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam dan menghindari riba, serta investasi pada sektor-sektor yang dianggap tidak etis menurut prinsip syariah maka diangkat dan ditempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN), serta anggaran dasar Bank Victoria Syariah.

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

i. Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (comply) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bank telah mengangkat Dewan Pengawas Syariah baru atas nama Bapak H. Misbahul Ulum, M.Si dan Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A melalui RUPSLB tanggal 27 September 2022 dan keduanya telah dinyatakan lulus fit and proper test OJK sesuai surat OJK No. SR-13/PB.1/2022 tanggal 30 November 2022, dan Bank telah melakukan penegasan pengangkatan melalui RUPSLB tanggal 5 Desember 2022 yang dituangkan pada Akta RUPS No. 10 tanggal 5 Desember 2022.

ii. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yanglain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terjadi dalam pengambilan keputusan di dalam bank, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah:

H. Misbahul Ulum, M.Si
-- Nihil --

Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A
-- Nihil --

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

iii. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

i. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*.

ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai SK Direksi No. 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi antara lain:

Susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
1	H. Misbahul Ulum, M.Si	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	Anggota Dewan Pengawas Syariah

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
- Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

iv. Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah, yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

v. Rapat Dewan Pengawas Syariah

i. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun demikian diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

ii. Rekapitulasi rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat

Naman Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Kehadiran	Persentase
H. Misbahul Ulum, M.Si	5	83%
Dr. Syarif Hidayatullah, S.Si, M.A	6	100%
Total Rapat	**6**	

Pengambilan keputusan Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

iii. Seluruh keputusan Rapat DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

iv. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Bank dengan baik.

vi. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2022 dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank Victoria Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah termasuk penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, antara lain adalah:

i. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.

ii. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.

iii. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

iv. Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Opini Dewan Pengawas Syariah

No.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Opini terkait Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan dengan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk tanggal 26 Agustus 2022	No. 591/DIR-BVIS/VIII/2022
2	Opini terkait layanan Kartu Debit PT Bank Victoria Syariah tanggal 7 November 2022	No. 779/DIR-BVIS/XI/2022
3	Opini terkait Penggunaan Dana Qardhul Hasan untuk Pelatihan karyawan tanggal 7 November 2022	No. 780/DIR-BVIS/XI/2022
4	Kesesuaian Prinsip Syariah atas Perubahan Objek dan Tujuan Pembiayaan serta Pembayaran Bagi Hasil tanggal 27 Desember 2022	No. 001/DIR-BVIS/XII/2022

vii. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank Victoria Syariah telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Untuk itu, Nasabah dapat memperoleh keuntungan dari produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidakmengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, and objek haram.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan, Bank Syariah harus memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus 2022, dan Semester II tahun 2021–2022 disampaikan pada bulan Februari 2023.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat ex-ante dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.3/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Pengendalian Internal, and Divisi Manajemen Risk. Fungsi kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran, fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

a. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.

i. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau Business Plan. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.

ii. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

iii. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

iv. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

v. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan dan penempatan dana oleh Unit Kerja Treasury diatas jumlah tertentu.

vi. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.

vii. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

viii. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ix. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko

i. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (Risk Management) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.

ii. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.

iii. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan risk appetite.

iv. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.

v. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

vi. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.

vii. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan

i. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

ii. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

iii. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

d. Program Kerja Tahun 2022 dan Realisasinya

Program Kerja

Sesuai rapat kerja Tanggal 11 Februari 2022 secara online melalui zoom meeting, rencana kerja Direktorat Kepatuhan ditetapkan 5 (lima) prioritas atau program unggulan yaitu sebagai berikut:

i. Menetapkan keseimbangan antara risiko dan pengendalian dengan pertumbuhan bisnis

ii. Membangun MIS untuk *mandatory report*

iii. Awareness Risiko Operasional

iv. Terus membangun image Bank Victoria Syariah sebagai bank yang bereputasi baik dalam hal GCG

v. Membangun kemampuan kepemimpinan melalui *Talent Management*

Berikut adalah implementasi pelaksanaan program kerja Divisi

Kepatuhan pada Tahun 2022:

1. Melakukan pengarahan dan sosialisasi Budaya Perusahaan Bank serta Pelaksanaan Akad Syariah
2. Melakukan pengembangan atas intranet sebagai media informasi ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan lebih mudah diakses dan *user friendly* oleh seluruh pegawai, sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran dan komitmen untuk dapat mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan materi terkait Kepatuhan, APU PPT, *Good Corporate Governance* dan Anti Penyuapan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan baik internal.
4. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan internal maupun external yang berlaku, serta melakukan *regulation update* atas peraturan-peraturan baru yang relevan dengan kegiatan bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan layanan yang aman dan terpercaya bagi nasabahnya serta meminimalisir risiko keuangan. Selain itu, regulasi update juga membantu bank untuk tetap kompetitif dan terus berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
5. Melakukan kajian terhadap rancangan ketentuan baru, produk dan aktivitas baru, serta melakukan pembaharuan terkait dengan adanya peraturan-peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha bank. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bank tetap mematuhi regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Meningkatkan kompetensi Direktur Kepatuhan dan pegawai pada satuan kerja kepatuhan melalui pelatihan, seminar, *workshop* dan/atau media lainnya.
7. Menghadiri kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik dihadiri secara langsung oleh Direktorat Kepatuhan maupun dihadiri oleh unit kerja terkait pada Direktorat lainnya.
8. Memberikan *reminder* dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait atas penerapan ketentuan yang berlaku, prinsip kehati- hatian, pemenuhan komitmen Bank kepada pihak otoritas dan pihak terkait lainnya.
9. Memberikan opini serta melakukan kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta bisnis dan operasional kegiatan usaha yang akan/atau telah ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta regulator lainnya.
10. Memberikan opini serta masukan terhadap permohonan Pembiayaan, Restrukturisasi maupun Penghapus bukuan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi Pembiayaan dan Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan yang berlaku.
11. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan *(compliance checklist)* atas dokumen persyaratan administratif Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

12. Melakukan monitoring dan berkoordinasi secara aktif melalui reminder dan permintaan progress laporan atas tindak lanjut dan pemenuhan komitmen atas Hasil Pemeriksaan Umum oleh OJK, bank bjb maupun komitmen-komitmen lain.
13. Untuk kepentingan Kepatuhan terhadap prinsip Syariah, Bank senantiasa mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menjadikannya sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan. Selain itu Direktorat Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan juga menjalankan fungsi sebagai *counterpart* DPS dalam melakukan review terhadap produk-produk dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang telah ditetapkan.
14. Menyusun laporan-laporan terkait pelaksanaan kepatuhan Bank, antara lain:
    a. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance;*
    b. Laporan Kepatuhan;
    c. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan nTransaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
    d. Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT); dan
    e. Laporan Penerapan Program APU-PPT kepada Direksi.
    f. Laporan APU-PPT APOLO kepada OJK
15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:
    1. Memastikan kesesuaian ketentuan internal terkait dengan penerapan program APU-PPT dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak otoritas terkait lainnya, serta menetapkan struktur organisasi dalam rangka penerapan program APU PPT.
    2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait sehubungan dengan diperlukannya data-data terkait dengan pelaksanaan program APU-PPT, termasuk mengenai:
        a. Proses Pengkinian Data Nasabah.
        b. Proses pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
    3. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi sehubungan dengan pelaksanaan Program APU-PPT, sehubungan dengan pemeliharaan dan penyempurnaan infrastruktur pendukung pelaksanaan program APU-PPT serta efektivitas pelaksanaan program dan fungsi APU-PPT.
    4. Melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas terkait dengan Laporan Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dengan memperhatikan *red flags* (parameter) transaksi keuangan mencurigakan.
    5. Melakukan koordinasi dan menindaklanjuti surat-surat dari Pihak yang Berwenang serta mengkoordinasikannya dengan Unit Kerja-Unit Kerja terkait mengenai koordinasi, permintaan data dan informasi Perbankan, pemblokiran rekening, dan hal-hal lainnya terkait dengan penerapan Program APU-PPT.
    6. Memastikan berjalannya proses pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme *(Risk Based Approach/RBA).*
    7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan internal *(inhouse Training)* dan/atau pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan eksternal terkait dengan penerapan program APU-PPT dengan Divisi Sumber Daya Insani.

Transaksi dengan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan ekonomis Bank berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan pada anggota Dewan Komisaris mau pun Direksi Bank Victoria Syariah.

Penilaian GCG secara *Self Assessment*

Untuk memastikan peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada manajemen maupun kepada pemangku kepentingan lainnya, Bank Victoria Syariah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil dari *self assessment* tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank Victoria Syariah terhadap prinsip-prinsip GCG.

Meskipun belum menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, pelaksanaan *self assessment* memiliki akurasi dan objektivitas yang baik karena dilakukan sesuai dengan metodologi yang diberikan oleh Regulator dan dengan melibatkan seluruh elemen Bank. Adapun hasilnya dilaporkan Ke Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Bank Victoria International Tbk (BVIC) sebagai Entitas Utama dan atau pemegang saham. Pelaksanaan *self assessment* secara semesteran ini juga digunakan sebagai alat yang penting bagi BVIC untuk mengukur Tata Kelola Secara Terintegrasi dan tingkat kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Hasil Penilaian sendiri *(self assessment)* pelaksanaan GCG melalui penetapan peringkat faktor-faktor GCG yang dilakukan secara factual terhadap tata kelola *(governance)* terdiri dari 3 (tiga) aspek utama, yaitu: *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome.*

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia dan Hasil *self assessment* GCG tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1.58	Baik
Semester II	1.53	Baik

Dan parameter penilaian *self assessment* adalah:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank tahun 2022 adalah sebagai berikut:

GOVERNANCE STRUCTURE

- **Faktor-Faktor positif aspek *governance structure***
  - Jumlah Dewan Pengawas Syariah adalah 2 (dua) orang dan seluruh Dewan Pengawas Syariah telah dinyatakan lulus *fit and proper test.*
  - Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
  - Komposisi Satuan Kerja Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk Batas Maksimum Penyediaan Dana.
  - Bank telah memiliki fungsi pengembangan produk
  - Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*
  - 2 (dua) dari 4 (empat) Direksi masih dalam proses fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan.
  - 1 (satu) dari 3 (tiga) Komisaris masih menunggu hasil fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan

GOVERNANCE PROCESS

- **Faktor-faktor positif aspek *governance process***
  - Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
  - Pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan melalui RUPS.
  - Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
  - Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
  - Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah sesuai dengan kondisi Bank sebenarnya.
- **Faktor-faktor negatif aspek *governance process***
  - Secara umum realisasi atas pencapaian target RBB Bank pada Semester II tahun 2022 dengan hasil yang cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan beberapa pos belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.
  - Untuk pertumbuhan pos pembiayaan sudah sejalan dengan pertumbuhan dan sudah mencapai target yang telah ditentukan, sedangkan untuk penghimpunan DPK masih bisa dikendalikan pada nilai yang optimal meskipun masih di bawah target yang ditentukan, untuk beberapa pos yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya antara lain pada pos pembiayaan bermasalah (NPL) dan proses penjualan AYDA meskipun keduanya sudah mengalami perbaikan dan sesuai dengan terget yang ditetapkan. Secara berkelanjutan Bank Victoria Syariah akan terus memperbaiki kinerjanya agar di periode selanjutnya akan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan

GOVERNANCE OUTCOME

- **Faktor-faktor positif aspek *governance outcome***
  - Bank telah menerapkan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank.
  - Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana.
  - Selama tahun 2021 tidak terjadi benturan kepentingan.
  - Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
  - Bank merealisasikan peningkatan mutu kualitas SDI secara berkala untuk berkelanjutan selama tahun 2022 yakni sertifikasi Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) orang dan refreshment manajemen risiko 18 (delapan belas) orang, dan SPPUR 20 (dua puluh) sertifikat

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai, serta transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa

- **Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome***
  Sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh karyawan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

  Berdasarkan pelaksanaan GCG selama tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan GCG tahun 2022 dengan predikat baik.

FUNGSI AUDIT INTERNAL ATAU SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)

Fungsi Audit Internal pada Bank Victoria Syariah sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank Victoria Syariah yang melibatkan dana masyarakat. Audit Internal juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh Bank Victoria Syariah, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan Bank Victoria Syariah. Di samping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, Audit Internal diharapkan juga mampu menjaga perkembangan Bank Victoria Syariah ke arah yang sesuai dalam menunjang program pembangunan Pemerintah.

a. Struktur dan Kedudukan SKAI

Guna mendukung kinerja SKAI agar senantiasa dalam tingkat optimal, Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank Victoria Syariah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada OJK.

c. Independensi

Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas Internal Audit serta Dewan Pengawas Syariah.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab SKAI

Visi dan Misi, wewenang dan tanggung jawab SKAI telah dirumuskan dalam Piagam Audit Intern *(Internal Audit Charter)* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. Dalam hal ini Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

e Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2022

Aktivitas yang telah dilakukan SKAI selama tahun 2021, antara lain:

i. Melakukan post audit monitoring atas temuan SKAI serta menyampaikannya ke Auditee (Divisi maupun Cabang) untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.

ii. Audit Umum dan Audit Khusus
Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja, baik Divisi di Kantor Pusat maupun cabang-cabang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja audit Intern tahunan.

iii. Audit dan Independent Review Bidang Teknologi Informasi.

iv. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada karyawan tentang penguatan sistem pengendalian Intern dan anti *fraud awareness* melalui forum sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit *(exit meeting audit)*. Dalam hal ini SKAI mengembangkan peran *consultative* kepada *auditee* melalui komunikasi yang efektif dalam membahas temuan audit, sehingga auditee dapat memahami risiko-risiko dari defisiensi/penyimpangan yang terjadi.

v. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian Internal Bank Victoria Syariah dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain:

- Bersinergi dengan Pengendalian Internal yang ditempatkan di Kantor Pusat sebagai bagian dari pilar early warning system.
- Menjadi fasilitator *(liaison officer)* pelaksanaan audit ektern oleh OJK.

f Tim Anti-*Fraud*

Dalam rangka menunjang penerapan pengendalian Intern di Bank Victoria Syariah, manajemen membentuk Tim Anti-Fraud (TAF) dimana SKAI turut mengambil peranan strategis, yaitu sebagai ketua TAF dan beranggotakan Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Unit Kerja Pengendalian Internal dan Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI).

Adapun yang melatar belakangi dibentuknya Tim Anti-Fraud adalah sebagai berikut:

i. Penguatan sistem pengendalian Intern Bank Victoria Syariah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.

ii. Terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti-*Fraud*.

iii. Mengarahkan Bank Victoria Syariah dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

Strategi anti-fraud yang diterapkan di Bank Victoria Syariah didasarkan pada 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

i. Pencegahan
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti-*fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

ii. Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing,* surprise audit, dan *surveillance system*.

iii. Investigasi, pelaporan, dan sanksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.

iv. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian Fraud serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud serta mekanisme tindak lanjut.

g Kaji Ulang Pelaksanaan Audit SKAI

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, SKAI Bank Victoria

Syariah diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (review) pihak ekstern yang independen yaitu memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB. SKAI Bank Victoria Syariah telah melakukan kaji ulang 3 (tiga) tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Ishak, Saleh, Soewono dan Rekan periode Januari 2017 s/d Juni 2020.

Penyimpangan dan Fraud Internal

Selama tahun 2022, tidak terdapat kasus kejadian fraud.

MANAJEMEN RESIKO

Bank berpotensi menghadapi risiko yang meningkat dan kompleks yang disebabkan oleh dinamika perkembangan dan tuntutan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk mengatasi risiko tersebut, bank perlu memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang terjadi dan memaksimalkan peluang yang ada. Untuk itu, diperlukan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi dengan eficiensin pada aspek pengendalian internal.

Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan mengacu kepada *best practices* yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Pengendalian risiko secara *first line of defense* yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan proses bisnis.
2. Pengendalian risiko secara *second line of defense* dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi manajemen risiko dan independen dari unit kerja yang melaksanakan proses bisnis.
3. Pengendalian risiko secara *third line of defense* dilakukan oleh SKAI guna memastikan kegiatan pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif.

Dengan adanya pengendalian risiko dalam tiga tahapan ini, diharapkan proses pelaksanaan tugas Bank khususnya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian termasuk prinsip syariah, prinsip tata kelola yang baik, dan memperoleh hasil yang optimal terhadap kinerja serta keuangan.

Untuk pengelolaan risiko, Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup hal sebagai berikut:

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang diatur pada Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (board manual) serta Pedoman Tata Kerja DPS.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha bank Dalam penerapan manajemen risiko, bank perlu mempertimbangkan aspek legal dan regulasi yang berlaku. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa seluruh karyawan terlibat dalam proses manajemen risiko. di mana tujuan utama dari manajemen risiko adalah melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan operasional Bank Victoria Syariah (the Bank) sedapat mungkin dilaksanakan melalui satu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan bisnis Bank dan menjaga kepercayaan Nasabah serta stakeholders lainnya Dalam sistem pengelolaan risiko tersebut, Bank Victoria Syariah akan melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko secara terus-menerus, serta mampu menganalisa dan mengelola seluruh risiko yang terkait.

Penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan *shareholder value*, Hal ini karena manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengurangi kerugian dan meningkatkan keuntungan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi.

Penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang disusun berdasarkan POJK No.65/POJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

i. Efektivitas dari penerapan manajemen risiko di Bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam upaya melakukan pengawasan serta mitigasi risiko secara aktif maka Dewan Komisaris dan Direksi dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

ii. Rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko yang diadakan secara berkala dengan menggunakan aplikasi virtual meeting guna membahas laporan profil risiko yang dibuat oleh Unit Kerja Analis Risiko mengenai hasil penilaian Bank terhadap profil risiko yang dihadapi, yang mana hal ini dapat mendukung Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam menjalankan visi, misi dan strategi bisnisnya, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang efektif, yaitu:

i. Kebijakan dan prosedur sudah dilengkapi dengan limit risiko untuk setiap jenis risiko yang dihadapi Bank dan dievaluasi secara berkala. Strategi manajemen risiko yang dibuat oleh Bank dibuat berdasarkan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil.

ii. Penetapan limit dilakukan secara komperehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan dan limit per risiko.

iii. Bank pun telah mengembangkan Kebijakan Dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan TI dengan menambahkan mengenai Pengelolaan Keberlangsungan Dan Pemulihan Usaha *(Business Continuity Dan Disaster Recovery Management)*.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh sumber risiko yang ada dan potensial pada produk dan aktivitas Bank termasuk risiko dari produk dan aktivitas baru.

Prinsip pengidentifikasian risiko adalah sebagai berikut:

i. Bersifat proaktif.
ii. Mencakup seluruh aktifitas fungsional.
iii. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
iv. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta dampaknya.

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko guna memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

Metode pengukuran menggunakan metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

rangka penilaian risiko dan perhitungan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

Pemantauan dilakukan oleh Unit Kerja Analis Risiko terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi serta memantau posisi/eksposur risiko.

Pelaporan Bank mengenai laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK dan Laporan Profil Risiko memuat substansi yang sama dengan laporan yang disampaikan kepada Direksi dan Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko.

Pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang dapat diterima.

Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dikembangkan Bank untuk kebutuhan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan volume eksposur risiko dan kemampuan sistem, sehingga Bank dapat mengukur eksposur risiko secara akurat, informatif dan tepat waktu.

PENGENDALIAN INTERNAL

Pelaksanaan sistem pengendalian internal bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional bank. Sangat penting untuk memastikan setiap satuan kerja operasional menjaga sistem pengendalian internal yang baik, dan satuan kerja internal audit.

Dalam melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif, organisasi perlu memperhatikan beberapa faktor seperti pengawasan yang ketat, pemisahan tugas yang jelas, dan penerapan kebijakan dan prosedur yang terstandarisasi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan karyawan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. dalam penerapan manajemen risiko, Bank mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di mana penerapan prinsip pemisahan fungsi *(four eyes principle)* harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

Unit Kerja Pengendalian Internal dibawah kendali Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara langsung berfungsi sebagai salah satu "*second line of defense*" yang independen dalam melaksanakan evaluasi terhadap kontrol secara harian yang sudah *"built in"* dalam setiap proses operasional Bank dalam rangka mendukung pencapaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan pengelolaan manajemen risiko yang sesuai peraturan otoritas guna pencapaian Visi dan Misi Bank. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kerja Pengendalian Internal juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses operasional Bank yang dianggap kurang efektif dan efisien serta memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.

Aktivitas pengendalian internal *(Internal Control)* Bank telah sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.5/22/DPNP, Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum, yang mana penerapannya dievaluasi oleh Unit Kerja Pengendalian Internal antara lain mencakup:

a. Melakukan pengendalian atau fungsi assurance terhadap aktivitas dan risiko operasional Bank secara independen untuk memastikan transaksi telah sesuai Peraturan Otoritas, Kebijakan dan Prosedur Internal Bank termasuk didalamnya penerapan Prinsip Syariah serta menilai kekuatan & kepatuhan terhadap pelaksanaan yang sesuai ketentuan..
b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas internal control pada setiap unit kerja.
c. Melakukan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko di cabang-cabang.

Dan selama tahun 2022 Unit Kerja Pengendaliaan Internal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaporkan hasil pemeriksaan setiap bulan terhadap:

   i. Bidang Operasional, yang meliputi:
   - Aktivitas di seluruh kantor cabang, yaitu: *cash count, stock opname*, review dan monitoring pembukaan dan penutupan rekening dan transaksi harian.
   - Melakukan monitoring terhadap rekening pasif *(dormant account).*
   - Pemeriksaan operasional unit kerja di Kantor Pusat.
   - Monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, antara lain pelaksanaan dual control, pengelolaan user ID, pengelolaan e-mail korporasi, pemenuhan prosedur terkait APU-PPT, penerapan prinsip syariah, kelengkapan dan pemeliharaan infrastuktur pendukung, pengarsipan dan pengembangan karyawan.

   ii. Bidang Pembiayaan, yang meliputi:
   - Melakukan monitoring terhadap pemenuhan dokumen.
   - Melakukan monitoring terhadap sebagian aktivitas saat inisiasi pembiayaan.
   - Melakukan monitoring terhadap kualitas pembiayaan
   - Melakukan monitoring terhadap pembiayaan restrukturisasi terdampak covid-19
   - Melakukan monitoring terhadap kewajiban *maintenance* setelah pencairan pembiayaan.

b. Melaporkan hasil tindak lanjut komitmen unit kerja Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik dan Satuan Kerja Audit Internal.
c. Melaksanakan *sharing session* yang bertujuan untuk meningkatkan *risk awareness* dari setiap karyawan
d. Memastikan Bank melaksanakan protokol kesehatan dan mekanisme bekerja *work from home* (WFH) guna menekan penyebaran virus covid-19 sesuai ketentuan dari otoritas.

Laporan *Self Assessment* Manajemen Risiko Tahun 2022

Gambaran Umum Manajemen Risiko

Manajemen Risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank. sehingga Bank dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi dampaknya. Manajemen Risiko menentukan proses pengambilan keputusan dalam operasional bank. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka Bank Victoria Syariah menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan eksposur risiko diseluruh lini organisasi.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, diperlukan pemahaman yang baik terhadap risiko yang mungkin terjadi di dalam organisasi. Selain itu, perlu juga adanya komitmen dari seluruh pihak dalam organisasi untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten dan terus-menerus. Bank Victoria Syariah membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan, dan ketentuan lain yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha,

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Manajemen Risiko di Bank Victoria Syariah, didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan.

lainnya yang terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.

Unit Kerja Analis Risiko di Bank Victoria Syariah merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap unit bisnis maupun terhadap unit satuan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

audit internal. Namun ketiga unit tersebut saling berkitan dan berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai *first line, second line dan third line of defense*. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu atau mengabaikan unit operasional kerja lainnya.

Meningkatkan Peran Manajemen Risiko

Kegiatan usaha perbankan syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan dan eksternal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Dalam hal ini perbankan syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah serta sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh serta Otoritas Jasa Keuangan serta sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFBS).

Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi dan inovasi produk serta aktivitas perbankan syariah telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan maupun kepemilikan yang menyebabkan mening-katnya risiko.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Victoria Syariah memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Melalui penerapan manajemen risiko yang menyeluruh, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko secara lebih baik dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* serta toleransi risiko *(risk tolerance)* sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Bank.

Penerapan kerangka manajemen risiko dilakukan antara lain melalui organisasi yang terstruktur, penerapan kerangka manajemen risiko juga melibatkan identifikasi, evaluasi, serangkaian prosedur dan metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risiko-risiko yang sudah ada maupun yang mungkin akan timbul.

Struktur manajemen risiko menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi unit-unit organisasi serta elemen penting dalam memastikan kecukupan dan kualitas Sumber Daya Insani untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Dalam struktur manajemen risiko, terdapat tahapan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang harus dilakukan secara sistematis. Hal ini akan membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko yang muncul.

Unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern dan unit kerja manajemen risiko, independen terhadap unit kerja operasional maupun bisnis. Kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat risiko yang akan timbul, serta pengalaman dan keahlian personel yang menangani.

Bank Victoria Syariah mengembangkan kebijakan manajemen risiko sebagai arahan tertulis dalam penerapan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis dimana penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait. Kebijakan dan prosedurnya didesain dan di implementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan komplesitas kegiatan usaha, *risk appetite, risk tolerance*, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Secara konsisten Bank Victoria Syariah memperbaiki kebijakan, menyempurnakan prosedur dan menyesuaikan batas tolerasi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dan profitabilitas usaha, serta menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Victoria Syariah dan induk perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko bank mengacu pada POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan ketentuan terkait risiko lainnya serta best practice penerapan manajemen risiko perbankan. Bank mengelola 10 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hokum, risiko reputasu, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko imbal hasil.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis maka Bank harus meningkatkan pula monitoring atas risiko-risiko yang ada dan selalu dijaga serta disempurnakan agar lebih baik dan dapat memberikan mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul.

Penerapan atas Manajemen Risiko yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko (KKMR) secara berkala.

b. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas dan kegiatan bisnis Bank.

c. Membuat kajian Manajemen Risiko terkait dengan produk dan aktifitas baru.

d. Melakukan evaluasi tentang hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan apakah sudah dilakukan dengan efektif.

e. Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala dengan menggunakan pendekatan Risiko *(Risk-based Bank Rating*/RBBR), dengan cakupan penilaian meliputi factor-faktor sebagai berikut:
   - Profil Risiko *(Risk Profile)*
   - Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
   - Aspek Rentabilitas *(Earnings)* dan
   - Pemenuhan Permodalan (Capital)

   Untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dan menyempurnakan Identifikasi Risiko dalam Laporan Profil Risiko maupun laporan Tingkat Kesehatan Bank agar lebih akurat sehingga dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi yang lebih cepat dan lebih baik.

f. Meningkatkan Budaya Risiko pada seluruh jajaran organisasi (risk taking unit) dan setiap aspek kegiatan operasional Bank antara lain melalui rapat-rapat dimasing-masing unit kerja dan dalam pengambilan keputusan bisnis.

g. Mengikutsertakan jajaran Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif Bank dan karyawan untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Program Sertifikasi Manajemen Risiko termasuk Refreshment Program.

h. Meningkatkan peran Unit Kerja Independen (satuan Kerja Audit Intern, Satuan kerja Riviu Pembiayaan, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Analis Risko dan Unit Pengendalian Internal) dalam rangka memperbaiki fungsi pengendalian intern.

i. Mempertimbangkan hasil kajian oleh Unit Kerja Analis Risiko dan Opini Kepatuhan dalam proses usulan penyediaan dana Tresuri dan pembiayaan untuk jumlah tertentu.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Manajemen Risiko pada aktivitas fungsional Bank Victoria Syariah meliputi atas 10 (sepuluh) jenis risiko sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. **RISIKO KREDIT**

   Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada

Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit dilakukan secara terintegrasi oleh unit bisnis, unit operasional, dan unit risiko kredit yang dalam pelaksanaannya didukung oleh system yang terintegrasi dan dilakukan secara *end to end*.

Key Risk Indicator yang digunakan dalam risiko kredit adalah sebagai berikut:

a. Kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan *Non Performing Financing* (NPF).
b. Kualitas penyediaan dana dan besarnya coverage yang dibentuk, pembiayaan yang direstrukturisasi.
c. Tingkat konsentrasi pembiayaan.
d. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana.
e. Faktor eksternal.

2. RISIKO PASAR

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan ahrga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Key Risk Indicator untuk risiko pasar adalah sebagai berikut:

a. Perubahan nilai tukar.
b. Cover risiko atas transaksi valuta asing dengan menggunakan metode pengukuran *Value at Risk* (VaR).
c. Penilaian volume dan komposisi portofolio.
d. Potensial kerugian (potensial loss) dari risiko Benchmark Suku Bunga dalam Banking Book (RBBR) Strategi dan Kebijakan Bisnis.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Key Risk Indicator untuk risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

a. Kecukupan rasio *Secondary Reserve*
b. Tingkat Financing to Deposit Ratio
c. Komposisi dari Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif.
d. Konsentrasi dari aset dan kewajiban.
e. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan.
f. Alses pada sumber-sumber pendanaan.

4. RISIKO OPERASIONAL

Adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Bank melakukan manajemen risiko operasional yang efektif agar dapat menekan kerugian akibat risiko operasional.

Key Risk Indicator untuk risiko operasional adalah sebagai berikut:

a. *Self assessment* terhadap potensi risiko perusahaan.
b. Kerugian aktual akibat risiko operasional.
c. Karakteristik dan kompleksitas bisnis.
d. Sumber daya insani.
e. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.
f. Kejadian fraud.
g. Kejadian eksternal.

5. RISIKO HUKUM

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat terjadi diseluruh aspek transaksi dan operasional yang ada di Bank Victoria Syariah, termasuk pula perjanjian yang dilakukan nasabah maupun pihak lain yang dapat berdampak terhadap risiko-risiko lain antara lain risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko reputasi maupun risiko likuiditas.

Key Risk Indicator untuk risiko hukum adalah sebagai berikut:

a. Besarnya gugatan pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan kerugian bank.
b. Faktor litigasi.
c. Faktor kelemahan perikatan.
d. Faktor ketiadaan/ perubahan perundang-undangan.

6. RISIKO REPUTASI

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi dapat berdampak pada kinerja keuangan bank dan mempengaruhi kemampuan bank untuk mempertahankan nasabah serta menarik nasabah baru. Oleh karena itu, manajemen risiko reputasi perlu menjadi fokus utama bagi bank dalam menjaga kepercayaan *stakeholder*. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasinya serta memberikan informasi yang jelas dan terpercaya kepada *stakeholder*.

Selain itu, bank juga dapat memperkuat hubungan dengan stakeholder melalui program-program CSR yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Program CSR yang berkelanjutan dapat meningkatkan citra positif bank di mata masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi *stakeholder*, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan memperkuat keberlanjutan lingkungan. Cakupan risiko reputasi cukup luas dan tidak terbatas hanya pada reputasi dari sebuah bank saja, namun dapat memicu risiko lainnya bahkan risiko reputasi dapat berdampak pada munculnya risiko lainnya. Risiko reputasi pun dapat mempengaruhi kinerja sektor industri perbankan secara menyeluruh. Kejadian risiko mungkin terjadi hanya pada satu bank yang pengendalian risikonya tidak memadai, selanjutnya reputasi dari masing-masing produk atau sektor dapat mempengaruhi keeseluruhan industri perbankan.

Key Risk Indicator adalah untuk risiko reputasi adalah sebagai berikut:

a. Pemberitaan negative di media massa
b. Pengaruh reputasi negative dari pemilik bank dan perusahaan terkait
c. Pelanggaran etika bisnis
d. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank
e. Frekuensi materialitas dan eksposur pemberitaan negative
f. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

7. RISIKO STRATEGIS

Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada kinerja bisnis dan keberlangsungan bank.

Manajemen risiko strategis harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Manajemen Risiko Strategis dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan strategis *(planning and budgeting)* yang mencakup penyelarasan strategi perusahaan.

Key Risk Indicator untuk risiko stratejik adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis.
b. Strategi berisiko tinggi dan Strategi berisiko rendah.
c. Posisi Bisnis Bank.
d. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)

8. RISIKO KEPATUHAN

Adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

Pada praktiknya, aktivitas bisnis Bank terkait dengan banyak peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah, Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).

Key Risk Indicator untuk risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan.
b. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan
c. Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

9. RISIKO IMBAL HASIL *(RATE OF RETURN RISK)*

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, Risiko ini dapat mempengaruhi nilai investasi dan laba yang diharapkan oleh nasabah. Untuk mengurangi risiko ini, nasabah perlu mempertimbangkan diversifikasi portofolio investasi mereka. karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah pana pihak Bank.

Key Risk Indicator untuk risiko imbal hasil adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Dana Pihak Ketiga
b. Strategi dan kinerja Bank dalam menghasilkan Laba/pendapatan
c. Perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga

10. RISIKO INVESTASI *(EQUITY INVESTMENT RISK)*

Adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing.*

Key Risk Indicator untuk risiko investasi adalah sebagai berikut:

a. Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil
b. Kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil.
c. Faktor eksternal

Proses pengidentifikasian risiko-risiko yang melekat (risiko inheren) dilakukan oleh unit kerja terkait/*risk taking* unit dan unit kerja Analis RIsiko. Identifikasi risiko-risiko tersebut terus dilakukan dan disempurnakan bersama-sama dengan penentuan limit/*risk appetite* dan penghitungan bobot untuk masing-masing risiko dan dibicarakan dalam rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko sehingga dapat lebih menggambarkan profil Risiko Bank yang sebenarnya.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko diterapkan dengan gambaran sebagai berikut:

A. TATA KELOLA RISIKO

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah di Bank Victoria Syariah telah melaksanakan pengawasan aktif, antara lain:

i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui komite yang berada dibawahnya, yaitu Komite Audit *(Audit Committee)* yang membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal, pengawasan yang berkaitan dengan pelaporan auditor internal dan eksternal; Komite Pemantau Risiko *(Risk Monitoring Committee)*, yang membantu dalam mengawasi kebijakan remunerasi dan nominasi.

ii. Pengawasan aktif Direksi melalui rapat Direksi yang dilakukan secara rutin, melalui rapat-rapat Direksi dan rapat Komite yang berada dibawah Dewan Direksi, yaitu Komite Aset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara *(Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management*/ALSYCO), Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Sanksi dan Personalia. Selain itu, Pengawasan aktif Direksi mencakup pula pengawasan terhadap hasil pemeriksaaan oleh Unit Kerja Pengendalian Internal atas risiko operasional yang terjadi pada unit-unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

iii. Cabang
Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memastikan bahwa transaksi dan operasional Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Bank terkait dengan pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk di dalam tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain memberikan arahan dan masukan dari sisi kesesuaian terhadap prinsip syariah untuk produk dan aktivitas baru serta melakukan pengawasan dan *check on the spot* secara sampling atas penerapan prinsip syariah pada unit-unit bisnis, operasional maupun cabang. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum didukung oleh fatwa.

b. Kerangka Manajemen Risiko Dalam Bentuk Kebijakan, Prosedur, Maupun Limit

Bank telah menyusun ketentuan internal mengenai manajemen risiko, pembiayaan, opersional, pasar, likuiditas, serta prosedur terkait dengan prosedur dan produk peroduk pembiayaan per segmen bisnis dan kegiatan operasional Bank lainnya. Ketentuan Internal Bank Victoria Syariah disusun berdasarkan hierarki yang terdiri dari level kebijakan dan prosedur, dimana kebijakan mengatur hal-hal yang bersifat high level sementara prosedur mengatur hal-hal yang lebih bersifat teknis.

Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait, termasuk didalamnya unit analis risiko, kepatuhan, legal dan internal audit.

Dalam pembiayaan, Bank memperhatikan bahwa pembiayaan kepada satu group usaha nasabah tidak melebihi Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga memastikan bahwa transaksi dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan, maka Bank meng-implementasikan limit terkait dengan pembutusan pembiayaan, operasional secara berjenjang untuk mencegah terjadinya konsentrasi pemutusan pada satu level tertentu saja.

c. Proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kecukupan system informasi manajemen riisko.

Hal-hal yang dilakukan terkait dengan aktivias ini antara lain:

i. Melakukan analisis risiko inheren atas setiap produk dan aktivitas Bank yang dilakukan oleh masing-masing pemilik produk dan selanjutnya dikaji antara lain oleh unit manajemen risiko, kepatuhan dan legal.

ii. Melakukan penilaian profil risiko secara berkala atas 10 (sepuluh) jenis risiko dan melaporkannya kepada manajemen dan Otoritas Jasa Keuangan. Metodologi atas penilaian profil risiko dikaji dan dikembangkan secara berkala.

iii. Proses rekrutmen pegawai secara selektif.

iv. Peningkatan kualitas SDI secara berkelanjutan melalui pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan rencana pelatihan dan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai.

v. Secara aktif melakukan sosialisasi dan sharing session, baik karyawan *front-end, back office* dan karyawan Kantor Pusat Non Operasional, yang

mendukung peningkatan kompetensi pegawai serta peningkatan pengetahuan pegawai mengenai proses operasional Bank.

vi. Melakukan penilaian kinerja portofolio pembiayaan secara berkala oleh unit bisnis dan unit support bisnis *(reviewer)* untuk seluruh segmen pembiayaan.

d. Kecukupan system pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit Internal Audit dan *Anti Fraud Team* serta independent review yang dilakukan oleh auditor eksternal dan juga pihak konsultan.

Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan audit secara berkala dan atau melakukan audit khusus atas permasalahan yang muncul di Bank. Audit internal bertujuan untuk memastikan bahwa Bank menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta menemukan potensi risiko yang dapat membahayakan kinerja Bank. Hasil audit internal akan menjadi dasar bagi manajemen Bank untuk mengambil tindakan perbaikan dan pengendalian atas masalah yang ditemukan.

Laporan audit tersebut disampaikan kepada manajemen untuk dapat ditindaklanjuti segera dan disampaikan kepada Unit Kerja Analis Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kualitas manajemen risiko dan pengembangan kebijakan serta prosedur terkait Untuk beberapa kasus tertentu, audit dapat dilakukan oleh audit eksternal berdasarkan persetujuan manajemen, sehingga diperoleh penilaian yang independen dari pihak lain di luar bank.

Bank telah memiliki Unit Kerja Anti *Fraud* yang berkoordinasi erat dengan unit internal audit atas permasalahan dan kasus yang muncul. Unit Kerja Anti *Fraud* bertanggung jawab untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kecurangan di dalam bank serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dan regulator terkait. Bersama dengan team dari Divisi Sumber Daya Insani, telah dibentuk Komite Sanksi yang memberikan pandangan yang komprehensif atas permasalahan atau kasus yang perlu diselesaikan. Unit Kerja Anti *Fraud* melaporkan tindak lanjutnya secara berkala kepada manajemen dan/atau Direktur Utama.

PENILAIAN PROFIL RISIKO

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank. Dengan informasi tersebut, bank dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola risiko dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap kinerja keuangan dan reputasi bank. Selain itu, penilaian profil risiko juga membantu bank dalam memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko *inheren* dan efektifitas kualitas penerapan manajemen risiko.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Selama tahun 2022, Bank telah melakukan *self assessment* terhadap penilaian profil risiko. Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, Bank akan melakukan tindakan perbaikan dan penguatan pada area yang dinilai perlu untuk meningkatkan profil risiko Bank. Peringkat komposit profil risiko Bank Victoria Syariah adalah 2 atau *low to moderate*, dengan penilaian *risc Inheren* adalah komposit 2 atau *low to moderate,* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank adalah Komposit 2 atau *satisfactory.*

Hasil Penilaian masing-masing jenis risiko pada periode 2022 yang dilakukan secara self assessment adalah :

No.	Jenis Risiko	Semester II-2022						Semester I-2022					
		Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)		Tingkat Risiko Komposit		Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)		Tingkat Risiko Komposit	
1	Risiko Kredit	3	Moderate	3	Fair	3	Moderate	3	Moderate	3	Fair	3	Moderate
2	Risiko Pasar	2	Low to moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate	1	Low	2	Satisfactory	1	Low
3	Risiko Likuiditas	2	Low to moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate	3	Moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate
4	Risiko Operasional	2	Low to moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate	2	Low to moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate
5	Risiko Hukum	2	Low to moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate	2	Low to moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate
6	Risiko Strategis	3	Moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate	3	Moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate
7	Risiko Kepatuhan	2	Low to moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate	1	Low	2	Satisfactory	1	Low
8	Risiko Reputasi	1	Low	2	Satisfactory	1	Low	1	Low	2	Satisfactory	1	Low
9	Risiko Imbal Hasil	3	Moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate	3	Moderate	2	Satisfactory	2	Low to moderate
10	Risiko Investasi	2	Low to Moderate	3	Fair	2	Low to Moderate	2	Low to Moderate	3	Low	2	Low to Moderate
Peringkat Komposit		**2**	**Low to Moderate**	**2**	**Satisfactory**	**2**	**Low to Moderate**	**2**	**Low to Moderate**	**2**	**Low to Moderate**	**2**	**Low to Moderate**

Konsolidasi dan Integrasi Manajemen Risiko dengan Perusahaan Induk sesuai dengan POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, serta dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk, Bank Victoria Syariah selaku perusahaan anak selalu mendukung konsolidasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh entitas utama yaitu PT Bank Victoria International, Tbk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pertemuan tahunan antara para pemegang saham dari sebuah perusahaan untuk membahas dan menyetujui rencana keuangan, strategi bisnis, serta memilih atau mengganti anggota dewan direksi. RUPS juga merupakan forum untuk para pemegang saham mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait kinerja perusahaan.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS Tahunan bertujuan untuk membahas laporan keuangan dan kinerja perusahaan selama satu tahun buku.

Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan Pemegang Saham dan atau Dewan Komisaris dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda RUPS Luar Biasa juga bermacam-macam tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya perubahan susunan Direksi dan Komisarisnya, perubahan nama dan tempat kedudukan, penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, dan lain-lain.

Sesuai Anggaran Dasar terakhir Bank Victoria Syariah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Swaguna (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UUPT No. 40/2007) No. 5 tanggal 06 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini, SH., MBA, Notaris di Jakarta, dalam RUPS Tahunan :

Direksi menyampaikan antara lain :

- Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 20.4 yang telah di telah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
- Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.4 padal 20 untuk mendapat pengesahan RUPS
- Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, Bank Victoria Syariah senantiasa berpedoman pada peraturan OJK dan Anggaran Dasar Bank, antara lain:

a. Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan/pertanyaan sesuai dengan Mata Acara Rapat.
b. Pemanggilan RUPS telah mencakup informasi mengenai tanggal penyelenggaraan, waktu dan tempat penyelenggaraan, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara RUPS dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
c. Pemegang Saham dapat melihat Pengumuman Pemanggilan RUPS melalui media masa.

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sepanjang tahun 2022 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, yaitu pada tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Victoria Syariah No. 52 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan telah diterima melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0030690 tanggal 8 Juli 2022

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Sepanjang tahun 2022 Bank telah menyelenggarakan 5 (lima) kali RUPS – LB yaitu sebagai berikut :

1. Berita acara RUPS LB No. 14 Juni 2022 No. 53 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan telah diterima melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0030690 tanggal 8 Juli 2022.
2. Berita Acara RUPS LB No. 60 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta , yang telah diberitahukan dan telah diterima melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0279515 tanggal 15 Agustus 2022.
3. Akta RUPS LB No. 106 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukimani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022.
4. Akta RUPS LB No. 13 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukimani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan telah diterima melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0331529 tanggal 23 Desember 22 dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093448.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022.
5. Akta Pernyataan RUPS LB No. 120 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukimani, SH, Notaris di Jakarta.

PERKARA HUKUM

Perkara hukum yang dihadapi Bank merupakan perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Gugatan dari nasabah yang merasa dirugikan oleh kebijakan atau produk yang ditawarkan oleh Bank. Dalam hal ini, Bank harus memastikan bahwa kegiatan usahanya selalu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Manajemen Bank bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi.

Permasalahan Hukum

Adapun Perkara Hukum Tahun 2022 sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	2022	
	Perdata	Pidana
PT Bank Victoria Syariah		
Telah selesai (Mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	5	2
Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Victoria Syarian	-	-
Telah selesai (Mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	**6**	**2**

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tugas dan Tanggung Jawab

i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi

kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Melakukan evaluasi Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).

ii. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

- **Struktur**

  Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 2 Juni 2022 No. 014A/DIR-SK/JKT/VI/2022 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Victoria Syariah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

  Ketua Komite : Retno Dwiyanti Widaningsih
  Anggota : Sari Idayanti
  Anggota : Lusy Rahmawati

- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

iii. Rapat Komite

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 16 (lima belas) kali. Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rekomendasi serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Sdr. Ahmad Yani sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah
2. Pengunduran Diri Bapak Achmad Friscantono sebagai Komisaris Utama
3. Rekomendasi serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Ibu Sari Idayanti sebagai Komisaris Utama
4. Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
5. Penelaahan terhadap jumlah karyawan pada setiap Divisi/Unit Kerja serta Penutupan Kantor Cabang dan Cabang Pembantu
6. Rekomendasi serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Yozef Abdulrachman sebagai Komisaris Independen
7. Pengunduran Diri Bapak Sugiharto sebagai Direktur Utama
8. Rekomendasi serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Misbahul Ulum sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
9. Rekomendasi serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I, MA, CHC sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
10. Rekomendasi serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Dery Januar sebagai Direktur Utama
11. Performance Direksi Posisi 30 Juni 2022
12. Rekomendasi serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Bapak Ruly Dwi Rahayu sebagai Direktur Kepatuhan
13. Pengunduran Diri Bapak Deddy Effendi Ridwan sebagai Direktur
14. Penunjukan Pejabat Sementara Penandatanganan Surat Kepada Pihak Eksternal
15. Pejabat Sementara Penandatanganan Surat Kepada Pihak Eksternal

KETERBUKAAN INFORMASI

Bank Victoria Syariah berupaya memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank Victoria Syariah, diantaranya melalui:

1. Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
2. Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank Victoria Syariah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank Victoria Syariah dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
3. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *(Annual Report)* Bank Victoria Syariah kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank Victoria Syariah.
4. Laporan Publikasi Triwulanan
5. Penyampaian Laporan *Good Corporate Governance (GCG)* kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank Victoria Syariah.
6. Menerapkan mekanisme pengaduan nasabah baik secara langsung di kantor Bank Victoria Syariah maupun melalui *Call Center* Bank Victoria Syariah, sedangkan terkait dengan penerapan strategi Anti Fraud telah diimplementasikan kebijakan *whistle blowing* melalui pelaporan email ke fungsi penganganan *Anti Fraud*.

Selain itu hal-hal yang dapat disampaikan terkait dengan pemenuhan aspek transparansi oleh Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Jenis dan jumlah remunerasi (gaji/honorarium, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama setahun adalah sebagai berikut:

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris
Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima oleh Dewan Komisaris (Kotor) Tahun 2022	
	Jumlah (Orang)	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji.bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentun non tunai)	3 *)	905
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) – dalam Rupiah		

Tabel Kategori Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi Per Orang Tahun 2022	Jumlah (Orang)
Diatas Rp. 2 miliar	
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	
Dibawah Rp 500 juta	3 *)
Total	**3 *)**

Catatan :

*) 1 Orang Komisaris an. Achmad Friscantono Mengundurkan Diri efektif tanggal 2 Juni 2022.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi
Total remunerasi Direksi selama tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima oleh Direksi (Kotor) Tahun 2022	
	Jumlah (Orang)	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji.bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentun non tunai)	5	2.949
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) – dalam Rupiah		

Tabel Kategori Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi Per Orang Tahun 2022	Jumlah (Orang)
Diatas Rp. 2 miliar	
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	3 *)
Dibawah Rp 500 juta	2 **)
Total	**5**

Catatan :

*) 1 Orang Direksi an. Sugiharto Mengundurkan Diri efektif tanggal 27 September 2022

**) 2 Orang Direksi an. Dery Januar & Ruly Dwi Rahayu Masuk tanggal 27 September 2022

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah
Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima oleh Dewan Pengawas Syariah (Kotor) Tahun 2022	
	Jumlah (Orang)	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji.bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentun non tunai)	5 *)	239
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) – dalam Rupiah		

Tabel Kategori Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi Per Orang Tahun 2022	Jumlah (Orang)
Diatas Rp. 2 miliar	
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	
Dibawah Rp 500 juta	5 *)
Total	**5**

Catatan :

*yang diterima secara tunai

*) 1 Orang DPS an. Hasanuddin Meninggal Dunia tanggal 10 Februari 2022
1 Orang DPS an. Ahmad Yani Batal Bergabung, Juni 2022
1 Orang DPS an. Marsudi Syuhud Batal Bergabung, Juli 2022
2 Orang DPS an. Misbahul Ulum & Syarif Hidayatullah Masuk tanggal 22 Agustus 2022

a. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji merupakan bayaran yang diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam bentuk uang. Gaji dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, pengalaman, kualifikasi, dan lokasi geografis di mana seseorang bekerja. hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Tabel Rasio Gaji Pegawai

No.	Jenis Remunerasi Per Orang Tahun 2022	Jumlah (Orang)
1	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	7 : 1
2	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	3 : 1
3	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2 : 1

bank victoria Syariah

Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Victoria Syariah Tahun Buku 2022 ini telah memuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan Tahunan Perusahaan. Laporan Tahunan PT Bank Victoria Syariah ini juga memuat Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2023

Dewan Komisaris

Sari Idayanti
Komisaris Utama

Retno Dwiyanti Widaningsih
Komisaris Independen

Direksi

Dery Januar
Direktur Utama*

Andy Sundoro
Direktur

Ruly Dwi Rahayu
Direktur Kepatuhan*

*** Menunggu persetujuan Fit & Proper Test OJK**
Dan telah dinyatakan lulus Fit & Proper OJK pada tanggal 13 Januari 2023 sesuai dengan Surat Nomor SR-15/PB.101/2023

Halaman ini Sengaja dikosongkan

06

LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini Sengaja dikosongkan

PT Bank Victoria Syariah

Laporan Keuangan/
Financial Statements
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020/
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

PT BANK VICTORIA SYARIAH
DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS*

	Halaman/ *Page*
Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditors' Report*	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020/ *The Directors' Statement on the Responsibility for Financial Statements of PT Bank Victoria Syariah for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020*	
LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020/ ***FINANCIAL STATEMENTS*** *– For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020*	
Laporan Posisi Keuangan/*Statements of Financial Position*	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	3
Laporan Perubahan Ekuitas/*Statements of Changes in Equity*	4
Laporan Arus Kas/*Statements of Cash Flows*	5
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil/*Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*	7
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/*Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds*	8
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/*Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds*	9
Catatan atas Laporan Keuangan/*Notes to Financial Statements*	10

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Business License No. 1353/KM.1/2016
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman. Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T +62-21-570 8111
F +62-21-572 2737

MOORE

Laporan Auditor Independen

No. 00477/2.1090/AU.4/07/0148-2/1/IV/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Bank Victoria Syariah

Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah (Bank), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Bank terlampir. Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan tersebut.

Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan, manajemen Bank masih dalam proses verifikasi dan validasi atas temuan terkait operasional di salah satu cabang Bank yang telah ditutup pada tahun 2022. Oleh karena itu, sampai dengan tanggal laporan kami, manajemen masih belum dapat memastikan atas dampak dari temuan ini dan tidak dapat menentukan jumlah penyesuaian yang diperlukan dalam laporan keuangan sebagai akibat dari temuan tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report

No. 00477/2.1090/AU.4/07/0148-2/1/IV/2023

The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors
PT Bank Victoria Syariah

Disclaimer of Opinion

We were engaged to audit the financial statements of PT Bank Victoria Syariah (the Bank), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakah funds, and statement of sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

We do not express an opinion on the accompanying financial statements of the Bank. Because of the significance of the matter described in the Basis for Disclaimer of Opinion paragraph of our report, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these financial statements.

Basis for Disclaimer of Opinion

As disclosed in Note 43 to the financial statements, the Bank's management is still in the process of verification and validation of the operations related findings in one of the branches of the Bank which has been closed in 2022. Accordingly, as of the date of our report, the management is still uncertain as to the impact of these findings and unable to determine the amount of any necessary adjustments in the financial statements as a consequence of these findings.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Bank berdasarkan pelaksanaan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia untuk menerbitkan laporan auditor. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan ini.

Our responsibility is to conduct an audit of the Bank's financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Public Accountants and to issue an auditor's report. However, because of the matter described in the Basis for Disclaimer of Opinion paragraph of our report, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these financial statements.

Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.

MIRAWATI SENSI IDRIS

00477

Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148

10 April 2023/*April 10, 2023*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020

PT BANK VICTORIA SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : **DERY JANUAR**
   Alamat Kantor/*Office address* : Gedung Graha BIP Lt.5
   Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.23

   Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu identitas lain/*Residential Address/in accordance with Personal Identity Card* : Jl. Langgar No.26 Rt.001/Rw.003
   Kemirimuka – Beji
   Depok

   Nomor Telepon/*Telephone number* : (021) 5600467
   Jabatan/*Title* : Direktur Utama / *President Director*

2. Nama/*Name* : **ANDY SUNDORO**
   Alamat Kantor/*Office address* : Gedung Graha BIP Lt.5
   Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.23

   Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu identitas lain/*Residential Address/in accordance with Personal Identity Card* : Jl. Gelong Baru Selatan V/3
   RT 008/Rw 001 Tomang
   Grogol Petamburan - JAKARTA BARAT

   Nomor Telepon/*Telephone number* : (021) 5600467
   Jabatan/*Title* : Direktur / *Director*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020

PT BANK VICTORIA SYARIAH

We, the undersigned:

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020.

2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

bank victoria Syariah

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
   b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and
   b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

10 April 2023/April 10, 2023

METERAI TEMPEL
F2335AKX392775121

Dery Januar
Direktur Utama / *President Director*

Andy Sundoro
Direktur / *Director*

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Financial Position
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	2020	
ASET					**ASSETS**
Kas		714.174.700	1.244.540.400	1.817.587.900	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4	132.022.294.644	47.399.070.914	42.115.858.874	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	5	1.434.746.386	5.413.126.661	3.049.975.484	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	6	385.000.000.000	185.000.000.000	248.000.000.000	Placement with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek	7	898.054.961.500	538.031.907.777	712.683.346.578	Marketable securities
Piutang murabahah	8				Murabahah receivables
Pihak berelasi		29.928.946.309	377.417.478	538.282.509	Related parties
Pihak ketiga		117.981.735.245	215.041.670.758	219.865.468.373	Third parties
Jumlah		147.910.681.554	215.419.088.236	220.403.750.882	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(907.499.800)	(4.105.542.353)	(1.930.888.246)	Less: Allowance for impairment losses
Piutang murabahah - bersih		147.003.181.754	211.313.545.883	218.472.862.636	Murabahah receivables - net
Pembiayaan musyarakah	9				Musyarakah financing
Pihak berelasi		1.000.000.000	-	-	Related parties
Pihak ketiga		473.309.161.368	585.766.229.252	938.148.736.691	Third parties
Jumlah		474.309.161.368	585.766.229.252	938.148.736.691	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(5.267.004.531)	(43.597.815.269)	(24.225.247.850)	Less: Allowance for impairment losses
Pembiayaan musyarakah - bersih		469.042.156.837	542.168.413.983	913.923.488.841	Musyarakah financing - net
Pembiayaan mudharabah - pihak ketiga	10	532.552.184	4.099.239.339	6.816.777.400	Mudharabah financing - third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(26.627.609)	(3.049.770.615)	(241.801.769)	Less: Allowance for impairment losses
Pembiayaan mudharabah - bersih		505.924.575	1.049.468.724	6.574.975.631	Mudharabah financing – net
Piutang Ijarah		177.072.653	189.056.394	171.179.684	Ijarah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(3.375.493)	(17.876.710)	-	Less: Allowance for impairment losses
Piutang ijarah - bersih		173.697.160	171.179.684	171.179.684	Ijarah receivables - net
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	11	12.378.124.673	13.673.991.543	15.107.630.083	Revenue sharing receivables
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih		194.538.294	684.745.517	1.602.331.673	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham		29.468.550	29.468.550	29.468.550	Investments in shares
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(294.686)	(294.686)	(294.686)	Less: Allowance for impairment losses
Penyertaan saham - bersih		29.173.864	29.173.864	29.173.864	Investments in shares - net
Aset tetap	12	9.745.434.598	17.942.904.809	20.560.604.815	Property and equipment
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(8.102.285.026)	(13.412.950.553)	(12.255.317.961)	Less: Accumulated depreciation
Aset tetap - bersih		1.643.149.572	4.529.954.256	8.305.286.854	Property and equipment - net
Aset tak berwujud	13	8.113.086.070	8.029.836.070	7.874.836.070	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(7.497.016.432)	(7.025.630.748)	(6.044.689.580)	Less: Accumulated amortisation
Aset tak berwujud - bersih		616.069.638	1.004.205.322	1.830.146.490	Intangible assets - net
Biaya dibayar di muka	14	2.987.961.420	6.766.250.809	8.682.276.197	Prepaid expenses
Aset lain-lain	15	69.264.772.462	118.551.048.000	118.501.515.639	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(18.484.588.274)	(23.655.601.276)	(15.496.345.601)	Less: Allowance for impairment losses
Aset lain-lain - bersih		50.780.184.188	94.895.446.724	103.005.170.038	Other assets - net
Aset pajak tangguhan	35	8.249.737.700	7.474.316.788	10.655.395.013	Deferred tax assets
JUMLAH ASET		2.110.830.076.905	1.660.849.338.849	2.296.026.685.840	**TOTAL ASSETS**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Financial Position
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	2020	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS					**LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS' EQUITY**
LIABILITAS					**LIABILITIES**
Liabilitas segera - pihak ketiga	16	1.076.279.302	2.761.007.163	2.700.640.223	Liabilities immediately payable - third parties
Simpanan giro wadiah	17				Wadiah demand deposits
Pihak berelasi		21.923.260	31.131.867	31.569.251	Related parties
Pihak ketiga		22.089.065.500	12.899.204.180	251.313.294.465	Third parties
Jumlah		22.110.988.760	12.930.336.047	251.344.863.716	Total
Simpanan dari bank lain - pihak ketiga	18	225.000.000.000	42.000.000.000	260.000.000.000	Deposits from other banks - third parties
Bagi hasil yang belum dibagikan	19	899.723.225	1.293.574.768	4.805.984.900	Undistributed revenue sharing
Liabilitas sewa	20	1.598.237.029	3.772.307.075	8.028.813.492	Lease liabilities
Pendapatan ditangguhkan		682.027.324	751.220.202	949.506.640	Deferred income
Utang pajak	21	650.439.158	1.017.551.949	1.857.814.488	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		993.321.725	1.148.035.415	2.222.277.313	Other liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	34	2.577.425.818	3.720.787.299	5.377.421.352	Long term employment benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS		255.588.442.341	69.394.819.918	537.287.322.124	**TOTAL LIABILITIES**
DANA SYIRKAH TEMPORER	22				**TEMPORARY SYIRKAH FUNDS**
Giro mudharabah					Mudharabah demand deposits
Pihak berelasi		-	8.957.388	8.957.388	Related parties
Pihak ketiga		-	-	5.217.807	Third parties
Jumlah		-	8.957.388	14.175.195	Total
Tabungan mudharabah					Mudharabah saving deposits
Pihak berelasi		327.528.852	208.951.711	267.936.764	Related parties
Pihak ketiga		21.802.055.892	20.041.817.488	40.946.463.686	Third parties
Jumlah		22.129.584.744	20.250.769.199	41.214.400.450	Total
Deposito mudharabah					Mudharabah deposits
Pihak berelasi		3.010.000.000	3.075.000.000	2.655.000.000	Related parties
Pihak ketiga		769.169.740.866	1.207.157.585.601	1.335.298.785.605	Third parties
Jumlah		772.179.740.866	1.210.232.585.601	1.337.953.785.605	Total
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		794.309.325.610	1.230.492.312.188	1.379.182.361.250	**TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS**
EKUITAS					**SHAREHOLDERS' EQUITY**
Modal saham					Share capital
Nilai nominal Rp 1.000 per saham, Modal dasar - 1.438.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, dan 1.000.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Modal ditempatkan dan disetor 1.060.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 360.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	23	1.060.000.000.000	360.000.000.000	360.000.000.000	Nominal value Rp 1,000 per share, Authorised - 1,438,000,000 shares in December 31, 2022 and 1,000,000,000 shares in December 31, 2021 and 2020, respectively issued and paid-up capital - 1,060,000,000 shares in December 31, 2022 and 360,000,000 shares in December 31, 2021 and 2020, respectively
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	7	(1.677.352.217)	291.218.780	23.328.255.294	Unrealised gain (loss) from changes in fair value of marketable securities measured through other comprehensive income - net
Saldo laba (defisit)					Retained earnings (deficit)
Telah ditentukan penggunaannya	24	9.156.165.256	9.156.165.256	9.156.165.256	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(6.546.504.085)	(8.485.177.293)	(12.927.418.084)	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		1.060.932.308.954	360.962.206.743	379.557.002.466	**TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		2.110.830.076.905	1.660.849.338.849	2.296.026.685.840	**TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDER'S EQUITY**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	2020	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					**OPERATING INCOME AND EXPENSES**
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	25				Income from fund management by Bank as mudharib
Pendapatan dari jual beli murabahah		11.317.593.834	20.816.881.122	18.470.603.254	Income from sales and purchases murabahah
Pendapatan dari bagi hasil:					Income from profit sharing:
Musyarakah		23.069.950.064	40.692.564.742	76.272.301.212	Musyarakah
Mudharabah		88.019.995	245.934.164	840.610.814	Mudharabah
Pendapatan dari ijarah - bersih		46.408.435	116.635.023	231.551.160	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya		41.960.460.916	51.946.343.892	52.935.110.779	Other main operating income
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		76.482.433.244	113.818.358.943	148.750.177.219	Total income from fund management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	26	(39.152.244.240)	(68.364.165.495)	(112.243.865.295)	Third parties' share on returns of temporary syirkah funds
Hak bagi hasil milik Bank		37.330.189.004	45.454.193.448	36.506.311.924	Bank's share in profit sharing
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA					**OTHER OPERATING INCOME**
Pendapatan operasional lainnya	27	21.291.074.255	27.887.773.511	15.969.591.869	Other operating income
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA					**OTHER OPERATING EXPENSES**
Beban umum dan administrasi	28	(12.899.465.983)	(17.423.697.956)	(18.398.612.511)	General and administrative expenses
Beban personalia	29	(16.650.202.450)	(21.684.819.738)	(24.427.215.327)	Personnel expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	30	(2.207.710.683)	(21.526.555.044)	(3.603.754.383)	Provision for impairment losses
Beban lainnya	31	(22.022.749.656)	(453.024.114)	(2.430.222.758)	Other expenses
Jumlah beban operasional lainnya		(53.780.128.772)	(61.088.096.852)	(48.859.804.979)	Total other operating expenses
LABA OPERASIONAL		4.841.134.487	12.253.870.107	3.616.098.814	**PROFIT FROM OPERATIONS**
PENGHASILAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH	32	2.047.667.815	1.049.309.706	(204.180.173)	**NON OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET**
LABA SEBELUM PAJAK		6.888.802.302	13.303.179.813	3.411.918.641	**PROFIT BEFORE TAX**
BEBAN PAJAK	35	1.775.725.016	8.783.098.401	3.626.535.374	**TAX EXPENSES**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		5.113.077.286	4.520.081.412	(214.616.733)	**PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					**OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)**
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will be reclassified subsequently to profit and loss
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah dampak pajak tangguhan	7,35	(1.968.570.997)	(23.037.036.514)	26.423.966.790	Unrealised gain (loss) from changes in fair value of marketable securities measured through other comprehensive income - net of tax
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - setelah dampak pajak tangguhan	34,35	(3.174.404.078)	(77.840.621)	(895.857.189)	Remeasurement of defined benefit liability - net of tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(29.897.789)	(18.594.795.723)	25.313.492.868	**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor/ *Issued and Paid up Capital Stock*	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - bersih/ *Unrealised Gain (Loss) from Changes in Fair Value of Marketable Securities Through Other Comprehensive Income - Net*	Saldo Laba (Defisit)/ *Retained Earnings (Deficit)* Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah Ekuitas/ *Shareholders' Equity*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		360.000.000.000	(3.095.711.496)	9.156.165.256	(11.816.944.162)	354.243.509.598
Penghasilan Komprehensif						
Rugi tahun berjalan		-	-	-	(214.616.733)	(214.616.733)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak tangguhan						
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	7	-	26.423.966.790	-	-	26.423.966.790
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	34,35	-	-	-	(895.857.189)	(895.857.189)
Jumlah penghasilan komprehensif		-	26.423.966.790	-	(1.110.473.922)	25.313.492.868
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		360.000.000.000	23.328.255.294	9.156.165.256	(12.927.418.084)	379.557.002.466
Penghasilan Komprehensif						
Laba tahun berjalan		-	-	-	4.520.081.412	4.520.081.412
Rugi komprehensif lain - setelah pajak tangguhan						
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	7	-	(23.037.036.514)	-	-	(23.037.036.514)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	34,35	-	-	-	(77.840.621)	(77.840.621)
Jumlah rugi komprehensif		-	(23.037.036.514)	-	4.442.240.791	(18.594.795.723)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		360.000.000.000	291.218.780	9.156.165.256	(8.485.177.293)	360.962.206.743
Penerbitan modal saham	23	700.000.000.000	-	-	-	700.000.000.000
Penghasilan Komprehensif						
Laba tahun berjalan		-	-	-	5.113.077.286	5.113.077.286
Rugi komprehensif lain - setelah pajak tangguhan						
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	7	-	(1.968.570.997)	-	-	(1.968.570.997)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	34,35	-	-	-	(3.174.404.078)	(3.174.404.078)
Jumlah rugi komprehensif		-	(1.968.570.997)	-	1.938.673.208	(29.897.789)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		1.060.000.000.000	-	9.156.165.256	(6.546.504.085)	1.060.932.308.954

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib:	11,25				Receipt of income from fund management by Bank as mudharib:
Penerimaan dari jual beli		14.077.830.488	19.090.159.898	17.631.710.150	Receipt from sales and purchases
Penerimaan dari pendapatan bagi hasil		23.157.970.059	40.938.498.905	77.112.912.026	Receipt from profit sharing income
Penerimaan dari pendapatan ijarah		58.079.936	116.635.023	231.551.160	Receipt from income ijarah
Penerimaan dari usaha lainnya:	11,25				Receipt from other main operating income:
Efek-efek syariah		33.988.957.385	46.742.441.328	48.068.320.259	Sharia marketable securities
Administrasi		1.059.467.883	767.242.151	1.411.182.212	Administration income
Giro dan penempatan pada bank lain		4.001.467.800	5.808.658.238	1.998.554.915	Current accounts and placement with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia		1.434.546.564	1.590.075.501	564.995.333	Placement with Bank Indonesia
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	20,26	(39.535.689.360)	(71.876.575.627)	(111.436.759.910)	Payment of profit sharing of temporary syirkah funds
Penerimaan operasional lainnya	27	18.254.553.917	1.665.038.460	1.070.502.849	Receipt from other operating income
Pembayaran beban operasional lainnya	31	(34.719.921.391)	(12.810.927.960)	(17.660.986.767)	Payment for other operating expenses
Pembayaran beban personalia	29	(21.863.312.748)	(23.441.249.460)	(25.122.499.845)	Payment for personnel expenses
Pembayaran pajak penghasilan	35	(289.073.837)	-	-	Payment for income tax
Penerimaan (pembayaran) pendapatan (beban) non operasional	31	1.573.921.994	854.368.844	(256.337.429)	Receipt (payment) for non operating income (expenses)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		1.198.798.690	9.444.365.301	(6.386.855.047)	Cash flows before chages in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi:					Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada bank indonesia	6	-	-	20.000.000.000	Placement with Bank Indonesia
Piutang murabahah	8	65.666.582.752	16.680.813.902	3.516.590.025	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	9	62.952.793.067	351.151.066.448	51.166.071.315	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	10	3.566.687.155	2.717.538.061	14.413.239.870	Mudharabah financing
Aset yang diperoleh untuk ijarah		747.028.716	1.295.217.455	2.345.476.527	Assets acquired for ijarah
Aset lainnya	15	53.076.528.812	1.848.616.020	5.627.605.370	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:					Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	16	(1.684.727.861)	60.366.940	1.134.570.134	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	17	9.180.652.713	(238.414.527.669)	228.050.209.457	Wadiah demand deposit
Simpanan dari bank lain	18	183.000.000.000	(218.000.000.000)	77.000.000.000	Deposit from other banks
Liabilitas lain-lain		(154.713.687)	(1.074.241.895)	1.591.491.402	Other liabilities
Utang pajak	21	(367.112.824)	(840.262.539)	(142.258.570)	Taxes payable
Dana syirkah temporer	22	(436.182.986.578)	(148.690.049.062)	(308.507.985.368)	Temporary syirkah funds
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(59.000.469.045)	(223.821.097.038)	89.808.155.115	**Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penjualan (pembelian) efek-efek diukur pada biaya perolehan	7	(360.023.053.722)	174.651.438.800	(1.862.361.549)	Sale (purchase) of marketable securities at cost
Penjualan (pembelian) efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7	1.659.386.565	(2.394.366.594)	47.272.781.205	Sale (purchase) of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Hasil penjualan aset tetap	12	475.450.000	198.300.000	90.245.000	Proceeds from sale of property and equipment
Perolehan aset tetap	12	(739.515.997)	(149.453.034)	(232.335.807)	Acquisition of property and equipment
Perolehan aset tak berwujud	13	(83.250.000)	(155.000.000)	(357.814.285)	Purchase of intangible assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(358.710.983.154)	172.150.919.172	44.910.514.564	**Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerbitan modal saham	23	700.000.000.000	-	-	Issuance of share capital
Pembayaran liabilitas sewa	20	(2.174.070.046)	(4.256.506.417)	(2.881.785.916)	Payment of lease liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		697.825.929.954	(4.256.506.417)	(2.881.785.916)	**Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		280.114.477.755	(55.926.684.283)	131.836.883.763	**NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		239.056.737.975	294.983.422.258	163.146.538.495	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		519.171.215.730	239.056.737.975	294.983.422.258	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	2020	
Kas dan setara kas terdiri dari:					Cash and cash equivalents consist of:
Kas		714.174.700	1.244.540.400	1.817.587.900	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4	132.022.294.644	47.399.070.914	42.115.858.874	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	5	1.434.746.386	5.413.126.661	3.049.975.484	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan	6	385.000.000.000	185.000.000.000	248.000.000.000	Placement with Bank Indonesia and other Bank with maturity three months or less from acquisition date
JUMLAH		519.171.215.730	239.056.737.975	294.983.422.258	TOTAL

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	2020	
Pendapatan usaha utama (akrual)	25				**Main operating income (accrual)**
Pendapatan dari jual beli		11.317.593.834	20.816.881.122	18.470.603.254	Income from sales and purchases
Pendapatan bagi hasil		23.157.970.059	40.938.498.906	77.112.912.026	Income from profit sharing
Pendapatan dari ijarah - bersih		46.408.435	116.635.023	231.551.160	Income from ijarah - net
Pendapatan efek-efek Syariah		35.464.998.669	43.505.598.810	48.747.088.486	Income from sharia marketable securities
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain		4.001.467.800	5.808.658.238	1.998.554.915	Current accounts and deposit with other banks income
Pendapatan bonus FASBIS		1.012.104.167	1.148.534.722	387.378.472	FASBIS bonus income
Pendapatan administrasi		1.059.447.883	767.242.151	1.411.182.212	Administration income
Pendapatan giro pada BI		422.442.397	441.540.779	177.616.861	Current account with BI income
Pendapatan SBIS		-	274.769.192	213.289.833	SBIS income
		76.482.433.244	113.818.358.943	148.750.177.219	
Pengurang					**Deductions**
Pendapatan periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:	11				Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:
Pendapatan bagi hasil murabahah yang akan diterima		507.451.983	3.267.688.637	1.739.253.851	Murabahah revenue sharing receivables
Pendapatan ijarah		-	11.671.501	11.671.501	Ijarah income
Pendapatan bagi hasil efek-efek		11.521.339.357	10.376.402.238	13.106.325.174	Revenue sharing marketable securities
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain		349.333.333	18.229.167	250.379.557	Revenue sharing placement with other banks
		12.378.124.673	13.673.991.543	15.107.630.083	
Penambah					**Additions**
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	11				Prior period income in which the cash were received during the current period:
Penerimaan pelunasan pendapatan bagi hasil murabahah		3.267.688.637	1.739.253.851	1.053.544.377	Receipt of settlement from murabahah margin income
Penerimaan pendapatan ijarah		11.671.501	11.671.501	11.671.501	Receipt of ijarah income
Pendapatan bagi hasil efek-efek		10.376.402.238	13.106.325.174	12.323.036.950	Revenue sharing marketable securities
Pendapatan bagi hasil penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		18.229.167	250.379.557	141.609.722	Revenue sharing placement with Bank Indonesia and other banks
		13.673.991.543	15.107.630.083	13.529.862.550	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		77.778.300.114	115.251.997.483	147.172.409.686	**Available income for revenue sharing**
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		38.626.075.876	46.887.831.988	34.928.544.391	Bank's share from revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	26	39.152.244.240	68.364.165.495	112.243.865.295	Owners' share from revenue sharing
Dirinci atas:					Details of:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		38.252.521.015	67.070.590.727	107.437.880.395	Fund owners' share on distributed revenue sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	19	899.723.225	1.293.574.768	4.805.984.900	Fund owners' share on undistributed revenue sharing
Jumlah		39.152.244.240	68.364.165.495	112.243.865.295	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	2021	2020	
Sumber Dana Zakat				**Sources of Zakah Funds**
Zakat dari pihak luar bank	-	-	164.190	Zakah from external banks
Lain- lain	9.498.395	9.979.582	15.889.669	Others
Jumlah	9.498.395	9.979.582	16.053.859	Subtotal
Penyaluran Dana Zakat				**Distribution of Zakah Funds**
BAZNAS	(10.551.979)	(25.650.000)	(15.000.008)	BAZNAS
Kenaikan (penurunan) dana zakat	(1.053.584)	(15.670.418)	1.053.851	Increase (decrease) in zakah funds
Dana zakat pada awal tahun	1.104.177	16.774.595	15.720.744	**Zakah funds at beginning of the year**
Dana zakat pada akhir tahun	50.593	1.104.177	16.774.595	**Zakah funds at end of the year**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	2021	2020	
Sumber Dana Kebajikan				**Sources of Benevolence Funds**
Infaq dan shadaqah	13.115.000	8.715.000	5.280.000	Infaq and shadaqah
Lainnya	167.585.974	361.797	77.186.495	Others
Jumlah	180.700.974	9.076.797	82.466.495	**Subtotal**
Penggunaan Dana Kebajikan				**Use of Benevolence Funds**
Sumbangan	(90.016.650)	(54.700.000)	(33.604.546)	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	(57.772.704)	Use for other public interest
Jumlah	(90.016.650)	(54.700.000)	(91.377.250)	**Subtotal**
Kenaikan (penurunan) Sumber Dana Kebajikan	90.684.324	(45.623.203)	(8.910.755)	Increase (decrease) in Benevolence Funds
Dana kebajikan pada awal tahun	15.638.112	61.261.315	70.172.070	**Benevolence funds at beginning of the year**
Dana kebajikan pada akhir tahun	106.322.436	15.638.112	61.261.315	**Benevolence funds at end of the year**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna) ("Bank") didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 dari Bebasa Daeng Lalo, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian Bank telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan No. 62 tanggal 24 Mei 1968.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 6 Desember 2022 dari Suwarni Sukiman, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dari Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp 1.438.000.000.000. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0259434.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022.

Perubahan kegiatan usaha bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank beroperasi dengan prinsip Syariah mulai tanggal 1 April 2010.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan kegiatan usaha Bank adalah menjalankan usaha bank dengan prinsip syariah. Bank merupakan bank non devisa.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Bank Victoria Syariah (formerly PT Bank Swaguna) ("Bank") was established based on Notarial Deed No. 9 dated April 15, 1966 of Bebasa Daeng Lalo, SH, a public notary in Jakarta. The Articles of Association was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. JA.5/79/5 dated November 7, 1967 and published in State of Gazette of Republic of Indonesia No. 42, Addendum No. 62 dated May 24, 1968.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on a Notary Deed No. 13 December 6, 2022 from Suwarni Sukiman, S.H., notary in Jakarta, regarding increase in authorized capital from Rp 1,000,000,000,000 to Rp 1,438,000,000,000. Amendments to the Articles of Association were approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0259434.AH.01.11. Year 2022 December 23, 2022.

The change of the Bank's operation from conventional Bank to Sharia bank was approved by Bank Indonesia based on the Decision Letter of Governor of Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 dated February 10, 2010. The Bank starts to operate based on sharia principle on April 1, 2010.

In line with article 3 of the Bank's Articles of Association, the aim and objective of the Bank is to provide banking services based on sharia principle. The Bank is a non-foreign exchange bank.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Gedung Graha BIP lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 yang juga merupakan Kantor Pusat Operasional dan Kantor Pusat Non Operasional. Bank memiliki kantor cabang di Tomang Jakarta pada tahun 2022 dan di Tomang Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Solo serta kantor cabang pembantu di Tangerang pada tahun 2021 dan 2020.

The Bank's Head Office is located in The Graha BIP 5th floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23 South Jakarta 12930 which is also the Operating Head Office and Non Operating Head Office. The Bank has branches in Tomang Jakarta in 2022, and Tomang Jakarta, Bekasi, Bandung, and Solo, and sub-branches in Tangerang in 2021 and 2020.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, susunan pengurus Bank adalah sebagai berikut:

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Bank's management consists of the following:

	2022	2021	2020	
Dewan Komisaris				**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Sari Idayanti	Achmad Friscantono	Achmad Friscantono	President Commissioner
Komisaris Independen	Retno Dwiyanti Widaningsih	Retno Dwiyanti Widaningsih	Retno Dwiyanti Widaningsih	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Drs. Yosef Abdurachman**)	Sari Idayanti	Sari Idayanti	Independent Commissioner
Direksi				**Board of Directors**
Direktur Utama	Dery Januar*)	Sugiharto	Sugiharto	President Director
Direktur	Andy Sundoro	Andy Sundoro	Deddy Effendi Ridwan	Director
Direktur Kepatuhan	Ruly Dwi Rahayu*)	Deddy Effendi Ridwan	Nurani Raswindrianti	Compliance Director
Direktur			Andy Sundoro	Director

*) Sudah mendapat persetujuan dari OJK per tanggal 26 Desember 2022
**) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

*) Approved by OJK as of December 26, 2022
**) Effective after obtaining OJK approval

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Sharia Supervisory as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022	2021	2020	
Ketua	H. Misbaul Ulum, Msi	Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA	Chairman
Anggota	DR. Syarif Hidayatullah S.Si, MA, CHC	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Member

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of Audit Committee as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022	2021	2020	
Ketua	Retno Dwiyanti Widaningsih	Retno Dwiyanti Widaningsih	Sari Idayanti	Chairman
Anggota	Sari Idayanti	Sari Idayanti	Teguh Sukaryanto	Members
	Medi Sejati	Medi Sejati		
	Mardinus Rasyid	Mardinus Rasyid		

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022	2021	2020	
Ketua	Retno Dwiyanti Widanigsih	Achmad Friscantono	Sari Idayanti	Chairman
Anggota	Sari Idayanti	Sari Idayanti	M.Rinaldi Taufik Sukarsa	Members
	Mardinus Rasyid	Retno Dwiyanti Widanigsih		
	Medi Sejati	Lusy Rahmawati		

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022	2021	2020	
Ketua	Retno Dwiyanti Widaningsih	Achmad Friscantono	Sari Idayanti	Chairman
Anggota	Sari Idayanti	Sari Idayanti	M.Rinaldi Taufik Sukarsa	Members
	Lusy Rahmawati	Retno Dwiyanti Widaningsih		
		Lusy Rahmawati		

Personel manajemen kunci Bank terdiri dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah.

Key management personnel of the Bank consists of Commissioners, Directors, Executive Officer, and Board of Sharia Supervisory.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, jumlah karyawan Bank (tidak diaudit) masing-masing adalah sejumlah 67 karyawan, 110 karyawan dan 144 karyawan.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the total employees (unaudited) of the Bank are 67 employees, 110 employees and 144 employees, respectively.

Laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Bank pada tanggal 10 April 2023. Direksi Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Bank Victoria Syariah for the year ended December 31, 2022 was completed and authorized for issuance on April 10, 2023 by the Bank's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013).

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements of the Group in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by institute of Indonesian Chartered Accountant and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

i) Laporan posisi keuangan;
ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
iii) Laporan perubahan ekuitas;
iv) Laporan arus kas;
v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada bank lain, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

The financial statements are prepared in accordance with SFAS No. 101, "Presentation of sharia Financial Statements". Based on SFAS No. 101 (Revised 2019), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

i) Statement of financial position;
ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
iii) Statement of changes in equity;
iv) Statement of cash flows;
v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
viii) Notes to the financial statements.

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with other banks, current accounts and placements with Bank Indonesia with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

The statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

The statement of sources and distribution of zakah funds show the sources and uses of zakah funds for a certain period, and the zakah funds balance on a particular date.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal pelaporan.

The statements of sources and uses of benevolence funds show the sources and uses of benevolence funds for a certain period, and benevolence funds balance at the reporting date.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Zakah is a portion of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakah payer) to be given to mustahiq (the zakah receiver). The sources of zakah funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

The Bank is not directly involved in the management of zakah and benevolence funds. All funds collected by the Bank have been transferred to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah disajikan dalam Rupiah penuh.

The currency used in the financial statements is Rupiah (Rp) which is also a functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are presented in full amount of Rupiah.

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

b. Transactions with Related Parties

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Bank apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

A person or entity is considered a related party of the Bank if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan.

e. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank's income but are used as part of the benevolence funds.

f. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka *mudharabah* dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

f. Placement with Other Banks

Placement with other banks represent placements in the form of Mudharabah time deposits and/or other forms of placement based on sharia principles.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Placement with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

Investasi *wakalah* merupakan perjanjian investasi berbasis *wakalah* dimana Bank akan mendapatkan tingkat keuntungan berupa laba diantisipasi. Dana yang diberikan Bank kemudian diinvestasikan pada produk yang halal. Hasilnya diberikan kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil investasi berupa laba aktual lebih kecil dari laba diantisipasi. Jika hasil investasi berupa laba aktual lebih besar dari laba diantisipasi maka yang diterima Bank penerima adalah sebesar laba diantisipasi dan selisihnya akan menjadi pendapatan Bank.

Wakalah investment is placed fund based on wakalah that the Bank will receive return in form of anticipated profit. Funds given by the Bank will be invested in sharia products. Return distributed to customer were based on actual profit if the return from investment was lower than the anticipated profit. If return from investment were higher than the anticipated profit, the investee will receive an amount based on aniticipated profit whilst the difference will be recognized as income of the Bank.

g. Efek-efek

Efek-efek Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan reksadana syariah.

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, biaya perolehan termasuk biaya transaksi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi.

Investasi pada sukuk Ijarah dan sukuk Mudharabah setelah pengukuran awal diukur sebagai berikut:

1. Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai dalam laba rugi.

2. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan mengacu kepada kuotasi harga di pasar aktif atau harga yang terjadi pada transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif atau nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.

g. Marketable Securities

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and sharia mutual funds.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk as measured at amortized cost, at fair value through other comprehensive income or at fair value through profit and loss.

Sukuk classified as measured at amortized cost and at fair value through other comprehensive income, is measured at acquisition cost including transaction costs.

Sukuk classified as at fair value through profit and loss, is measured at acquisition cost excluding transaction costs.

Investment at sukuk Ijarah and Mudharabah after the initial measurement are measured as follows:

1. Measured at acquisition cost if the investment is held within a business model whose primary goal is to obtain the contractual cash flows and there is a contractual requirements that specify a specific date of payment of principal and/or the results. Difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line basis for a period of the sukuk. Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and are presented as an impairment in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Measured at fair value through profit or loss with reference to the price quotations in an active market or the price that occurs in the current transaction if there is no price quotations in an active market or the fair value of similar instrument if no price quotation in active market and no available price from the current transaction.

3. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual (pokok dan bagi hasil/ujrah) dan melakukan penjualan sukuk. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laba rugi.

h. Piutang

Piutang terdiri dari piutang murabahah dan piutang ijarah.

Piutang Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Piutang ijarah adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang ijarah disajikan sebagai pos lawan *(contra account)* piutang ijarah.

i. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik.

3. Investments are classified as fair value through other comprehensive income if it belongs in a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows (principal and profit/ujrah) and selling sukuk. Contractual terms determine the specific date of payment of principal and/or results. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in the statement of profit or loss.

h. Receivables

Receivable consist of Murabahah receivables and Ijarah receivables.

Murabahah Receivables

Murabahah is an agreement of sales transaction for goods in which the selling price is determined based on acquisition cost added with mutually agreed margin and the seller shall disclose the acquisition cost to buyer.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and subsequent recognition are measured at amortised cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

Ijarah Receivables

Ijarah is the contract of transferring the rights (benefits) of an asset within a certain period of time with the payment of rent (ujrah) without the transfer of ownership of the asset itself.

Ijarah receivables are stated at the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on ijarah receivables is presented as a contra account.

i. Investment in shares

Investments in shares are long-term investment in non-public companies.

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk penyertaan jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

Bank memiliki penyertaan saham pada Yayasan Perbanas dengan kepemilikan kurang dari 5%.

Investments in shares with ownership of less than 20% which the fair value is not available and intended for long-term investments are stated at cost (cost method). If there is a permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognise the decline that specified for every investment individually and the loss which is charged to the profit or loss.

The Bank has investment in shares at Yayasan Perbanas with percentage of ownership less than 5%.

j. Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi hasil (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode margin laba kotor.

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

j. Financing

Mudharabah Financing

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error by the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of mudharabah financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error by the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the balance of mudharabah financing.

Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Musyarakah financing

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia. Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

k. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatet di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam ijarah *muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan cara:

i) Hibah;
ii) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
iii) Penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
iv) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

k. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
i) a grant;
ii) sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;
iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and
iv) installment sales at a specific price as agreed in the contract.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

l. Aset Tetap

l. Property and Equipment

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Property and equipment, except land, are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan, dan metode saldo menurun ganda untuk penyusutan mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation are computed on a straight-line method for building and double declining balance method for machine and equipment and motor vehicle over the useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	Building
Mesin dan peralatan	4 - 8	Machine and equipments
Kendaraan bermotor	4 - 8	Motor vehicle

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from de-recognition of property and equipment is included in profit or loss in the period the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir periode dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial period end.

m. Aset Tak berwujud

m. Intangible Assets

Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Bank berupa aplikasi, perangkat lunak dan lisensi ATM.

Intangible assets held by the Bank are application, software and ATM license.

Aplikasi, perangkat lunak, dan lisensi ATM dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Application, software and ATM license are recorded as intangible assets and are stated at cost less accumulated amortisation.

Aplikasi, perangkat lunak dan lisensi ATM diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 5 (lima) tahun.

Application, software and ATM license are amortised using straight-line method over the estimated useful life of the assets, which is 5 (five) years.

n. Transaksi Sewa

n. Lease Transactions

Sebagai penyewa

As lessee

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

- The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and

- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini Ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;

  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

- The Bank has the right to irect the use of the asset. The Bank has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:

  1. The Bank has the right to operate the asset;

  2. The Bank has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Bank mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan tingkat sewa implisit dalam sewa atau jika tingkat sewa tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan tingkat sewa. Pada umumnya, Bank menggunakan sewa sebagai tingkat sewa diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa yang bergantung pada indeks atau tingkat imbalan yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau tingkat imbalan pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Bank cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Bank cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Bank allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Bank recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the lease rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using lease rate. Generally, the Bank uses its lease as the discount lease.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Bank is reasonably certain to exercise; and penalties for early termination of a lease unless the Bank is reasonably certain not to terminate early.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat sewa periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Bank memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Bank mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

o. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari setoran jaminan, uang muka, agunan yang diambil alih (“AYDA”), properti terbengkalai dan tagihan lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke pos-pos tertentu.

AYDA diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. AYDA tidak disusutkan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan AYDA (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari AYDA) diperhitungkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of lease on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

The Bank has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short- term leases that have a lease term of 12 months or less. The Bank recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

o. Other Assets

Other assets consist of deposit guarantee, advances, foreclosed assets, abandoned properties and other assets that cannot be classified to specific accounts.

Foreclosed assets recognized at the maximum net realized value of the customer’s obligations, After initial recognition, foreclosed assets are recognised at carrying value and fair value less cost to sell, whichever is lower. Foreclosed assets are not depreciated.

Any gain or loss arising from the sale of foreclosed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the foreclossed asset) is included in the profit or loss in the period such asset is derecognized.

p. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro dan penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor, rekening rupa-rupa, agunan yang diambil alih, dan properti terbengkalai.

Kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Klasifikasi aset dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

p. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts and placements with other banks, marketable securities, murabahah receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss, and consists of inter-office accounts, suspense accounts, foreclosed assets, and abandoned properties.

The quality and allowance for impairment losses of certain assets are based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 02/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 concerning "Asset Quality Assessment for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" which effectively applied on February 7, 2022.

The classification and allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets are as follow:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/*Percentage of Allowance for Impairment Losses*		Classification
Lancar	Minimum/*Minimum of*	1%	Current
Dalam perhatian khusus	Minimum/*Minimum of*	5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum/*Minimum of*	15%	Substandard
Diragukan	Minimum/*Minimum of*	50%	Doubtful
Macet		100%	Loss

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

The above percentages are applied to the outstanding balance of assets less the value of eligible collateral in line with above regulation, except for those classified as current and are not secured by cash collateral.

Bonds issued by the Government based on sharia principle, Bank Indonesia Sharia Certificates and part of earning assets which are secured with Government guarantee do not have allowance for impairment losses.

Aset produktif atas piutang murabahah sesuai dengan PSAK No. 50, 55 dan 102 (Revisi 2019) "Akuntansi *Murabahah*", dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPSI 2013.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah telah mengalami penurunan nilai. Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin;
3. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit;
5. melakukan reorganisasi keuangan lainnya; hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
6. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

   a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

Earning assets for murabahah receivables are in accordance with PSAK No. 50, 55 and 102 (Revised 2019) "Accounting for Murabahah" and earning assets for current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks and investment in marketable securities are in accordance with PAPSI 2013.

At each of the statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that murabahah receivables are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and that the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

1. significant financial difficulty of the issuer or obligor;
2. a breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
3. the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
4. there is a probability that the borrower will enter into bankruptcy;
5. conduct other financial reorganization, the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties; or
6. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:

   a. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and

b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang murabahah. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara individual, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang murabahah yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang murabahah yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika piutang murabahah tersebut memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk piutang murabahah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang murabahah tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi.

b. national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether the objective evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed murabahah receivables, it includes the asset in a group of murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

Individual impairment calculation

The Bank determines that murabahah receivables should be evaluated for impairment individually if murabahah receivable which have an objective evidence of impairment.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for murabahah receivables with substandard, doubtful and loss collectability.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the murabahah receivables' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang murabahah dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika piutang murabahah tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang murabahah dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu metode analisis migrasi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan data historis 3 tahun.

Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang murabahah yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang murabahah yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised murabahah receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if murabahah receivables do not have objective evidence of impairment.

Allowance for impairment lossess on murabahah receivables that are collectively evaluated, are calculated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis methods, to assess the allowance for impairment losses which collectively assessed, using 3 years historical data.

Losses are recognised in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognised using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognised is reversed through profit or loss.

q. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

r. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank.

r. Liabilities Immediately Payable

Liabilities immediately payable represents the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority which are stated at the amounts of the Bank's liabilities.

s. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam bentuk giro wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

s. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

t. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dari pihak lain dengan akad mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro mudharabah.

Tabungan mudharabah dan giro mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

t. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) to manage investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, and mudharabah demand deposits.

Mudharabah savings deposits and mudharabah demand deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana, kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses incurred due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because it has maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised profit from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (nisbah).

u. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari sewa (ijarah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima pada laporan komitmen dan kontinjensi.

u. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

The Bank determines the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortisation of deferred income when financing is classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Pengakuan pendapatan transaksi ijarah

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

Pengakuan pendapatan transaksi musyarakah dan mudharabah

Pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dan proyek hasil usaha.

Pengakuan pendapatan transaksi murabahah

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Revenue recognition of ijarah transaction

Income from ijarah is recognised proportionally over the period of the contract.

Revenue recognition of musyarakah and mudharabah transaction

Profit sharing income for passive partner in musyarakah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio.

Profit sharing income from mudharabah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio and the recognition based on projection of income is not allowed.

Revenue recognition of murabahah transaction

The revenue recognition of murabahah receivables are recognised in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of a murabahah receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs, and all other premiums or discounts.

v. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah kas yang telah diterima dari bagi hasil.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari laba kotor Bank (*gross profit margin*).

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui langsung dalam laporan laba rugi pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang murabahah.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

x. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

v. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely earned by the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

w. Income and Expense Recognition

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is directly recognised into profit or loss at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables.

Expenses are recognized when incurred using accrual basis.

x. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja

Pesangon pemutusan kontrak terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Bank mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Bank menunjukkan komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinan untuk dibatalkan.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

Termination Benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Bank recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan with a low possibility of withdrawal.

y. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

y. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.

z. Dana Zakat Dan Kebajikan

Dana zakat dan dana kebajikan pengelolaannya diserahkan kepada Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah lalu kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

aa. Provisi

Provisi diakui jika Bank mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Bank harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

bb. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities.

z. Zakah Funds and Benevolence Funds

The management of zakah and benevolence funds is delegated to Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah then to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Penalties/sanctions are charged to customers who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/benevolence funds.

aa. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

bb. Events after the Reporting Period

Post period-end events that provide additional information about the Bank statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post period-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan:

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari Piutang Murabahah

Kondisi spesifik nasabah yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang murabahah dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan nasabah dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Bank's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements:

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Allowance for Impairment losses on Murabahah Receivables

In the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables, the specific condition of impaired customer is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the customer's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan pencadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan nasabah tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

c. Transaksi Sewa

Bank sebagai penyewa

Bank telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Bank menentukan bahwa sewa ruangan memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Bank. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific customer allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

c. Lease Transactions

Bank as lessee

The Bank has entered into various lease agreements for commercial spaces. The Bank has determined that commercial spaces, and vehicles leases meet the criteria for recognition and measurement of right-of-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Bank diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 diungkapkan pada Catatan 12.

b. Penurunan Nilai Aset Non-Produktif

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Bank.

Nilai tercatat aset non-produktif berupa agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 diungkapkan pada Catatan 15.

a. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Bank's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of these assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are set out in Note 12.

b. Impairment of Non-Productive Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Bank's operations.

The carrying values of non-productive assets in the form of foreclosed assets and abandoned properties as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are set out in Note 15.

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 34 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Bank dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, diungkapkan pada Catatan 34.

d. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 35.

c. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 34 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Bank's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are appropriate and reasonable, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

The carrying value of long-term employee benefits liability as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are set out in Note 34.

d. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred tax assets are disclosed in Note 35.

4. Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia merupakan saldo giro pada Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah. Saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 132.022.294.644 Rp 47.399.070.914 dan Rp 42.115.858.874.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", yang berlaku efektif 1 Juli 2022, dimana besarnya GWM Bank secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata sebesar 6,0% pada tahap pertama dan 7,5% pada tahap kedua dari dana pihak ketiga dalam Rupiah. Berdasarkan peraturan tersebut, insentif GWM Bank adalah sebesar 0,30% untuk periode 1 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023. Dengan demikian, Bank hanya diwajibkan membentuk GWM sebesar 7,2%.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 23/6/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021 "Perubahan ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", yang berlaku efektif 21 Desember 2021, dimana besarnya GWM Bank ditetapkan sebesar 3,0% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 "Perubahan keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", yang berlaku efektif 1 Agustus 2020, dimana besarnya GWM Bank ditetapkan sebesar 3,0% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

4. Current Accounts with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia is a balance of current accounts with Bank Indonesia in Rupiah. Current accounts with Bank Indonesia as of December 31, 2022, 2021 and 2020 is Rp 132,022,294,644, Rp 47,399,070,914 and Rp 42,115,858,874, respectively.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to fulfill the Statutory Minimum Reserves (GWM) by Bank Indonesia.

The GWM ratio as of December 31, 2022 is calculated based on Regulation of the Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units", effective July 1, 2022, wherein the amount of Bank's GWM on daily of 0% and average at 6.0% at the first stage and 7.5% at the second stage of third party funds in Rupiah. Based on this regulation, GWM incentive for Bank is 0.30% for the period from December 1, 2022 until February 28, 2023. Therefore, Bank is only required to provide GWM of 7.2%.

The GWM ratio as of December 31, 2021 is calculated based on Regulation of the Board of Governors (PADG) No. 23/6/PADG/2021 dated December 21, 2021 concerning "the Seventh Amendment to the Members of the Board of Governors' Regulation No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units", effective on December 21, 2021, wherein the amount of Bank's GWM which is set at 3.0% of third party funds in Rupiah.

The GWM ratio as of December 31, 2020 is calculated based on Regulation of the Board of Governors (PADG) No. 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020 concerning "the Second Amendment to the Members of the Board of Governors' Regulation No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units", effective August 1, 2020, wherein the amount of Bank's GWM which is set at 3.0% of third party funds in Rupiah.

Berdasarkan peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 0,5%.

Selain ketentuan di atas, berdasarkan PADG No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target BI sebesar 94%.

Rasio GWM dalam Rupiah Bank masing-masing sebesar 8,43%, 3,54% dan 3,07% pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Based on regulation of Members of the Board of Governors No. 22/4/PADG/ 2020 Regarding the Implementation of Bank Indonesia Regulation No. 22/4/PBI/2020 Regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities to Support the Handling of the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak. The amount of allowance incentives for the fulfillment of Statutory Reserves in rupiah which must be fulfilled daily is set at 0.5%.

In addition, based on PADG No. 23/07/PADG/2021 which is effective from May 1, 2021, there are changes in the calculation of GWM Financing to Deposit Ratios (FDR) to the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Banks should maintain additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the BI's target of 94%.

The Bank's GWM ratio in Rupiah are 8.43%, 3.54% and 3.07% as of December 31, 2022, 2021, and 2020, respectively.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

5. Giro pada Bank Lain / 5. Current Accounts with Other Banks

	2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)				Related party (Note 36)
PT Bank Victoria International Tbk	167.897.715	1.617.865.575	837.063.230	PT Bank Victoria International Tbk
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank Central Asia Tbk	854.978.785	2.821.294.667	1.056.522.365	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	311.750.540	297.788.866	175.839.229	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	97.885.164	672.109.735	974.303.163	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.234.182	1.113.182	1.686.860	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2.954.636	4.560.637	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah pihak ketiga	1.266.848.671	3.795.261.086	2.212.912.254	Total third parties
Jumlah giro pada bank lain	1.434.746.386	5.413.126.661	3.049.975.484	Total current accounts with other banks

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas giro pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah lancar.

Tingkat pengembalian (bonus dan bunga) adalah sebesar 0,00% - 2,00% per tahun masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Management believes that there is no impaired current accounts with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Based on the management review, all current accounts with other banks as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are classified as current.

Average rates of return (bonus and interest) range 0.00% - 2.00% per annum for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang dijadikan jaminan.

On December 31, 2022, 2021 and 2020, no current account balance at other banks was used as collateral.

6. Penempatan pada Bank Lain dan Bank Indonesia

6. Placement with Other Banks and Bank Indonesia

2022

Jenis Penempatan	Jangka Waktu/ *Term*	Tingkat bagi hasil/ *Revenue sharing Rate* %	Pihak Ketiga/ *Third Parties*	*Type of Placement*
Penempatan pada Bank Indonesia				Placements with Bank Indonesia
Fasilitas Simpanan				Bank Indonesia Sharia
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	3 hari/*day*	4,75	15.000.000.000	Deposit Facility (FASBIS)
Penempatan pada bank lain				Placements with other banks
Sertifikat Investasi				Certificate of Interbanks
Mudharabah Antarbank (SIMA)	10-18 hari/*days*	5,78 - 6,15	370.000.000.000	Mudharabah Investment (SIMA)
Jumlah			385.000.000.000	Total

2021

Jenis Penempatan	Jangka Waktu/ *Term*	Tingkat bagi hasil/ *Revenue sharing Rate* %	Pihak Ketiga/ *Third Parties*	*Type of Placement*
Penempatan pada bank lain				Placements with other banks
Sertifikat Investasi				Certificate of Interbanks
Mudharabah Antarbank (SIMA)	1-4 hari/*days*	2,80 - 2,95	185.000.000.000	Mudharabah Investment (SIMA)

2020

Jenis Penempatan	Jangka Waktu/ *Term*	Tingkat bagi hasil/ *Revenue sharing Rate* %	Pihak Ketiga/ *Third Parties*	*Type of Placement*
Penempatan pada Bank Indonesia				Placements with Bank Indonesia
Fasilitas Simpanan				Bank Indonesia Sharia
Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1 hari/*day*	4,25	33.000.000.000	Deposit Facility (FASBIS)
Penempatan pada bank lain				Placements with other banks
Sertifikat Investasi				Certificate of Interbanks
Mudharabah Antarbank (SIMA)	7-50 hari/*days*	3,75 - 5,85	215.000.000.000	Mudharabah Investment (SIMA)
Jumlah			248.000.000.000	Total

Penempatan pada bank lain berupa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank merupakan penempatan pada:

Details of placements with other banks in the form of Certificate of Interbanks Mudharabah Investment are as folows:

	2022	2021	2020	
PT Bank Aladin Syariah Tbk	180.000.000.000	-	-	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	100.000.000.000	70.000.000.000	-	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	90.000.000.000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT BPD Kaltim Kaltara	-	75.000.000.000	20.000.000.000	PT BPD Kaltim Kaltara
PT Bank BJB Syariah	-	40.000.000.000	90.000.000.000	PT Bank BJB Syariah
PT Bank Mega Syariah	-	-	105.000.000.000	PT Bank Mega Syariah
Jumlah	370.000.000.000	185.000.000.000	215.000.000.000	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penelahaan manajemen, kolektibilitas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah lancar.

Management believes that there is no impaired placement with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Based on management review, all placement with other banks as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are classified as current.

7. Efek-efek

7. Marketable Securities

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	2022	2021	2020	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				At amortized cost
Surat Berharga Syariah Negara	652.374.280.020	139.429.632.360	214.775.725.396	Sharia Government Bonds
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				Fair value through other comprehensive income
Surat Berharga Syariah Negara	45.600.801.114	349.056.734.482	465.678.691.520	Sharia Government Bonds
Sukuk Korporasi	-	-	17.209.800.000	Corporate sukuk
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	45.600.801.114	349.056.734.482	482.888.491.520	Total fair value through other comprehensive income
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				At fair value through profit or loss
Surat Berharga Syariah Negara	-	34.521.140.813	-	Sharia Government Bonds
Reksadana Syariah	200.079.880.365	15.024.400.122	15.019.129.662	Sharia Mutual Funds
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	200.079.880.365	49.545.540.935	15.019.129.662	Total fair value through profit or loss
Jumlah	898.054.961.500	538.031.907.777	712.683.346.578	Total

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

b. By maturity

	2022	2021	2020	
Kurang dari 3 bulan	66.400.000.000	9.998.189.035	55.546.000.000	Less than 3 months
Lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan	-	15.024.400.122	34.930.036.776	More than 3 to 12 months
Lebih dari 12 sampai dengan 60 bulan	521.940.328.786	156.576.760.608	25.060.882.717	More than 12 to 60 months
Lebih dari 5 tahun	309.714.632.714	356.432.558.012	597.146.427.085	More than 5 years
Surat-surat berharga - bersih	898.054.961.500	538.031.907.777	712.683.346.578	Marketable securities - net

c. Tingkat pengembalian rata-rata per tahun

c. Average rate of annual return

	2022	2021	2020	
Surat Berharga Syariah Negara	4,875-8.875%	4,88% - 8,88%	5,45% - 8,88%	Sharia Government Securities Bonds
Sukuk Bank Indonesia	6,03%	-	3,75%	Bank Indonesia Sukuk
Sukuk Korporasi	-	-	8,50% - 9,00%	Corporate Sukuk

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas efek-efek sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penelahaan manajemen, kolektibilitas seluruh efek-efek pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah lancar.

Management believes that there is no impaired marketable securities, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Based on management review, all marketable securities as of December 31, 2022, 2021, and 2020 are classified as current.

Nilai wajar dari surat berharga yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 639.627.536.907, Rp 139.616.288.330 dan Rp 212.487.632.168.

The fair values of marketable securities carried at amortized cost as of December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp 639,627,536,907, Rp 139,616,288,330 and Rp 212,487,632,168, respectively.

8. Piutang Murabahah

8. Murabahah Receivables

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)				Related parties (Note 36)
Modal kerja	9.962.785.690	-	-	Working capital
Investasi	17.100.000.000	-	-	Investment
Konsumsi	2.866.160.619	377.417.478	538.282.509	Consumption
Jumlah	29.928.946.309	377.417.478	538.282.509	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Modal kerja	14.501.249.514	110.925.157.091	111.247.792.406	Working capital
Investasi	97.942.782.570	71.645.255.801	68.046.047.844	Investment
Konsumsi	5.537.703.161	32.471.257.866	40.571.628.123	Consumption
Jumlah	117.981.735.245	215.041.670.758	219.865.468.373	Subtotal
Jumlah	147.910.681.554	215.419.088.236	220.403.750.882	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(907.499.800)	(4.105.542.353)	(1.930.888.246)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	147.003.181.754	211.313.545.883	218.472.862.636	Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

	2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)				Related parties (Note 36)
Perdagangan lain	17.100.000.000	-	-	Other trading
Perdagangan besar dan eceran	9.962.785.690	-	-	Large trading and retail
Lain-lain	2.866.160.619	377.417.478	538.282.509	Others
Jumlah	29.928.946.309	377.417.478	538.282.509	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Jasa-jasa dunia usaha	1.929.244.113	88.577.601.456	57.028.168.541	Business services
Perdagangan lain	67.000.000.000	35.890.000.000	44.970.701.458	Other trading
Konstruksi	11.329.330.331	35.489.871.485	43.084.555.165	Construction
Perdagangan besar dan eceran	10.790.661.345	16.894.430.147	27.600.676.715	Large trading and retail
Industri pengolahan lainnya	13.500.000.000	5.718.509.804	6.609.738.371	Other processing industry
Lain-lain	13.432.499.456	32.471.257.866	40.571.628.123	Others
Jumlah	117.981.735.245	215.041.670.758	219.865.468.373	Subtotal
Jumlah	147.910.681.554	215.419.088.236	220.403.750.882	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(907.499.800)	(4.105.542.353)	(1.930.888.246)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	147.003.181.754	211.313.545.883	218.472.862.636	Net

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

c. By period of financing

	2022	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	4.800.000.000	-	-	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	15.732.562.125	56.615.728.641	32.908.675.125	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	24.427.017.432	90.534.280.086	96.636.142.173	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	102.951.101.997	68.269.079.509	90.858.933.584	More than 5 years
Jumlah	147.910.681.554	215.419.088.236	220.403.750.882	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(907.499.800)	(4.105.542.353)	(1.930.888.246)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	147.003.181.754	211.313.545.883	218.472.862.636	Net

d. Berdasarkan kolektibilitas

d. By collectibility

	2022	2021	2020	
Lancar	143.010.497.835	195.538.837.382	195.661.481.154	Current
Dalam perhatian khusus	1.237.057.456	664.444.476	6.859.942.992	Special mention
Kurang lancar	-	409.376.352	-	Substandard
Diragukan	-	1.615.454.473	1.107.601.547	Doubtful
Macet	3.663.126.263	17.190.975.553	16.774.725.189	Loss
Jumlah	147.910.681.554	215.419.088.236	220.403.750.882	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(907.499.800)	(4.105.542.353)	(1.930.888.246)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	147.003.181.754	211.313.545.883	218.472.862.636	Net

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

e. Movement of allowance for impairment losses

	2022	2021	2020	
Saldo awal tahun	4.105.542.353	1.930.888.246	1.162.890.129	Beginning balance
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan-bersih (Catatan 30)	304.769.049	(7.599.672.616)	(3.417.926.339)	Provision (recovery) for impairment losses in current year-net (Note 30)
Penjualan pembiayaan murabahah	(3.089.297.511)	-	-	Sale on murabahah financing
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapusbukukan	-	11.696.151.256	4.185.924.456	Reversal from write off financing
Penghapusan	(413.514.091)	(1.921.824.533)	-	Write off
Saldo akhir tahun	907.499.800	4.105.542.353	1.930.888.246	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang murabahah.

Management believes that the provision for impairment losses as of December 31, 2022, 2021 and 2020 is sufficient to cover all possible losses arising from uncollectible murabahah receivables.

f. Mutasi pembiayaan murabahah yang dihapus buku

f. The movement of murabahah financing written-off

	2022	2021	2020	
Saldo awal tahun	40.214.872.584	50.817.919.378	55.067.401.476	Beginning balance
Mutasi selama tahun berjalan				Movement during the year
Penghapusan	413.514.091	1.921.824.533	-	Write off
Penerimaan kembali	(2.967.886.876)	(11.696.151.256)	(4.185.924.456)	Reversal
Hapus tagih	(3.448.009.578)	(828.720.071)	(63.557.642)	Delete notes
Saldo akhir tahun	34.212.490.221	40.214.872.584	50.817.919.378	Ending balance

g. Tingkat marjin rata-rata per tahun

Tingkat marjin rata-rata per tahun masing-masing sebesar 11,95%, 12,35% dan 12,09% pada tahun 2022, 2021 dan 2020.

h. Pembiayaan Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 piutang murabahah termasuk fasilitas pembiayaan bersama *without recourse* dengan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar Rp 563.905.819, Rp 4.949.871.457 dan Rp 14.473.361.668.

i. Piutang murabahah direstrukturisasi

Piutang murabahah yang direstrukturisasi masing-masing adalah sebesar Rp 47.430.029.722, Rp 84.555.355.124 dan Rp 87.462.049.963 pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

j. Penjualan piutang

Selama tahun 2022, Bank menjual piutang murabahah kepada pihak ketiga dengan baki debet sebesar Rp 12.584.917.908, cadangan kerugian penurunan nilai telah bentuk sebesar Rp 3.089.297.511 dan nilai penjualan sebesar Rp 4.020.000.000. Selisih nilai tercatat dan nilai penjualan sebesar Rp 5.475.620.397 dicatat sebagai bagian dari beban lainnya (Catatan 31).

Bank menjual piutang murabahah yang dihapus buku kepada pihak ketiga dengan baki debet sebesar Rp 4.837.701.826, cadangan kerugian penurunan nilai telah bentuk sebesar Rp 4.837.701.826 dan nilai penjualan sebesar Rp 1.800.000.000. Penerimaan hapus buku pembiayaan tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasional lainnya (Catatan 27).

g. Average annual margin rate

Average annual margin rate is 11.95%, 12.35% and 12.09% in 2022, 2021 and 2020 respectively.

h. Joint financing

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, murabahah receivables include joint financing without recourse with multifinance companies amounting to Rp 563,905,819, Rp 4,949,871,457 and Rp 14,473,361,668, respectively.

i. Restructured murabahah receivables

Restructured murabahah receivables amounted to Rp 47,430,029,722, Rp 84,555,355,124 and Rp 87,462,049,963 as of December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

j. Sale of receivable

During the year 2022, the Bank has sold murabahah receivables to a third party with outstanding amounted Rp 12,584,817,909 with allowance for impairment amounting to Rp 3.089.297.511 and sales price of Rp 4,020,000,000. Difference between outstanding balance and sales of financing amounting to Rp 5,475,620,397 is recorded as part of other expenses (Note 31).

The Bank has sold write offs murabahah receivables to a third party with outstanding amounted Rp 4,837,701,826 with allowance for impairment amounting to Rp 4,837,701,826 and sales price of Rp 1,800,000,000. Recovery from write off financing balance is recorded as part of other operating income (Note 27).

9. Pembiayaan Musyarakah

a. Berdasarkan jenis

	2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)				Related Parties (Note 36)
Modal kerja	1.000.000.000	-	-	Working capital
Pihak ketiga				Third parties
Modal kerja	470.009.394.548	566.977.249.643	917.136.784.569	Working capital
Investasi	3.000.000.000	18.465.465.511	16.099.706.616	Investment
Konsumsi	299.766.820	323.514.098	4.912.245.506	Consumption
Jumlah	474.309.161.368	585.766.229.252	938.148.736.691	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.267.004.531)	(43.597.815.269)	(24.225.247.850)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	469.042.156.837	542.168.413.983	913.923.488.841	Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)				Related parties (Note 36)
Perdagangan besar dan eceran	1.000.000.000	-	-	Wholesale and retail trading
Pihak ketiga				Third parties
Jasa-jasa dunia usaha	411.528.143.538	432.424.183.646	749.294.522.350	Business services
Perdagangan besar dan eceran	31.759.095.206	48.785.931.490	16.911.764.702	Wholesale and retail trading
Perdagangan lain	25.722.155.804	323.514.100	104.586.543.938	Other trading
Industri pengolahan lainnya	4.000.000.000	99.339.543.934	54.163.871.895	Other processing industry
Konsumsi	299.766.820	-	-	Consumption
Konstruksi	-	4.893.056.082	13.192.033.810	Construction
Jumlah	474.309.161.368	585.766.229.252	938.148.736.691	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.267.004.531)	(43.597.815.269)	(24.225.247.850)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	469.042.156.837	542.168.413.983	913.923.488.841	Net

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2022	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	98.750.000.000	45.384.246.293	119.131.235.334	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	63.775.000.000	5.979.593.767	145.170.987.171	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	280.620.652.740	383.509.834.340	456.514.766.146	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	31.163.508.628	150.892.554.852	217.331.748.040	More than 5 years
Jumlah	474.309.161.368	585.766.229.252	938.148.736.691	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.267.004.531)	(43.597.815.269)	(24.225.247.850)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	469.042.156.837	542.168.413.983	913.923.488.841	Net

9. Musyarakah Financing

a. By type

b. By economic sector

c. By period of financing

d. Berdasarkan kolektibilitas

d. By collectibility

	2022	2021	2020	
Lancar	466.499.288.982	488.293.739.449	840.724.711.570	Current
Dalam perhatian khusus	197.647.306	42.894.933.741	60.111.984.726	Special mention
Kurang lancar	-	-	-	Substandard
Diragukan	-	-	554.287.286	Doubtful
Macet	7.612.225.080	54.577.556.062	36.757.753.109	Loss
Jumlah	474.309.161.368	585.766.229.252	938.148.736.691	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.267.004.531)	(43.597.815.269)	(24.225.247.850)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	469.042.156.837	542.168.413.983	913.923.488.841	Net

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

e. Movement of allowance for impairment losses

	2022	2021	2020	
Saldo awal tahun	43.597.815.269	24.225.247.850	20.647.166.985	Beginning balance
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 30)	6.559.351.483	18.141.126.429	2.641.622.525	Provision impairment losses in current year (Note 30)
Penjualan pembiayaan musyarakah	(12.395.369.805)	-	-	Sale on musyarakah financing
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapusbukukan	-	6.231.440.990	936.458.340	Reversal from write off financing
Penghapusan	(32.494.792.416)	(5.000.000.000)	-	Write Off
Saldo akhir tahun	5.267.004.531	43.597.815.269	24.225.247.850	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan musyarakah.

Management believes that the allowance for impairment losses of musyarakah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected musyarakah financing.

f. Mutasi pembiayaan musyarakah yang dihapus buku

f. The movement of musyarakah financing written-off

	2022	2021	2020	
Saldo awal tahun	7.448.491.749	9.396.666.739	10.333.125.079	Beginning balance
Mutasi selama tahun berjalan				Movement during the year
Hapus buku	32.494.792.416	5.000.000.000	-	Write Off
Penerimaan kembali	(3.758.176.247)	(6.231.440.990)	(936.458.340)	Reversal
Hapus tagih	(13.567.130.000)	(716.734.000)	-	Delete notes
Saldo akhir tahun	22.617.977.918	7.448.491.749	9.396.666.739	Ending balance

g. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun 2022, 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 11,92%, 11,38% dan 12,18%.

g. Average annual profit sharing rate

Average profit sharing rate for the year as of 2022, 2021 and 2020 are 11.92%, 11.38% and 12.18%, respectively.

h. Pembiayaan musyarakah direstrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi masing-masing adalah sebesar Rp 33.050.495.806, Rp 247.140.410.274 dan Rp 294.364.936.724.

h. Restructured musyarakah financing

As of December 31, 2022 ,2021 and 2020 restructured musyarakah financing amounted Rp 33,050,495,806, Rp 247,140,410,274 and Rp 294,364,936,724, respectively.

i. Penjualan pembiayaan

Selama tahun 2022, Bank menjual pembiayaan musyarakah kepada pihak ketiga dengan baki debet sebesar Rp 14.772.382.920, cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 12.395.369.805 dan nilai penjualan sebesar Rp 13.700.000.000. Selisih nilai tercatat dan nilai penjualan sebesar Rp 11.322.986.885 dibukukan pada akun pendapatan operasional lainnya (Catatan 27).

Bank menjual pembiayaan musyarakah yang dihapus buku kepada pihak ketiga dengan baki debet sebesar Rp 16.767.130.000, cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 16.767.130.000 dan nilai penjualan sebesar Rp 3.200.000.000. Penerimaan hapus buku pembiayaan tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasional lainnya (Catatan 27).

i. Sale of financing

During the year 2022, the Bank has sold musyarakah receivables to a third party with outstanding amounted Rp 14,772,382,920, allowance for impairment amounting to Rp 12,395,369,805 and sales price of Rp 13,700.000.000. Difference between outstanding balance and sales of financing amounting to Rp 11,322,986,885 is recorded as part of other operating income (Note 27).

The Bank has sold write offs musyarakah receivables to a third party with outstanding amounted Rp 16,767,130,000 with allowance for impairment amounting to Rp 16,767,130,000 and sales price of Rp 3,200,000,000. Recovery from write off financing balance is recorded as part of other operating income (Note 27).

10. Pembiayaan Mudharabah – Pihak Ketiga

Seluruh pembiayaan mudharabah diberikan kepada pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis

10. Mudharabah Financing – Third parties

All mudharabah financing were given to third parties.

a. By type

	2022	2021	2020	
Modal kerja	532.552.184	4.099.239.339	6.816.777.400	Working capital
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.627.609)	(3.049.770.615)	(241.801.769)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	505.924.575	1.049.468.724	6.574.975.631	Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

	2022	2021	2020	
Jasa-jasa dunia usaha	532.552.184	4.099.239.339	6.816.777.400	Business services
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.627.609)	(3.049.770.615)	(241.801.769)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	505.924.575	1.049.468.724	6.574.975.631	Net

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

c. By period of financing

	2022	2021	2020	
1 sampai dengan 2 tahun	-	-	-	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	-	923.916.655	4.593.444.314	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	532.552.184	3.175.322.684	2.223.333.086	More than 5 years
Jumlah	532.552.184	4.099.239.339	6.816.777.400	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.627.609)	(3.049.770.615)	(241.801.769)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	505.924.575	1.049.468.724	6.574.975.631	Net

d. Berdasarkan kolektibilitas

d. By collectibility

	2022	2021	2020	
Lancar	532.552.184	995.720.564	3.394.986.123	Current
Dalam perhatian khusus	-	-	3.421.791.277	Special mention
Kurang lancar	-	78.918.975	-	Substandard
Diragukan	-	-	-	Doubtful
Macet	-	3.024.599.800	-	Loss
Jumlah	532.552.184	4.099.239.339	6.816.777.400	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.627.609)	(3.049.770.615)	(241.801.769)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	505.924.575	1.049.468.724	6.574.975.631	Net

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

e. Movement of allowance for impairment losses

	2022	2021	2021	
Saldo awal periode	3.049.770.615	241.801.769	200.359.933	Beginning balance
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan-bersih (Catatan 30)	75.070.760	2.807.968.846	41.441.836	Provision for (recovery from) impairment losses in current year-net (Note 30)
Penghapusan	(3.098.213.766)	-	-	Write-off
Saldo akhir periode	26.627.609	3.049.770.615	241.801.769	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah.

Management believes that allowance for impairment losses of mudharabah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollectible mudharabah financing.

f. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun adalah masing-masing sebesar 12,00%, 12,74% dan 12,98% pada tahun 2022, 2021, 2020.

f. Average annual profit sharing rate

Average profit sharing rate per annual as of 2022, 2021 and 2020 are 12.00%, 12.74% and 12.98%, respectively.

g. Pembiayaan mudharabah direstrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi masing-masing adalah sebesar Rp 532.552.184, Rp 995.720.564 dan Rp 1.339.558.129.

g. Restructured mudharabah financing

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, restructured mudharabah financing amounted to Rp 532,552,184, Rp 995,720,564 and Rp 1,339,558,129, respectively.

h. Penjualan pembiayaan

Bank menjual pembiayaan mudharabah yang dihapus buku kepada pihak ketiga dengan baki debet sebesar Rp 3.024.599.505, cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.024.599.505 dan nilai penjualan sebesar Rp 280.000.000. Penerimaan hapus buku pembiayaan tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasional lainnya (Catatan 27).

h. Sale of financing

The Bank has sold write offs mudharabah receivables to a third party with outstanding amounted Rp 3,024,599,505 with allowance for impairment amounting to Rp 3,024,599,505 and sales price of Rp 280,000,000. Recovery from write off financing balance is recorded as part of other operating income (Note 27).

11. Pendapatan Bagi Hasil Yang Akan Diterima

11. Revenue Sharing Receivables

	2022	2021	2020	
Bagi hasil efek-efek	11.521.339.357	10.376.402.238	13.106.325.174	Revenue sharing marketable securities
Bagi hasil piutang murabahah	507.451.983	3.267.688.637	1.739.253.851	Revenue sharing murabahah receivables
Bagi hasil penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	349.333.333	18.229.167	250.379.557	Revenue sharing placement with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan ijarah	-	11.671.501	11.671.501	Ijarah income
Jumlah	12.378.124.673	13.673.991.543	15.107.630.083	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, pendapatan bagi hasil yang akan diterima dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 122.666.222, Rp 104.537 dan Rp 4.476.511 (Catatan 36) atau masing-masing 0,01%, 0,001% dan 0,03% dari jumlah pendapatan bagi hasil yang akan diterima.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, revenue sharing receivables received from related parties amounted to Rp 122,666,222, Rp 104,537 and Rp 4,476,511 (Note 36) respectively, or 0.01%, 0.001% and 0.03%, respectively of total revenue sharing receivables.

12. Aset Tetap

12. Property and Equipment

	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	Perubahan Selama Tahun 2022/ *Changes during 2022* Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	81.556.965	-	-	81.556.965	Land
Bangunan	245.619.585	-	-	245.619.585	Building
Mesin dan peralatan	6.285.160.308	34.375.000	(424.834.287)	5.894.701.021	Machine and equipments
Kendaraan bermotor	1.808.581.341	-	(973.275.000)	835.306.341	Motor vehicle
Jumlah	8.420.918.199	34.375.000	(1.398.109.287)	7.057.183.912	Total
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Bangunan	9.521.986.610	705.140.997	(7.538.876.921)	2.688.250.686	Building
Jumlah	17.942.904.809	739.515.997	(8.936.986.208)	9.745.434.598	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan	143.472.171	12.280.980	-	155.753.151	Building
Mesin dan peralatan	6.116.451.562	133.729.086	(423.130.118)	5.827.050.530	Machine and equipments
Kendaraan bermotor	1.793.744.604	14.836.734	(973.275.000)	835.306.338	Motor vehicle
Jumlah	8.053.668.337	160.846.800	(1.396.405.118)	6.818.110.019	Total
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Bangunan	5.359.282.216	3.463.769.702	(7.538.876.911)	1.284.175.007	Building
Jumlah	13.412.950.553	3.624.616.502	(8.935.282.029)	8.102.285.026	Total
Nilai Tercatat	4.529.954.256			1.643.149.572	Net Book Value

	1 Januari 2021/ *January 1, 2021*	Perubahan Selama Tahun 2021/ *Changes during 2021* Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	81.556.965	-	-	81.556.965	Land
Bangunan	245.619.585	-	-	245.619.585	Building
Mesin dan peralatan	6.803.893.525	25.600.000	(544.333.217)	6.285.160.308	Machine and equipments
Kendaraan bermotor	2.125.971.341	-	(317.390.000)	1.808.581.341	Motor vehicle
Jumlah	9.257.041.416	25.600.000	(861.723.217)	8.420.918.199	Total
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Bangunan	11.303.563.399	123.853.034	(1.905.429.823)	9.521.986.610	Building
Jumlah	20.560.604.815	149.453.034	(2.767.153.040)	17.942.904.809	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan	131.191.191	12.280.980	-	143.472.171	Building
Mesin dan peralatan	6.424.428.157	232.997.484	(540.974.079)	6.116.451.562	Machine and equipments
Kendaraan bermotor	2.066.544.308	44.590.296	(317.390.000)	1.793.744.604	Motor vehicle
Jumlah	8.622.163.656	289.868.760	(858.364.079)	8.053.668.337	Total
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Bangunan	3.633.154.305	3.631.557.734	(1.905.429.823)	5.359.282.216	Building
Jumlah	12.255.317.961	3.921.426.494	(2.763.793.902)	13.412.950.553	Total
Nilai Tercatat	8.305.286.854			4.529.954.256	Net Book Value

	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	Perubahan Selama Tahun 2020/ *Changes during 2020* Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	81.556.965	-	-	81.556.965	Land
Bangunan	245.619.585	-	-	245.619.585	Building
Mesin dan peralatan	7.129.050.326	232.335.807	(557.492.608)	6.803.893.525	Machine and equipments
Kendaraan bermotor	2.175.377.341	-	(49.406.000)	2.125.971.341	Motor vehicle
Jumlah	9.631.604.217	232.335.807	(606.898.608)	9.257.041.416	Total
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Bangunan	11.303.563.399	-	-	11.303.563.399	Building
Jumlah	20.935.167.616	232.335.807	(606.898.608)	20.560.604.815	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan	118.910.211	12.280.980	-	131.191.191	Building
Mesin dan peralatan	6.750.375.688	224.457.333	(550.404.864)	6.424.428.157	Machine and equipments
Kendaraan bermotor	1.948.551.791	167.398.517	(49.406.000)	2.066.544.308	Motor vehicle
Jumlah	8.817.837.690	404.136.830	(599.810.864)	8.622.163.656	Total
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Bangunan	-	3.633.154.305	-	3.633.154.305	Building
Jumlah	8.817.837.690	4.037.291.135	(599.810.864)	12.255.317.961	Total
Nilai Tercatat	12.117.329.926			8.305.286.854	Net Book Value

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Bank menjual aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Bank sold its property and equipment with detail as follows:

	2022	2021	2020	
Harga jual	475.450.000	198.300.000	90.245.000	Selling value
Nilai tercatat	1.704.179	3.359.138	7.087.744	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 32)	473.745.821	194.940.862	83.157.256	Gain on sales of property and equipment (Note 32)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi dan pencurian kepada pihak ketiga dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 6.592.000.322, Rp 7.603.947.220 dan Rp 8.275.328.373. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2022, 2021 and 2021, property and equipment are insured against fire, earthquake and theft to third parties with insurance coverage amounted Rp 6,592,000,322, Rp 7,603,947,220 and Rp 8,275,328,373, respectively. Management believes that the sum insured is sufficient to cover all possible losses of the insured assets.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, jumlah nilai perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp 1.140.157.944, Rp 1.495.042.596 dan Rp 2.156.914.881.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, total property and equipment that have been fully depreciated, but still used for operation amounted Rp 1,140,157,944, Rp 1,495,042,596 and Rp 2,156,914,881, respectively.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Based on management review, there is no impairment in the property and equipment as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

13. Aset Tak Berwujud

13. Intangible Assets

	2022	2021	2020	
Biaya perolehan				Acquisition costs
Lisensi ATM	2.784.598.875	2.784.598.875	2.784.598.875	ATM license
Aplikasi dan perangkat lunak	5.328.487.195	5.245.237.195	5.090.237.195	Application and software
Jumlah	8.113.086.070	8.029.836.070	7.874.836.070	Subtotal
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
Lisensi ATM	(2.784.598.875)	(2.784.598.875)	(2.784.598.875)	ATM license
Aplikasi dan perangkat lunak	(4.712.417.557)	(4.241.031.873)	(3.260.090.705)	Application and software
Jumlah	(7.497.016.432)	(7.025.630.748)	(6.044.689.580)	Subtotal
Jumlah	616.069.638	1.004.205.322	1.830.146.490	Total

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Based on management review, there is no impairment on intangible assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

14. Biaya Dibayar Dimuka

14. Prepaid Expenses

	2022	2021	2020	
Uang muka pembiayaan	1.543.960.170	5.938.615.792	5.338.451.760	Financing in advance
Iuran keanggotaan	460.333.308	449.166.652	458.333.334	Membership fee
Sewa gedung	229.699.401	67.441.716	29.703.000	Rent building
Pengembangan sistem	165.607.290	179.407.915	912.024.768	System development
Personalia	161.410.673	49.955.104	-	Personnel
Promosi	24.698.837	16.916.845	17.621.441	Promotion
Asuransi	6.766.264	20.892.784	6.997.851	Insurance
Perbaikan gedung	-	-	1.131.194.154	Building renovation
Lain-lain	395.485.478	43.854.001	787.949.889	Others
Jumlah	2.987.961.420	6.766.250.809	8.682.276.197	Total

15. Aset Lain-lain

15. Other Assets

	2021	2021	2020	
Agunan yang diambil alih	65.975.316.201	112.655.402.917	114.302.909.621	Foreclosed assets
Setoran jaminan	2.723.607.450	2.723.607.450	2.723.607.450	Deposit guarantee
Properti terbengkalai	-	128.252.200	128.252.200	Abandoned properties
Lain-lain	565.848.811	3.043.785.433	1.346.746.368	Others
Jumlah	69.264.772.462	118.551.048.000	118.501.515.639	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.484.588.274)	(23.655.601.276)	(15.496.345.601)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	50.780.184.188	94.895.446.724	103.005.170.038	Net

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kolektibilitas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai adalah Macet.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the foreclosed assets and abandoned properties are classified as Loss.

Movement of allowance for impairment losses of other assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020, as follows:

	2022	2021	2020	
Saldo awal periode	23.655.601.276	15.496.345.601	10.640.507.489	Beginning balance
Pencadangan (pemulihan) selama periode berjalan (Catatan 30)	(4.745.981.826)	8.159.255.675	4.855.838.112	Provision (recovery) for impairment losses in current year (Note 30)
Penghapusan	(425.031.176)	-	-	Write-off
Saldo akhir periode	18.484.588.274	23.655.601.276	15.496.345.601	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang telah dibentuk adalah memadai.

Termasuk di dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp 18.484.588.274, Rp 23.527.349.076 dan Rp 15.368.093.401 pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

Included in allowance for impairment losses is allowance for impairment losses of foreclosed assets amounted to Rp 18,484,588,274, Rp 23,527,349,076 and Rp 15,368,093,401 as of December 31 2022, 2021 dan 2020, respectively.

16. Liabilitas Segera

16. Liabilities Immediately Payable

	2022	2021	2020	
Titipan pembiayaan	547.317.137	4.350.563	1.913.630.527	Financing
Titipan dana sosial	106.373.029	192.746.279	115.849.899	Social fund
Pengembangan sistem	33.961.400	2.463.166.950	671.159.797	System development
Lain-lain	388.627.736	100.743.371	-	Others
Jumlah	1.076.279.302	2.761.007.163	2.700.640.223	Total

Seluruh liabilitas segera merupakan liabilitas kepada pihak ketiga.

All liabilities immediately payable are to third parties.

17. Simpanan Giro Wadiah

17. Wadiah Demand Deposits

	2022	2021	2020	
Simpanan giro wadiah				Wadiah demand deposits
Pihak berelasi (Catatan 36)	21.923.260	31.131.867	31.569.251	Related parties (Note 36)
Pihak ketiga	22.089.065.500	12.899.204.180	251.313.294.465	Third parties
Jumlah	22.110.988.760	12.930.336.047	251.344.863.716	Total

Tingkat bonus rata-rata per tahun untuk giro wadiah untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 1,06%, 1,07% dan 1,35%.

Average annual bonus rate for wadiah demand deposits for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are 1.06%, 1.07% and 1.35%, respectively.

18. Simpanan dari Bank Lain – Pihak Ketiga

Simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebesar Rp 225.000.000.000, Rp 42.000.000.000 dan Rp 260.000.000.000, merupakan simpanan syariah dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dari pihak ketiga.

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain selama tahun 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 5,51%, 3,39% dan 4,74%.

18. Deposit from Other Banks – Third Party

As of December 31, 2022, 2021 and 2020 deposit from other banks amounting to Rp 225,000,000,000, Rp 42,000,000,000 and Rp 260,000,000,000, respectively are sharia deposits in the form of Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) from third parties.

Average annual profit sharing rate for deposit from other banks during 2022, 2021 and 2020 are 5.51%, 3.39% and 4.74%, respectively

19. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

19. Undistributed Revenue Sharing

	2022	2021	2022	
Pihak berelasi (Catatan 36)				Related parties (Note 36)
Deposito mudharabah	5.517.608	5.753.685	10.756.220	Mudharabah time deposits
Tabungan mudharabah	585.604	336.827	249.217	Mudharabah savings
Giro wadiah	-	-	34.606	Demand deposits
Jumlah	6.103.212	6.090.512	11.040.043	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Deposito mudharabah	844.953.490	1.238.265.888	3.897.003.878	Mudharabah time deposits
Tabungan mudharabah	36.123.332	31.352.957	130.477.826	Mudharabah savings
Giro wadiah	7.890.411	7.890.411	379.722.222	Wadiah demand deposits
SIMA	4.652.780	9.975.000	387.740.931	SIMA
Jumlah	893.620.013	1.287.484.256	4.794.944.857	Subtotal
Jumlah	899.723.225	1.293.574.768	4.805.984.900	Total

20. Liabilitas Sewa

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa:

20. Lease Liabilities

The following are the future minimum lease payments based on lease agreements:

	2022	2021	2020	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:				Payments due in:
Sampai dengan 1 tahun	757.958.423	2.276.457.049	3.837.811.247	Until 1 year
Lebih dari 1-2 tahun	918.830.935	1.531.031.865	3.757.732.440	More than 1-2 years
Diatas 2 tahun	-	132.794.530	918.830.935	Over 2 years
Jumlah pembayaran sewa pembiayaan minimum	1.676.789.358	3.940.283.444	8.514.374.622	Total minimum lease liabilities
Imbalan	(78.552.329)	(167.976.369)	(485.561.130)	Fee
Nilai sekarang pembayaran sewa pembiayaan minimum	1.598.237.029	3.772.307.075	8.028.813.492	Present value of minimum lease liabilities

Beban imbalan liabilitas sewa adalah sebesar Rp 139.855.827, Rp 273.056.589 dan Rp 377.172.983 pada tahun 2022, 2021 dan 2020 (Catatan 32).

Fee expense on lease liabilities amounted to Rp 139,855,827, Rp 273,056,589 and Rp 377,172,983 in 2022, 2021 and 2020, respectively (Note 32).

Liabilitas sewa kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 1.585.320.324, Rp 3.772.307.075 dan Rp 7.876.724.358 (Catatan 36).

Lease liabilities incurred with related parties as of December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp 1,585,320,324 Rp 3,772,307,075 and Rp 7,876,724,358, respectively (Note 36).

21. Utang Pajak

21. Taxes Payable

	2022	2021	2020	
Pajak penghasilan				Income tax
Pasal 4 ayat 2	385.835.651	601.051.065	1.357.097.620	Article 4 paragraph 2
Pasal 21	236.511.674	346.539.459	480.142.093	Article 21
Pasal 23	21.049.420	69.961.425	20.574.775	Article 23
Pasal 29 (Catatan 35)	7.042.413	-	-	Article 29 (Note 35)
Jumlah	650.439.158	1.017.551.949	1.857.814.488	Total

22. Dana Syirkah Temporer

22. Temporary Syirkah Funds

a. Giro mudharabah

a. Mudharabah demand deposits

	2022	2021	2020	
Bukan bank				Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 36)	-	8.957.388	8.957.388	Related parties (Note 36)
Pihak ketiga	-	-	5.217.807	Third parties
Jumlah	-	8.957.388	14.175.195	Total

Tingkat bagi hasil per tahun untuk giro mudharabah pada tahun 2022, 2021 dan 2020, masing-masing berkisar dari 1,00% - 3,00%, 1,00% - 3,00% dan 1,00% - 5,00%.

Annual profit sharing for mudharabah demand deposits as of 2022, 2021 and 2020 range from 1.00% - 3.00%, 1.00% - 3.00%, and 1.00% - 5.00%, respectively.

b. Tabungan mudharabah

b. Mudharabah saving deposits

	2022	2021	2020	
Bukan bank				Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 36)	327.528.852	208.951.711	267.936.764	Related parties (Note 36)
Pihak ketiga	21.802.055.892	20.041.817.488	40.946.463.686	Third parties
Jumlah	22.129.584.744	20.250.769.199	41.214.400.450	Total

Tingkat bagi hasil per tahun untuk tabungan mudharabah pada tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing berkisar dari 1,11% - 3,47%, 0,50% - 4,00% dan 0,50% - 5,00%.

Annual profit sharing for mudharabah saving as of 2022, 2021 and 2020 range from 1.11% - 3.47%, 0.50% - 4.00% and 0.50% - 5.00%, respectively.

c. Deposito mudharabah

c. Mudharabah deposits

i) Berdasarkan pemilik dana

i) By type of customer

	2022	2021	2020	
Bukan bank				Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 36)	3.010.000.000	3.075.000.000	2.655.000.000	Related parties (Note 36)
Pihak ketiga	764.669.740.866	1.198.657.585.601	1.280.798.785.605	Third parties
Jumlah	767.679.740.866	1.201.732.585.601	1.283.453.785.605	Subtotal
Bank				Bank
Pihak ketiga	4.500.000.000	8.500.000.000	54.500.000.000	Third parties
Jumlah	772.179.740.866	1.210.232.585.601	1.337.953.785.605	Total

ii) Berdasarkan periode deposito berjangka

ii) By the contractual maturity

	2022	2021	2020	
Kurang dari 1 bulan	70.130.000.000	333.150.000.000	133.300.000.000	Less than 1 month
1 bulan	179.500.642.811	280.939.900.714	319.275.691.669	1 month
3 bulan	198.788.098.055	293.643.536.701	466.524.182.426	3 months
6 bulan	29.236.000.000	57.394.348.186	217.858.911.510	6 months
12 bulan	294.525.000.000	245.104.800.000	200.995.000.000	12 months
Jumlah	772.179.740.866	1.210.232.585.601	1.337.953.785.605	Total

iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

iii) By remaining period until maturity

	2022	2021	2020	
Deposito mudharabah				Mudharabah deposit
Kurang dari 1 bulan	249.893.814.909	631.716.153.685	296.595.351.161	Less than 1 month
1 sampai dengan 3 bulan	205.154.925.957	315.938.751.709	695.710.434.444	1 month to 3 months
3 sampai dengan 6 bulan	22.631.000.000	22.923.880.206	152.343.000.000	3 months to 6 months
6 sampai dengan 12 bulan	294.500.000.000	239.653.800.001	193.305.000.000	6 months to 12 months
Jumlah	772.179.740.866	1.210.232.585.601	1.337.953.785.605	Total

iv) Tingkat bagi hasil

Tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito mudharabah pada tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing berkisar dari 1,5% - 7,5%, 1,25% - 3,50% dan 2,75% - 6,00%.

iv) Profit sharing rate

Annual profit sharing for mudharabah deposits as of 2022, 2021 and 2020 ranges from 1.5% - 7.5%, 1.25% - 3.50% and from 2.75% - 6.00%, respectively.

Deposito mudharabah yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan masing-masing sebesar Rp 296.000.000.000, Rp 237.600.000.000 dan Rp 273.135.000.000 pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Mudharabah deposits pledged as collateral for receivables and financing amounted to Rp 296,000,000,000, Rp 237,600,000,000 and Rp 273,135,000,000 as of Desember 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

23. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Bank pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

23. Capital Stock

The composition of the Bank's stockholder as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Stock*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %	Jumlah/ *Total*	*Name of Stockholder*
PT Victoria investama Tbk	850.000.000	80,20	850.000.000.000	PT Victoria investama Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	209.982.683	19,80	209.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,00	17.317.000	Others
Jumlah	1.060.000.000	100,00	1.060.000.000.000	Total

	31 Desember 2021 dan 2020/ *December 31, 2021 and 2020*			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Stock*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %	Jumlah/ *Total*	*Name of Stockholder*
PT Bank Victoria International Tbk	359.982.683	99,99	359.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	360.000.000	100,00	360.000.000.000	Total

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 November 2022 yang dituangkan dalam akta Notaris No. 13 tanggal 6 Desember 2022 dari Suwarni Sukiman, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Bank menyetujui:

a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 26 September 2022, telah disepakati pengambilalihan kepemilikan saham PT Bank Victoria International Tbk sebanyak 288.000.000 lembar saham oleh PT Victoria Investama Tbk dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 per lembar saham.

Based on Shareholder's Resolutions in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders dated November 22, 2022 as set forth in Notarial deed No. 13 dated December 6, 2022 from Suwarni Sukiman, S.H., notary in Jakarta, the Bank's shareholders agreed:

a. The Sale and Purchase of Shares Agreement on 26 September 2022, it was agreed to acquire 288,000,000 shares of PT Bank Victoria International Tbk shares by PT Victoria Investama Tbk with a nominal value of Rp 1,000 per share.

b. Peningkatan modal dasar dari Rp 1.000.000.000.000 (1.000.000.000 saham) menjadi Rp 1.438.000.000.000 (1.438.000.000 saham) serta menerbitkan saham baru sebanyak 700.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham yang diambil oleh PT Victoria Investama Tbk sebanyak 562.000.000 saham dan PT Bank Victoria International Tbk sebanyak 138.000.000 saham.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0259434.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Bank wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan OJK untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan dari aset tertimbang menurut risiko terhadap modal yang tersedia.

Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

Perhitungan rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

b. Increase in authorized capital from Rp 1,000,000,000,000 (1,000,000,000 shares) to Rp 1,438,000,000,000 (1,438,000,000 shares) and issued 700,000,000 new shares with a nominal value of IDR 1,000 per share which took over by PT Victoria Investama Tbk amounting to 562,000,000 new shares and PT Bank Victoria International Tbk amounting to 138,000,000 shares

This amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0259434.AH.01.11 Tahun 2022, December 23, 2022.

Capital Management

The primary objective of the Bank's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Bank is required by OJK to meet Capital Adequacy Ratio (CAR).

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement measured of risk-weighted assets to available capital resources.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

The calculation of CAR as of December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

	2022	2021	2020	
I. Komponen Modal				I. Capital Stock Component
A. Modal Inti	1.011.797.644.442	260.290.993.627	238.536.825.092	A. Core Capital
B. Modal Pelengkap	6.873.754.013	7.367.028.432	8.286.450.211	B. Supplementary Capital
II. Jumlah modal	1.018.671.398.455	267.658.022.059	246.823.275.303	II. Total
III. Aset tertimbang menurut risiko kredit, pasar dan operasional	680.578.789.100	805.902.984.611	1.003.361.431.341	III. Risk weighted assets for credit, market and operational risk
IV. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	149,68%	33,21%	24,60%	IV. Capital Adequacy Ratio (CAR)
V. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	9% - 10%	9% - 10%	9% - 10%	V. Minimum Capital Adequacy Ratio

24. Saldo Laba yang Sudah Ditentukan Penggunaannya

Berdasarkan Akta No. 23 tertanggal 26 Maret 2010 dan Akta No. 24 tertanggal 26 Maret 2010 keduanya dari Erni Rohaini, SH, MBA, notaris di Jakarta, saldo laba sebelum proses konversi menjadi bank umum syariah dikapitalisasi menjadi cadangan umum sebesar Rp 10.014.130.827. Setelah ada perubahan pencadangan imbalan pasti karyawan dan pajak penghasilan badan, maka saldo cadangan umum menjadi Rp 9.156.165.256. Perubahan ini telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 30 Juni 2014 dari Setiawan, S.H., notaris di Jakarta.

24. Appropriated Retained Earnings

Based on Notarial Deed No. 23 dated March 26, 2010 and Deed No. 24 dated March 26, 2010, both from Erni Rohaini, SH, MBA, a public notary in Jakarta, retained earnings before conversion into sharia bank is capitalised into general reserves amounted to Rp 10,014,130,827. After changes in allowances for post-employment benefit and current income tax, the balance of general reserves becomes Rp 9,156,165,256. These changes have been rectified by General Shareholders Meeting based on Notarial Deed No. 12 dated June 30, 2014 from of Setiawan, S.H., a public notary in Jakarta.

25. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib

25. Income From Fund Management by Bank as Mudharib

	2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)				Related parties (Note 36)
Pendapatan dari jual beli murabahah	383.622.673	47.350.430	60.640.801	Income from sales and purchases of murabahah
Pendapatan dari musyarakah	10.000.000	-	-	Income from musyarakah
Pendapatan ijarah - bersih	22.825.217	22.806.554	34.713.444	Income from ijarah - net
Jumlah - pihak berelasi	416.447.890	70.156.984	95.354.245	Subtotal - related parties
Pihak ketiga				Third parties
Pendapatan dari jual beli murabahah	10.933.971.161	20.769.530.692	18.409.962.453	Income from sales and purchases of murabahah
Pendapatan bagi hasil:				Income from profit sharing:
Musyarakah	23.059.950.064	40.692.564.742	76.272.301.212	Musyarakah
Mudharabah	88.019.995	245.934.164	840.610.814	Mudharabah
Pendapatan ijarah - bersih	23.583.218	93.828.469	196.837.716	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya :				Other main operating income :
Pendapatan efek-efek Syariah	35.464.998.669	43.505.598.810	48.747.088.486	Income from sharia marketable securities
Pendapatan giro dan penempatan pada bank lain	4.001.467.800	5.808.658.238	1.998.554.915	Current accounts and placement with other banks income
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBIS)	1.012.104.167	1.148.534.722	387.378.472	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility income (FASBIS)
Pendapatan administrasi	1.059.447.883	767.242.151	1.411.182.212	Administration income
Pendapatan giro pada Bank Indonesia	422.442.397	441.540.779	177.616.861	Current account with Bank Indonesia income
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	-	274.769.192	213.289.833	Bank Indonesia Sharia Certificate income (SBIS)
Jumlah	41.960.460.916	51.946.343.892	52.935.110.779	Subtotal
Jumlah - pihak ketiga	76.065.985.354	113.748.201.959	148.654.822.974	Subtotal - third parties
Jumlah	76.482.433.244	113.818.358.943	148.750.177.219	Total

26. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

26. Third Parties Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

	2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)				Related parties (Note 36)
SIMA	-	121.818.056	-	SIMA
Deposito mudharabah	78.140.932	6.853.449	10.756.220	Mudharabah deposits
Tabungan mudharabah	560.423	154.905	249.217	Mudharabah saving deposits
Giro mudharabah	9.806	10.292	34.606	Mudharabah current accounts
Jumlah	78.711.161	128.836.702	11.040.043	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Deposito mudharabah	35.259.503.085	61.990.506.295	101.368.484.939	Mudharabah deposits
SIMA	291.607.777	2.255.802.775	6.147.998.426	SIMA
Tabungan mudharabah	3.070.808.333	937.640.147	1.896.875.567	Mudharabah saving deposits
Giro	451.613.884	3.051.379.576	2.819.466.320	Current accounts
Jumlah	39.073.533.079	68.235.328.793	112.232.825.252	Subtotal
Jumlah	39.152.244.240	68.364.165.495	112.243.865.295	Total

27. Pendapatan Operasional Lainnya

27. Other Operating Income

	2022	2021	2020	
Penjualan piutang musyarakah (Catatan 9)	11.322.986.885	-	-	Sale of musyarakah receivables (Note 9)
Penerimaan kembali hapus buku pembiayaan	8.085.692.464	-	-	Recovery from write off financing
Keuntungan penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	1.376.292.000	25.612.327.223	14.899.089.020	Gain on sale of fair value through other comprehensive income marketable securities - net
Keuntungan dari peningkatan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih	283.094.565	610.407.828	-	Gain on increase in fair value of trading securities - net
Administrasi dan lainnya	223.008.341	1.665.038.460	1.070.502.849	Administrative and others
Jumlah	21.291.074.255	27.887.773.511	15.969.591.869	Total

28. Beban Umum dan Administrasi

28. General and Administrative Expenses

	2022	2021	2020	
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	3.624.616.502	3.921.426.494	4.037.291.135	Depreciation of property and equipment (Note 12)
Asuransi	2.365.152.869	3.906.777.844	4.463.459.397	Insurance
Pengembangan sistem	1.255.580.031	1.270.449.361	1.577.014.578	System development
Konsultan	1.152.613.633	1.215.300.002	618.800.000	Consultants
Pemeliharaan dan perbaikan	1.094.905.237	3.003.686.476	1.901.588.463	Repair and maintenance
Keanggotaan	719.035.745	1.307.187.669	1.142.073.558	Membership
Biaya *fee* ATM tahunan	542.083.333	549.999.998	660.000.004	Annual fee ATM expense
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 13)	471.385.684	980.941.168	807.481.143	Amortisation of intangible assets (Note 13)
Pajak dan perijinan	455.422.688	107.075.429	100.563.635	Tax and permission
Transportasi	307.793.235	243.300.098	327.171.633	Transportation
Listrik dan air	277.901.584	311.848.211	366.132.582	Electricity and water
Peralatan kantor	206.567.837	300.059.883	418.787.599	Office supplies
Sewa	146.163.776	51.712.998	1.404.633.654	Rent
Telekomunikasi	88.370.353	115.021.678	208.865.212	Telecommunication
Promosi	63.611.501	39.444.300	176.926.162	Promotional
Keamanan dan kebersihan	47.697.552	65.088.256	130.839.462	Securities and cleanliness
Lain-lain	80.564.423	34.378.091	56.984.294	Others
Jumlah	12.899.465.983	17.423.697.956	18.398.612.511	Total

Beban sewa yang dibayar kepada pihak berelasi untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 146.163.776, Rp 51.712.998 dan Rp 874.506.000 (Catatan 36).

Rent expenses incurred with related parties in 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp 146,163,776, Rp 51,712,998 and Rp 874,506,000, respectively (Note 36).

29. Beban Personalia / 29. Personnel Expenses

	2022	2021	2020	
Gaji	12.959.086.793	14.909.707.021	18.526.720.065	Salaries
Beban imbalan pasti (Catatan 34)	-	2.734.788.960	1.047.960.381	Post-employment benefit (Note 34)
Tunjangan hari raya	1.177.263.742	1.142.265.979	1.573.258.386	Holiday allowance
Honor Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas	899.911.622	1.025.745.813	1.200.711.789	Remuneration of Board of commissioners and Supervisory Boards
Premi asuransi jiwa	621.496.917	729.837.025	886.684.853	Life insurance premium
Kesehatan	385.161.955	518.929.870	440.849.449	Health
Lembur	331.280.373	388.830.885	395.746.590	Overtime
Pendidikan	276.001.048	234.714.185	355.283.814	Educational expenses
Jumlah	16.650.202.450	21.684.819.738	24.427.215.327	Total

30. Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / 30. Provision For (Recovery) From Impairment Losses

Rincian beban pencadangan (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

Details of provision for (recovery) from impairment losses in earning and non-earning assets are as follows:

	2022	2021	2020	
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	6.559.351.483	18.141.126.429	2.641.622.525	Musyarakah financing (Note 9)
Piutang murabahah (Catatan 8)	304.769.049	(7.599.672.616)	(3.417.926.339)	Murabahah receivables (Note 8)
Pembiayaan mudharabah (Catatan 10)	75.070.760	2.807.968.846	41.441.836	Mudharabah financing (Note 10)
Piutang ijarah	14.501.217	17.876.710	-	Ijarah receivables
Efek-efek (Catatan 7)	-	-	(516.911.751)	Marketable securities
Penyertaan saham	-	-	(310.000)	Investment in shares
Aset lain-lain (Catatan 15)	(4.745.981.826)	8.159.255.675	4.855.838.112	Other assets (Note 15)
Jumlah	2.207.710.683	21.526.555.044	3.603.754.383	Total

31. Beban Lainnya / 31. Other Expenses

	2022	2021	2020	
Kerugian dari reklasifikasi efek-efek	11.476.064.908	-	-	Loss on reclassification of securities
Penjualan piutang murabahah (Catatan 8)	5.475.620.397	-	-	Sale of murabahah receivable (Note 8)
Lain-lain	5.071.064.351	453.024.114	2.430.222.758	Others
Jumlah	22.022.749.656	453.024.114	2.430.222.758	Total

32. Pendapatan (Beban) Non Operasional / 32. Non Operating Income (Expenses)

	2022	2021	2020	
Pendapatan non operasional				Non operating income
Pendapatan imbalan pasti (Catatan 34)	1.004.431.069	-	-	Income from employment benefit (Note 3
Pendapatan non operasional lainnya	750.064.915	344.009.741	161.429.411	Other non-operating income
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 12)	473.745.821	194.940.862	83.157.256	Gain on sale of property and equipment (Note 12)
Pendapatan imbalan dari pihak ketiga	25.969.870	11.960.409	8.156.443	Income fee from third parties
Penyesuaian liabilitas imbalan kerja sebagai dampak penerapan undang-undang cipta kerja (Catatan 34)	-	834.417.284	-	Adjustment of employee benefit liabilities as result of implemental of the Job Creation Law (Note 34)
Jumlah	2.254.211.675	1.385.328.296	252.743.110	Total

	2022	2021	2020	
Beban non operasional				Non-operating expenses
Imbalan liabilitas sewa (Catatan 20)	(139.855.827)	(273.056.589)	(377.172.983)	Fee of lease liabilities (Note 20)
Denda dan sanksi	(29.404.546)	(21.443.900)	(49.500.000)	Penalties
Lain-lain	(37.283.487)	(41.518.101)	(30.250.300)	Others
Jumlah	(206.543.860)	(336.018.590)	(456.923.283)	Total
Jumlah - bersih	2.047.667.815	1.049.309.706	(204.180.173)	Net

33. Komitmen dan Kontinjensi / 33. Commitment and Contigencies

	2022	2021	2021	
Liabilitas komitmen:				Commitment payables:
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	(153.901.747.627)	(155.808.985.364)	(53.469.490.295)	Unused financing facilities
Tagihan kontinjensi:				Contingencies receivables:
Marjin dalam penyelesaian	1.079.731.928	5.628.996.579	5.504.470.420	Margin from non-performing receivables

34. Imbalan Kerja Jangka Panjang / 34. Long-term Employee Benefits

Mulai tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 diberlakukan, perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja 2/2022) pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan berlakunya Perppu ini, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen, tertanggal 22 Februari 2023.

Starting from February 2, 2021, the Group calculated the employee benefit liabilities based on the Law No. 11 of 2020 on Job Creation (the “Job Creation Law”) and Government Regulation No. 35 of 2021 regarding fixed-term employment contract, outsourcing, work time and rest time, and employment termination. Before Government Regulation No. 35 of 2021 was enacted, the calculation of employee benefit liabilities was based on Law No. 13 of 2003.

The President of the Republic of Indonesia has issued Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu Cipta Kerja 2/2022) on December 30, 2022 which is the implementation of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. With the enactment of this Perppu, Law no. 11/2020 concerning Job Creation is repealed and declared invalid.

The latest actuarial valuation report dated February 22, 2023 on the long-term employee benefits liability was from PT Ricky Leonard Jasatama, an independent actuary.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 43 Karyawan, 79 karyawan dan 108 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Number of eligible employees is 43 employees, 79 employees and 108 employees as of December 31, 2022, 2021 and 2020 respectively.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The amount of employee benefits recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	2022	2021	2020	
Beban jasa kini	88.629.711	444.893.424	744.032.221	Current service costs
Beban bunga neto	152.011.261	216.598.138	303.928.160	Interest costs
Kelebihan pembayaran imbalan kerja	-	2.073.297.398	-	Overpayment of employee benefits
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi	(1.245.072.041)	-	-	Adjustment due to change in attribution method
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasti yang diakui di laba rugi	(1.004.431.069)	2.734.788.960	1.047.960.381	Component of defined benefit costs (Income) recognized in profit or loss
Penyesuaian liabilitas imbalan kerja sebagai dampak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (Catatan 31)	-	(834.417.284)	-	Adjustment of employee benefit liabilities as result of implementation of the Job Creation Law (Note 31)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	4.069.748.818	(99.795.668)	(1.148.534.858)	Remeasurement of defined benefit liability
Jumlah	3.065.317.749	1.800.576.008	(100.574.477)	Total

Pendapatan imbalan kerja jangka panjang untuk tahun 2022 sebesar Rp 1.004.431.069, disajikan sebagai bagian dari pendapatan (beban) non operasional (Catatan 32), sedangkan imbalan-imbalan kerja jangka panjang tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp 2.734.788.960 dan Rp 1.047.960.381, disajikan sebagai bagian dari Beban Personalia (Catatan 29).

Long-term employee benefits income for the year 2022 amounting to Rp 1,004,431,069 is presented as part of non operating income (expenses) (Note 32), while long-term employee benefits expenses for the years 2021 and 2020 amounting to Rp 2,734,788,960 and Rp 1,047,960,381, respectively is presented as part of personnel expenses (Note 29).

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefits liability follows:

	2022	2021	2020	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang awal tahun	3.720.787.299	5.377.421.352	4.924.171.012	Long-term employee benefits liability at the beginning of the year
Beban jasa kini	88.629.711	444.893.424	744.032.221	Current service costs
Beban bunga neto	152.011.261	216.598.138	303.928.160	Interest costs
Kelebihan pembayaran imbalan kerja	-	2.073.297.398	-	Overpayment of employee benefits
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi	(1.245.072.041)	-	-	Adjustment due to change in attribution method
Penyesuaian liabilitas imbalan kerja sebagai dampak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja	-	(834.417.284)	-	Adjustment of employee benefit liabilities as result of implementation of the Job Creation Law
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	4.069.748.818	99.795.668	1.148.534.858	Remeasurement of defined benefit liability
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang	(4.208.679.230)	(3.656.801.397)	(1.743.244.899)	Benefit payments during the year
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang akhir tahun	2.577.425.818	3.720.787.299	5.377.421.352	Long-term employee benefits liability at the end of the year

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Principal assumptions used in the valuation of the long-term employee benefits follows:

	2022	2021	2020	
Tingkat diskonto	7,20%	7,08%	7,02%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%	6,00%	Increase of salary rate
Tingkat perputaran karyawan	5% sampai dengan usia 40 tahun kemudian menurun secara linear sampai dengan 0% pada saat usia 55 tahun/ *5% per annum at age up 40 years old, then decrease in linear to 0% per annum at age 55 years old*			Level of employee turnover

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Analysis of sensitivity from changes of main assumptions to long-term employee benefits liability as follows:

2022	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ *Effect on employee benefits liability*		
	Perubahan Asumsi/ *Changes of assumption*	Kenaikan Asumsi/ *Increases of assumption*	Penurunan Asumsi/ *Decreases of assumption*
Tingkat diskonto/*Discount rate*	1%	(667.757.578)	285.620.272
Tingkat kenaikan gaji/*Future salary increases*	1%	689.541.703	(263.415.545)

2021	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ *Effect on employee benefits liability*		
	Perubahan Asumsi/ *Changes of assumption*	Kenaikan Asumsi/ *Increases of assumption*	Penurunan Asumsi/ *Decreases of assumption*
Tingkat diskonto/*Discount rate*	1%	(328.128.092)	377.643.625
Tingkat kenaikan gaji/*Future salary increases*	1%	378.057.124	(334.125.747)

2020	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ *Effect on employee benefits liability*		
	Perubahan Asumsi/ *Changes of assumption*	Kenaikan Asumsi/ *Increases of assumption*	Penurunan Asumsi/ *Decreases of assumption*
Tingkat diskonto/*Discount rate*	1%	(479.452.546)	553.162.851
Tingkat kenaikan gaji/*Future salary increases*	1%	553.232.890	(488.055.822)

35. Pajak Penghasilan

a. Beban pajak terdiri dari:

35. Income Tax

a. The tax expense consists of the following:

	2022	2021	2020	
Pajak kini	296.116.217	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	1.479.608.799	8.783.098.401	3.626.535.374	Deferred tax
Jumlah	1.775.725.016	8.783.098.401	3.626.535.374	Total

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

b. Current Tax

A reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income with accumulated fiscal losses follows:

	2021	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.888.802.300	13.303.179.813	3.411.918.641	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:				Temporary differences:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(42.526.932)	16.287.932.900	5.275.626.185	Provision for impairment losses
Imbalan kerja jangka panjang - bersih	(5.213.110.299)	(1.756.429.721)	(695.284.518)	Long-term employee benefits
Aset hak-guna	98.185.528	273.056.589	532.043.190	Right-of-use assets
Amortisasi aset tak berwujud	(131.630.000)	67.720.358	425.920.882	Amortization of intangible assets
Jumlah	(5.289.081.703)	14.872.280.126	5.538.305.739	Total
Perbedaan tetap:				Permanent differences:
Lain-lain	1.182.675.188	(513.830.772)	151.312.240	Others
Jumlah	1.182.675.188	(513.830.772)	151.312.240	Total
Laba kena pajak tahun berjalan	2.782.395.785	27.661.629.167	9.101.536.620	Taxable income for current year
Rugi fiskal tahun-tahun lalu				Prior year's fiscal loss
2017	(1.436.412.831)	(1.436.412.831)	(1.436.412.831)	2017
2016	-	(54.795.454.677)	(59.193.921.220)	2016
2015	-	-	(4.703.070.077)	2015
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	(1.436.412.831)	(56.231.867.508)	(65.333.404.128)	Fiscal losses that can be utilized
Penghasilan kena pajak (Akumulasi laba (rugi) fiskal)	1.345.982.954	(28.570.238.341)	(56.231.867.508)	Taxable income (Accumulated fiscal income (losses))
Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:				Current tax expense and payable are computed as follows:
Jumlah beban pajak kini	296.116.250	-	-	Total current tax expense
Dikurang pembayaran Pajak dimuka Pajak penghasilan pasal 25	289.073.837	-	-	Less payment of prepaid tax Income tax article 25
Pajak penghasilan badan kurang bayar (Catatan 21)	7.042.413	-	-	Under payment of corporate Income tax (Note 21)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 dan pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 and on May 16, 2020 was stipulated as Law No. 2 Year 2020 related to State Financial Policies and Financial System Stability to cope with Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years, and
- Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Bank telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank telah dihitung menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat direalisasi.

Bank mengalami rugi fiskal untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, sehingga Bank tidak memiliki utang pajak penghasilan pada periode-periode tersebut. Sesuai peraturan perpajakan, kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasikan dengan laba kena pajak pada masa 5 (lima) tahun mendatang sejak terjadinya kerugian fiskal.

Laba kena pajak dan akumulasi rugi fiskal tahun 2021 dan 2020 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

The Bank has adopted the amendments of those prevailing tax rates in the current tax computation.

The Bank's deferred tax assets and liabilities has been calculated using the expected tax rates when realized.

The Bank suffered fiscal losses as of December 31, 2021 and 2020 so the Bank did not have income tax liabilities for both periods. In accordance with tax regulations, the fiscal loss can be compensated with taxable profits for the next 5 (five) years since the occurrence of the fiscal loss.

Taxable income and accumulated fiscal loss the years 2021 and 2020 conforms with its Annual Corporate Income Tax Return filed loss.

c. Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax

	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	Dikreditkan (dibebankan)/ *Credited in (charged to)* Laba Rugi/ *Profit or Loss*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other comprehensive income*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	818.573.204	(1.146.884.266)	895.344.740	567.033.678	Employment benefit liabilities
Keuntungan belum direalisasi atas penurunan nilai investasi	(1.359.684.971)	-	1.359.684.971	-	Unrealized gain on impairment of investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.854.748.106	(2.534.090.205)	-	4.320.657.901	Allowances for impairment losses
Biaya amortisasi aset tak berwujud	667.547.670	(28.958.600)	-	638.589.070	Amortization of intangible assets
Aset hak-guna	177.121.952	21.600.817	-	198.722.769	Right-of-use assets
Rugi atas reklasifikasi efek-efek	-	2.524.734.282	-	2.524.734.282	Loss on reclassification securities
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	316.010.827	(316.010.827)	-	-	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak tangguhan - Bersih	7.474.316.788	(1.479.608.799)	2.255.029.711	8.249.737.700	Deferred tax assets - net

	1 Januari 2021/ *January 1, 2021*	Dikreditkan (dibebankan)/ *Credited in (charged to)* Laba Rugi/ *Profit or Loss*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other comprehensive income*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	1.183.032.696	(386.414.539)	21.955.047	818.573.204	Employment benefit liabilities
Keuntungan belum direalisasi atas penurunan nilai investasi	(6.939.750.101)	-	5.580.065.130	(1.359.684.971)	Unrealized gain on impairment of investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.271.402.869	3.583.345.237	-	6.854.748.106	Allowances for impairment losses
Biaya amortisasi aset tak berwujud	652.649.191	14.898.479	-	667.547.670	Amortization of intangible assets
Aset hak-guna	117.049.502	60.072.450	-	177.121.952	Right-of-use assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	12.371.010.856	(12.055.000.029)	-	316.010.827	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak tangguhan - Bersih	10.655.395.013	(8.783.098.402)	5.602.020.177	7.474.316.788	Deferred tax assets - net

	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	Dikreditkan (dibebankan)/ *Credited in (charged to)* Laba Rugi/ *Profit or Loss*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other comprehensive income*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	1.231.042.752	(300.687.725)	252.677.669	1.183.032.696	Employment benefit liabilities
Keuntungan belum direalisasi atas penurunan nilai investasi	(990.024.707)	-	(5.949.725.394)	(6.939.750.101)	Unrealized gain on impairment of investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai	2.769.442.448	501.960.421	-	3.271.402.869	Allowances for impairment losses
Biaya amortisasi aset tak berwujud	635.166.587	17.482.604	-	652.649.191	Amortization of intangible assets
Aset hak-guna	-	117.049.502	-	117.049.502	Right-of-use assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	16.333.351.032	(3.962.340.176)	-	12.371.010.856	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak tangguhan - Bersih	19.978.978.112	(3.626.535.374)	(5.697.047.725)	10.655.395.013	Deferred tax assets - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense the result of multiplying the accounting profit before tax with the applicable tax rate in the income statement and other comprehensive income follows:

	2022	2021	2020	
Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.888.802.300	13.303.179.813	3.411.918.641	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan	1.515.536.508	2.926.699.559	750.622.101	Tax expense at prevailing tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:				Tax effects of permanent differences:
Lain-lain	260.188.508	(113.042.770)	33.288.693	Others
Jumlah - bersih	260.188.508	(113.042.770)	33.288.693	Net
Jumlah Beban pajak penghasilan	1.775.725.016	2.813.656.789	783.910.794	Total tax expense
Penyesuaian pajak tangguhan dari rugi fiskal yang tidak dapat dikompensasikan	-	5.969.441.612	-	Deferred tax adjustments of fiscal losses which cannot be compensated
Dampak perubahan tarif pajak	-	-	2.842.624.580	Impact of change in tax rate
Beban pajak - bersih	1.775.725.016	8.783.098.401	3.626.535.374	Tax expense - net

36. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

c. PT Bank Victoria International Tbk merupakan pemegang saham utama Bank.

d. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Bank.

e. Perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga dekat pemegang saham dan manajemen kunci Bank.

Transaksi Hubungan Berelasi

a. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

36. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

b. PT Bank Victoria International Tbk is the majority stockholder of the Bank.

c. Companies owned by stockholders of the Bank, either directly or indirectly.

d. Companies controlled by close family members of stockholders and key management personnel of the Bank.

Transactions with Related Parties

c. Balances and transactions with related parties are as follows:

	2022	2021	2020	
Aset				**Assets**
Giro pada bank lain (Catatan 5)	167.897.715	1.617.865.575	837.063.230	Current accounts with other Banks (Note 5)
Piutang murabahah (Catatan 8)	29.928.946.309	377.417.478	538.282.509	Murabahah receivables (Note 8)
Piutang musyarakah (Catatan 9)	1.000.000.000	-	-	Musyarakah receivables (Note 9)
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima (Catatan 11)	122.666.222	104.537	4.476.511	Revenue sharing receivables (Note 11)
Jumlah	31.219.510.246	1.995.387.590	1.379.822.250	Total
Persentase terhadap jumlah aset	1,43%	0,12%	0,06%	Percentage to total assets
Liabilitas				**Liabilities**
Simpanan giro wadiah (Catatan 17)	21.923.260	31.131.867	31.569.251	Wadiah demand deposits (Note 17)
Bagi hasil yang belum dibagikan (Catatan 19)	6.103.212	6.090.512	11.040.043	Undistributed revenue sharing (Note 19)
Liabilitas sewa (Catatan 20)	1.585.320.324	3.772.307.075	7.876.724.358	Lease liabilities (Note 20)
Jumlah	1.613.346.796	3.809.529.454	7.919.333.652	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,63%	5,49%	1,47%	Percentage to total liabilities
Dana Syirkah Temporer (Catatan 22)				**Temporary Syirkah Funds (Note 22)**
Giro Mudharabah	-	8.957.388	8.957.388	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah	327.528.852	208.951.711	267.936.764	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	3.010.000.000	3.075.000.000	2.655.000.000	Mudharabah deposit
Jumlah	3.337.528.852	3.292.909.099	2.931.894.152	Total
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	0,42%	0,27%	0,21%	Percentage to temporary syirkah funds
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib (Catatan 25)				**Income from funds management by Bank as mudharib (Note 25)**
Pendapatan dari penjualan murabahah	383.622.673	47.350.430	60.640.801	Income from sales of murabahah
Pendapatan dari penjualan musyarakah	10.000.000	-	-	Income from sales of musyarakah
Pendapatan ijarah - bersih	22.825.217	22.806.554	34.713.444	Income from ijarah - net
Jumlah	416.447.890	70.156.984	95.354.245	Total
Persentase terhadap jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	0,54%	0,06%	0,06%	Percentage to total income from funds management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (Catatan 26)				**Third parties' shares on returns of temprorary syirkah funds (Note 26)**
Deposito mudharabah	78.140.932	6.853.449	10.756.220	Mudharabah deposit
SIMA	-	121.818.056	-	SIMA
Tabungan mudharabah	560.423	154.905	249.217	Mudharabah saving deposits
Giro mudharabah	9.806	10.292	34.606	Mudharabah current account
Jumlah	78.711.161	128.836.702	11.040.043	Total
Persentase terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	0,20%	0,19%	0,01%	Percentage to third parties' shares on returns of the temporary syirkah funds

	2022	2021	2020	
Beban Operasional lainnya				**Other Operating expense**
Beban umum dan administrasi (Catatan 28)				General and administrative expenses (Note 28)
Beban sewa	146.163.776	51.712.998	874.506.000	Rent expenses
Persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi	1,13%	0,30%	4,75%	Percentage of total general and administrative expenses
Beban personalia				Personnel expenses
Gaji, tunjangan, dan THR – Direktur dan pejabat eksekutif	6.269.174.798	4.894.691.867	6.080.431.160	Salary, allowances, and THR - Directors and executive personnel
Honor Dewan Komisaris	820.000.000	712.200.000	968.400.000	Remuneration of Board of Commissioners
Gaji, tunjangan, dan THR – Komite, dan Dewan Pengawas Syariah	412.144.687	279.865.948	354.820.000	Salary, allowances, and THR Comittee, and Sharia Supervisory Boar
Jumlah	7.501.319.485	5.886.757.815	7.403.651.160	Total
Persentase terhadap jumlah beban personalia	44,88%	27,15%	30,31%	Percentage of total personnel expenses

b. Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan pihak berelasi sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Juli 2022, Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan dengan PT Tri Daya Investindo yang terletak di Bandung dan Bekasi. Perjanjian sewa ini berlaku sampai bulan Desember 2022 dan pada tanggal jatuh tempo tidak diperpanjang lagi.

- Pada tanggal 8 April 2019, Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan dengan PT Asri Kencana Gemilang yang terletak di Graha BIP, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan. Perjanjian sewa ini berlaku selama 4 tahun.

- Pada tanggal 29 Mei 2019, Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang dengan PT Bank Victoria International Tbk yang terletak di Grand Boutique Center, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara. Perjanjian sewa ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai Desember 2022 dan pada tanggal jatuh tempo tidak diperpanjang lagi.

- Pada tanggal 10 Februari 2020, Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan dengan PT Tri Daya Investindo yang terletak di Gedung Victoria, Jalan Tomang Raya Kav. 35-37, Jakarta Barat. Perjanjian sewa ini berlaku selama 5 tahun.

d. The Bank entered into a lease agreement with related parties as follows:

- On July 1, 2022, the Bank entered into a lease agreement of building with PT Tri Daya Investindo located in Bandung and Bekasi. The lease agreement is valid for 6 months and has been extended until December 2022 and has been terminated at maturing date.

- On April 8, 2019, the Bank entered into a lease agreement for office space with PT Asri Kencana Gemilang located at Graha BIP, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, South Jakarta. The lease agreement is valid for 4 years.

- On May 29, 2019, the Bank entered into a lease agreement of warehouse with PT Tri Daya Investindo located in Grand Boutique Center, Jalan Mangga Dua Raya, North Jakarta. The lease agreement has been extended several times, the latest until December 2022 and has been terminated at maturity date.

- On February 10, 2020, the Bank entered into a lease agreement of office space with PT Tri Daya Investindo located at Gedung Victoria, Jalan Tomang Raya Kav. 35-37, West Jakarta. The lease agreement is valid for 5 years.

37. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko finansial maupun risiko non-finansial. Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank harus mampu menerapkan manajemen risiko yang baik agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan akan sangat mendukung Bank untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati. Prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut pada dasarnya telah menjadi standar bagi dunia perbankan yang penerapannya diarahkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko triwulanan secara *self assessment*.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dapat terjadi pada berbagai kegiatan operasional perbankan seperti pemberian fasilitas pembiayaan, pembelian efek-efek, transaksi antar bank, dan fasilitas lainnya.

Bank harus mengidentifikasikan dan menganalisis risiko yang terkandung dalam setiap produk dan kegiatan perbankannya. Identifikasi ini dihasilkan dari penilaian yang menggunakan prinsip kehati-hatian dari karakteristik risiko pembiayaan dan risiko potensial yang timbul dari produk/kegiatan tertentu.

37. Financial Risk Management Objectives and Policies

In conducting its function as financial institution intermediaries, the Bank faces various financial and non-financial risk. Rapid business development in banking external and internal environment also causes the Bank business risk getting more complex, so the Bank must implement good risk management to adapt in banking business environment. Hence, risk management principles implemented will support the Bank to be more prudent in its operation. Basically, risk management principles are standard in banking industry which implementation in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated December 28, 2016 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Unit Business.

As regulated by Bank Indonesia related to the implementation of risk management, Bank prepares quarterly risk profile report based on self assessment.

a. Financing Risk

Financing risk can be occurred in various banking operational activities such as providing financing facilities, purchasing marketable securities, interbank transactions, and other liabilities.

The Bank must indentify and analyse risk embedded in each product and banking activity. This identification is derived from an assessment that uses the precautionary principle of characterizing financing risks and potential risks arising from certain product/activity.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko pembiayaan, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak berelasi.
2. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Komite Pembiayaan Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan Bank.

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum selesai, perbankan menghadapi risiko kredit, dimana bank perlu melakukan mitigasi dengan membentuk pencadangan yang akan mempengaruhi kinerjanya dan membuat profitabilitas lebih rendah, serta terganggunya permodalan.

Peningkatan permintaan pembiayaan yang direstrukturisasi akan meningkatkan risiko kredit, karena pada saat selesainya masa relaksasi di bulan Maret 2022, kemungkinan nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya sehingga prosentasi risiko kredit meningkat.

Bank tetap harus mengambil sikap waspada professional dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian dengan memperkuat dan mengatisipasi *risk profile* dengan baik, azas *good corporate governance*, profitabilitas dan permodalan bank agar selalu terjaga dengan terus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk memperkuat daya tahan terhadap setiap *turbulence* (goncangan) ekonomi.

In implementing risk management through active supervision of Board of Commissioner, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board for financing risk, the Bank also implements several points in each of the supervising aspect as follows:

1. The Board of Commissioner monitors fund provided, including a review of fund provided in large amount or those given to related parties.
2. The Board of Directors is responsible in ensuring all fund providing activities are conducted according to the financing risk strategy and policies approved by the Board of Commissioner.
3. The Sharia Supervisory Board evaluates financing risk management policies related to compliance with sharia principles.
4. The Head Office Financing Committee is responsible for deciding the approval of financing in certain amount according to the Bank's policy.

In the situation of the pandemic of Covid-19 that has not yet been completed, banks face credit risk, where the Bank need to mitigate by establishing reserves that will affect their performance and make profitability lower, as well as disruption of capital.

The increase in demand for restructured financing will increase credit risk, because by the time the relaxation period is over in March 2022, it is possible that customers will not be able to fulfill their obligations so that the percentage of credit risk increases.

Banks still have to take a professional vigilant attitude by upholding the principle of prudence by strengthening and anticipating a risk profile properly, principles of good corporate governance, profitability and bank capital so that they are always maintained by continuing to form allowance for impairment losses to strengthen resilience against any economic turbulence.

Berikut adalah eksposur maksimum instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terkait risiko pembiayaan pada tanggal 31 December 2022, 2021, 2020:

The maximum exposure of financial instruments related to credit risk as shown in the statements of financial position as of December 31, 2022, 2021, 2020 are as follows:

	2022		2021		2020		
	Jumlah Bruto/ *Gross amounts*	Jumlah Neto/ *Net amounts*	Jumlah Bruto/ *Gross amounts*	Jumlah Neto/ *Net amounts*	Jumlah Bruto/ *Gross amounts*	Jumlah Neto/ *Net amounts*	
Laporan Posisi Keuangan							**Statements of Financial Position**
Giro pada bank lain	1.434.746.386	1.434.746.386	5.413.126.661	5.413.126.661	3.049.975.484	3.049.975.484	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	370.000.000.000	370.000.000.000	185.000.000.000	185.000.000.000	215.000.000.000	215.000.000.000	Placements with other banks
Efek-efek	200.079.880.365	200.079.880.365	15.024.400.122	15.024.400.122	32.228.929.662	32.228.929.662	Marketable Securities
Piutang murabahah	147.910.676.554	147.910.676.554	215.419.088.236	211.313.545.883	220.403.750.882	218.472.862.636	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	474.309.161.368	469.042.156.877	585.766.229.252	542.168.413.983	938.148.736.691	913.923.488.841	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	532.552.184	505.924.575	4.099.239.339	1.049.468.724	6.816.777.400	6.574.975.631	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	12.378.124.673	12.378.124.673	13.673.991.543	13.673.991.543	15.107.630.083	15.107.630.083	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	177.072.653	173.697.160	189.056.394	171.179.684	171.179.684	171.179.684	Ijarah receivables
Penyertaan saham	29.468.550	29.173.864	29.468.550	29.173.864	29.468.550	29.173.864	Investments in shares
Aset lain-lain	2.723.607.450	2.723.607.450	2.723.607.450	2.723.607.450	2.723.607.450	2.723.607.450	Other assets
Jumlah	1.209.575.290.183	1.204.277.987.904	1.027.338.207.547	976.566.907.914	1.433.680.055.886	1.407.281.823.335	Total
Komitmen dan kontinjensi							**Commitment and Contingencies**
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	153.901.747.627	153.901.740.125	155.808.985.364	155.808.985.364	53.469.490.295	53.469.490.295	Unused financing facilities issued

Eksposur maksimum risiko pembiayaan tercermin dari persentase setiap kategori pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah pembiayaan. Portofolio pembiayaan yang diberikan terdiversifikasi ke dalam 20 jenis sektor ekonomi, dimana untuk posisi 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kelompok sektor ekonomi yang memperoleh penyaluran pembiayaan terbesar dari Bank adalah sektor ekonomi jasa-jasa dunia usaha.

Bank mengkategorikan nasabah yang menerima pembiayaan berdasarkan segmen pasar, yaitu komersial, konsumsi dan mikro, perusahaan pembiayaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tabel dibawah ini menunjukan komposisi pembiayaan yang diberikan Bank berdasarkan segmen pasar beserta tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 and 2020:

The maximum exposure to financing risk is reflected in the percentage of each category of financing to total financing exposure. Financing portfolio diversified into 20 types of economic sectors, as of December 31, 2022, 2021 and 2020 wherein business services economic sector obtained the largest financing from the Bank.

The Bank categorizes customers based on market segments, namely; commercial, consumer and micro, multifinance and Small and Medium Enterprises (SME). The table below shows the composition of financing provided by the Bank based on market segment and its level of Non-Performing Financing (NPF) as of December 31, 2022, 2021 and 2020:

	2022		2021		2020		
	Baki Debet/ *Outstanding financing*	Pembiayaan bermasalah/ *Non-performing financing*	Baki Debet/ *Outstanding financing*	Pembiayaan bermasalah/ *Non-performing financing*	Baki Debet/ *Outstanding financing*	Pembiayaan bermasalah/ *Non-performing financing*	
	%	%	%	%	%	%	
Komersial	78,01	-	71,55	1,05	68,58	0,75	Commercial
Perusahaan pembiayaan	11,97	7,56	5,55	38,71	3,02	0,99	Multifinance
Konsumsi dan Mikro	2,32	9,87	3,88	0,42	7,10	2,11	Consumption and Micro
UKM	7,70	82,57	19,02	34,82	21,30	19,17	SME
Jumlah	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	23,02	Total

Kualitas aset keuangan

Tabel dibawah ini menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (di luar cadangan kerugian penurunan nilai):

Financial assets quality

The tables below shows financial assets quality per class of assets for all financial assets exposed by financing risk (gross of allowances for impairment losses):

2022	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Giro pada bank lain	1.434.746.386	-	-	1.434.746.386	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	385.000.000.000	-	-	385.000.000.000	Placement with other banks
Efek-efek	200.079.880.365	-	-	200.079.880.365	Marketable Securities
Piutang murabahah	143.010.497.835	1.237.057.456	3.663.126.263	147.910.681.554	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	466.499.288.982	197.647.306	7.612.225.080	474.309.161.368	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	532.552.184	-	-	532.552.184	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	12.378.124.673	-	-	12.378.124.673	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	177.072.653			177.072.653	Ijarah receivables
Penyertaan saham	29.468.550	-	-	29.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.723.607.450	-	-	2.723.607.450	Other assets
Jumlah	1.211.865.239.078	1.434.704.762	11.275.351.343	1.224.575.295.183	Total

2021	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Giro pada bank lain	5.413.126.661	-	-	5.413.126.661	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	185.000.000.000	-	-	185.000.000.000	Placement with other banks
Efek-efek	538.031.907.777	-	-	538.031.907.777	Marketable Securities
Piutang murabahah	196.203.281.858	-	19.215.806.378	215.419.088.236	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	493.531.454.940	37.657.218.250	54.577.556.062	585.766.229.252	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	93.895.505	901.825.059	3.103.518.775	4.099.239.339	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	13.673.991.543	-	-	13.673.991.543	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	-	171.179.684	14.507.432	185.687.116	Ijarah receivables
Penyertaan saham	29.468.550	-	-	29.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.723.607.450	-	-	2.723.607.450	Other assets
Jumlah	1.434.700.734.284	38.730.222.993	76.911.388.647	1.550.342.345.924	Total

2020	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Giro pada bank lain	3.049.975.484	-	-	3.049.975.484	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	215.000.000.000	-	-	215.000.000.000	Placement with other banks
Efek-efek	712.683.346.578	-	-	712.683.346.578	Marketable Securities
Piutang murabahah	202.521.424.146	-	17.882.326.736	220.403.750.882	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	866.171.001.438	34.665.694.858	37.312.040.395	938.148.736.691	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	6.769.404.899	47.372.501	-	6.816.777.400	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	15.107.630.083	-	-	15.107.630.083	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	-	171.179.684	-	171.179.684	Ijarah receivables
Penyertaan saham	29.468.550	-	-	29.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.723.607.450	-	-	2.723.607.450	Other assets
Jumlah	2.024.055.858.628	34.884.247.043	55.194.367.131	2.114.134.472.802	Total

b. Risiko Pasar

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bank terekspos pada risiko pasar yang terdiri atas risiko imbal hasil. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan. Bank senantiasa melakukan pengelolaan terhadap risiko pasar tersebut secara rutin dan/atau berkala.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola risiko pasar adalah:

1. Melaksanakan fungsi *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Melakukan pemantauan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar.
3. Melakukan penyesuaian *pricing* pembiayaan agar senantiasa dapat kompetitif dengan *pricing* pasar dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi shaibul maal (deposan).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melaksanakan fungsi ALCO untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM) dan lain-lain.
3. Menjaga posisi likuiditas Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia.

b. Market Risk

In conducting its activities, the Bank is exposed to market risk consisting of yield risk and foreign exchange risk. Market risk, among others is presssent in the functional activities of the Bank, such as treasury activities and investments in securities and financial markets and financing activities. The Bank always manages market risk on a regular basis and/or periodically.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Performing Assets and Liabilities Committee (ALCO) function to discuss market condition and implement risk management strategy.
2. Monitoring yield rate in market.
3. Performing price adjustment for financing to compete with the market price and give optimum result to the customer.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk occurred when the the Bank is not able to settle obligations due from funding cash flows and/or used high quality liquid asset without disrupting the Bank's activity and financial condition.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Perform ALCO function to discuss liquidity management and implement its risk management strategy.
2. Complying Bank Indonesia related requirement regarding liquidity such as Minimum Statutory Requirement and others.
3. Maintaining the Bank's liquidity according to Bank Indonesia regulation.

4. Memiliki cadangan sekunder dan cadangan tersier untuk kebutuhan likuiditas.
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam pengelolaan portofolio secara menyeluruh baik secara sisi aset dan liabilitas.
6. Memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah secara tepat waktu untuk menjaga kepercayaan nasabah sementara tetap menjaga profitabilitas Bank.

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap risiko likuiditas adalah dimana saat ini dana pihak ketiga perbankan melimpah, sehingga belum terasa dampaknya terhadap likuiditas, apalagi permintaan pembiayaan menurun. Hal itu membuat likuiditas Bank sangat longgar. Namun dikhawatirkan terjadi segmentasi dana masyarakat yang hanya berada di bank-bank besar. Bank yang berskala besar akan lebih banyak memperoleh likuiditas. Sebaliknya, bank berskala kecil akan kesulitan mendapatkan likuiditas. Namun dengan adanya kebijakan moneter saat ini, likuiditas Bank cukup memadai.

Berikut adalah analisis jadwal jatuh tempo liabilitas dan sana syirkah temporer berdasarkan pembayaran kontraktual pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

4. Having secondary and tertiary reserve for liquidity needs.
5. Increasing efficiency in using fund in portfolio management, both from assets and liabilities.
6. Meet all obligations to customer's in a timely manner to maintain customer's trust while maintaining the Bank's profitability.

The effect pandemic of Covid-19 on liquidity risk is that currently there is an abundance of deposits in banks, so the impact on liquidity has not yet been felt, let alone decreased financing demand. This makes Bank liquidity very loose. However, it is feared that there will be segmentation of public funds that are only in large banks. Large-scale banks will obtain more liquidity. On the other hand, small-scale Banks will have difficulty obtaining liquidity. However, with the current monetary policy, the Bank liquidity is sufficient.

Table below shows the maturities of financial liabilities based on contractual payments as of December 31, 2022, 2021 and 2020:

	2022					
	Sampai dengan 1 bulan/ *1 month or less*	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ *More than 1 month until 3 months*	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ *More than 3 months until 6 months*	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ *More than 6 months until 12 months*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segera	1.076.279.302	-	-	-	1.076.279.302	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	22.110.988.760	-	-	-	22.110.988.760	Wadiah demand deposits
Simpanan dari bank lain	225.000.000.000	-	-	-	225.000.000.000	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	899.723.225	-	-	-	899.723.225	Undistributed revenue sharing
Liabilitas lain-lain	993.321.758	-	-	-	993.321.758	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	250.080.313.045	-	-	-	250.080.313.045	Total Liabilities
Dana Syirkah Temporer						Temporary Syirkah Funds
Tabungan mudharabah	22.129.584.744	-	-	-	22.129.584.744	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	249.893.814.909	205.154.925.957	22.631.000.000	294.500.000.000	772.179.740.866	Mudharabah deposits
Jumlah Dana Syirkah Temporer	272.023.399.653	205.154.925.957	22.631.000.000	294.500.000.000	794.309.325.610	Total Temporary syirkah funds

	2021					
	Sampai dengan 1 bulan/ *1 month or less*	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ *More than 1 month until 3 months*	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ *More than 3 months until 6 months*	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ *More than 6 months until 12 months*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segera	2.761.007.163	-	-	-	2.761.007.163	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	12.930.336.047	-	-	-	12.930.336.047	Wadiah demand deposits
Simpanan dari bank lain	42.000.000.000	-	-	-	42.000.000.000	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	1.293.574.768	-	-	-	1.293.574.768	Undistributed revenue sharing
Liabilitas lain-lain	1.148.035.414	-	-	-	1.148.035.414	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	60.132.953.392	-	-	-	60.132.953.392	Total Liabilities
Dana Syirkah Temporer						Temporary Syirkah Funds
Giro mudharabah	8.957.388	-	-	-	8.957.388	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah	20.250.769.199	-	-	-	20.250.769.199	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	631.716.153.685	315.938.751.709	22.923.880.206	239.653.800.001	1.210.232.585.601	Mudharabah deposits
Jumlah Dana Syirkah Temporer	651.975.880.272	315.938.751.709	22.923.880.206	239.653.800.001	1.230.492.312.188	Total Temporary syirkah funds

	2020					
	Sampai dengan 1 bulan/ *1 month or less*	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ *More than 1 month until 3 months*	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ *More than 3 months until 6 months*	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ *More than 6 months until 12 months*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segera	2.700.640.223	-	-	-	2.700.640.223	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	251.344.863.716	-	-	-	251.344.863.716	Wadiah demand deposits
Simpanan dari bank lain	260.000.000.000	-	-	-	260.000.000.000	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.805.984.900	-	-	-	4.805.984.900	Undistributed revenue sharing
Liabilitas lain-lain	2.222.277.313	-	-	-	2.222.277.313	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	521.073.766.152	-	-	-	521.073.766.152	Total Liabilities
Dana Syirkah Temporer						Temporary Syirkah Funds
Giro mudharabah	14.175.195	-	-	-	14.175.195	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah	41.214.400.450	-	-	-	41.214.400.450	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	296.595.351.161	695.710.434.444	152.343.000.000	193.305.000.000	1.337.953.785.605	Mudharabah deposits
Jumlah Dana Syirkah Temporer	337.823.926.806	695.710.434.444	152.343.000.000	193.305.000.000	1.379.182.361.250	Total Temporary syirkah funds

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Manusia atau sumber daya insani pada Bank merupakan aspek vital dalam operasional Bank yang sangat mempengaruhi kinerja Bank. Risiko operasional yang berkaitan dengan sumber daya insani tentulah berkaitan dengan karyawan Bank sebagai pelaku utama dalam operasional Bank.

d. Operational Risk

Operational risk is a risk on loss, directly or indirectly, due to insufficient or failure in internal process, human errors, system failures, and/or external events which affected the Bank's operations.

Human or human resources in the Bank is a vital aspect in Bank's operations which greatly affects the Bank's performance. Operational risks related to human resources are of course related to Bank employees as the main actors in the Bank's operations.

Fakta menunjukkan pandemi Covid-19 di Indonesia juga sangat mempengaruhi operasional Bank. Oleh karenanya pengelolaan risiko operasional wajib dilakukan dengan baik untuk meningkatkan kinerja layanan Bank kepada nasabah di era yang kompetitif dan sarat persaingan ini. Untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 maka telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengurangi pelayanan yang berinteraksi langsung dengan nasabah.
2. Memberlakukan penyesuaian jam operasional yang terbatas di seluruh jaringan kantor Bank.
3. Mengatur jam kerja agar tidak terjadi penumpukan atau konsentrasi orang di kantor dengan memberlakukan kebijakan sebagian karyawan bekerja di kantor dan sebagian bekerja dari rumah.
4. Mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai anjuran pemerintah.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko operasional, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.

2. Direksi menciptakan kultur pengungkapkan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.

3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

The facts show that the pandemic of Covid-19 in Indonesia has also greatly affected Bank operations. Therefore, operational risk management must be carried out properly to improve the performance of Bank services to customers in this competitive and competitive era. To break the chain of spread of the Covid-19 virus, the following steps have been taken:

1. Reducing services that interact directly with customers.

2. Adopting limited operating hours adjustments throughout the network Bank's office.
3. Regulate working hours so that there is no accumulation or concentration of people in the office by enforcing a policy that some employees work at the office and some work from home.

4. Follow the health protocol stipulated as recommended by the government.

In implementing risk management through active supervision from Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board, the Bank also implements several points in each of the supervising aspects as follows:

1. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible to develop an organizational culture that provides awareness on operational risk and can contribute in managing operational risk according to the Bank's business strategy.

2. The Board of Directors creates culture which objectively discloses the operational risk to the whole organizational elements, so the operational risk can be promptly identified and mitigated.

3. The Sharia Supervisory Board evaluates operational risk management policies related to compliance with Sharia Principles.

4. Bank menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan Sumber Daya Insani (SDI) yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Bank telah menyusun strategi dan rencana bisnis yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh manajemen Bank. Bank juga melakukan kajian dan evaluasi stratejik bisnis serta realisasi yang telah dicapai oleh Bank sesuai dengan yang terangkum dalam Rencana Bisnis Bank.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, serta prinsip Syariah.

Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik. Secara periodik, audit internal dan staf *compliance* senantiasa bekerja secara terpadu agar aktivitas operasional Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan senantiasa menerapkan *check and balance* sehingga fungsi pengendalian dapat berjalan dengan baik.

4. The Bank consistently gives punishment to the officers and employees who are proven conducting irregularities and violation.

e. Legal Risk

Legal risk is a risk when there is a lawsuit and/or weakness in juridical aspect. This risk is also due to absence of supportive laws and regulations or weakness in agreements such as non-compliance of the validity contract terms or insufficient collateral.

f. Strategic Risk

Strategic risk arises from insufficient determination and implementation of the Bank's strategies, incorrect business decision, or irresponsiveness to external changes.

The Bank has formulated the business strategies and plans based on discussions from the Board of Commissioners, Directors and all of the Bank's management. The Bank also reviews, evaluates, business strategy and its realisation achieved by the Bank based on Bank's Business Plan.

g. Compliance Risk

Compliance risk is a risk when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. In practice, compliance risk is attached to Bank's risk related to laws and other regulations and policies, and sharia principles.

The Bank always try to comply with the applicable laws and regulations. Periodically, internal audit and compliance staff works integratedly so the Bank's operational activity is conducted based on applicable laws and regulations, and implement check and balance procedures, so the controlling function is properly performed.

Bank telah menyampaikan Laporan Profil Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi Semester II 2022, dengan Surat No. 057/DIR-BVIS/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan predikat risiko komposit yaitu 2 (*Low to moderate*).

Tingkat kesehatan bank sesuai Ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.10/SEOJK.03.2014 adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), permodalan dan rentabilitas. Nilai akhir dari penilaian tingkat kesehatan Bank dinyatakan dalam peringkat komposit.

Berdasarkan penilaian manajemen terkait tingkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2022, Bank memiliki peringkat komposit 2, dengan demikian Bank secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan yang secara umum sangat baik.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Langkah-langkah pengendalian risiko reputasi yaitu antara lain:

1. Segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi.

The Bank has submitted its risk profile report to the Otoritas Jasa Keuangan as of Semester II as set forth in its letter No. 057/DIR-BVIS/I/2023 dated January 25, 2023 with Moderate composite risk predicate as 2 (Low to moderate).

The soundness level of the Bank, in accordance with Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No.10/SEOJK.03.2014 represents the result of evaluation of various aspects that affect the condition and performance of the Bank through quantitative and qualitative evaluation of the factors of risk profile, Good Corporate Governance (GCG), capital and profitability. The final result of the evaluation of the Bank's soundness level is stated as a composite rating.

Based on the management's assessment of soundness of the Bank as of December 31, 2022, the composite rate of the Bank is 2 which shows that the Bank is sound and able to overcome significant negative effects of changes in business condition and other external factor, such as risk profile, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), profitability and good capital.

h. Reputation Risk

Reputational risk is a risk when there is decrease in stakeholder trust due to negative perspective to the Bank.

Steps in managing reputational risk are as follows:

1. Immediately following up and handling customer complaints and lawsuit which can increase exposure in reputational risk.

2. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas yaitu:
   - Melakukan tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*), merupakan serangkaian aktivititas yang dilakukan Bank untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi/sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
   - Komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
3. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respon Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi Bank.

i. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing.*

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Bank antara lain:

1. Melakukan identifikasi terhadap risiko investasi secara berkala. Proses identifikasi mencakup sumber risiko yang dapat mempengaruhi pendapatan, nilai ekonomis dari posisi keuangan, dan modal Bank.
2. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala, dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan.

2. Taking preventive action to prevent event which may arise general reputational risk through series of action:
   - Corporate social responsibilities, a series of activities done by the Bank for people *empowerment* in the form of economic/social activities which expected to build positive reputation from the Bank's stakeholders.
   - Routine communication/ education to stakeholders in order to build positive reputation *from* the Bank' stakeholder.
3. Restoring the Bank's reputation after an event has occurred which gives rise to reputational risk, which is any response of the Bank to restore and prevent worsening in the Bank's reputation.

i. Investment Risk

Investment risk is a risk arising due to the Bank's share in the risk on customer's business which is financed by profit sharing financing, whether using net revenue sharing method or profit and loss method.

Risk management implementation performed by the Bank includes:

1. Performing regular investment risk identification. Identification process includes source of risk affected revenue, economic value of financial position, and the Bank's capital.
2. Performing regular monitoring towards compliance on approval limit and follow up action when it is breached.

j. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

j. Rate of Return Risk

Rate of return risk is a risk arising from changes in rate of return obtained by the Bank from financing activity that can influence the behavior of the customer.

38. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Pernyataan atas Deklarasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank No. 003/DPS-BVIS/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menyatakan bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum, aspek operasional dan produk, Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini-opini Syariah dari DPS.

38. Sharia Supervisory Board Opinion

Based on Sharia Supervisory Board (SSB) Bank Declaration Letter No. 003/DPS-BVIS/II/2023 dated February 28, 2023, it states that based on its general supervision in operational and product aspect, the Bank has complied with fatwa and sharia regulation issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council and Sharia opinion from SSB for the period from January 1, 2022 to December 31, 2022.

39. Kontinjensi dan Perkara Hukum

Bank mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, Pemerintah Tingkat I Provinsi Bandung, Ny. Elly Rosanti (Pemilik Lama) dan Weike Loppies S.H. (Notaris) (seluruhnya sebagai "Tergugat") atas tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 470/Braga, milik Bank yang berlokasi di Bandung yang telah jatuh tempo pada tahun 2008. Berdasarkan putusan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Juni 2021, memutuskan untuk mengabulkan permohonan Bank, sehingga Tergugat diharuskan untuk memproses perpanjangan SHGB. Namun, sampai tanggal laporan keuangan diterbitkan, SHGB tersebut masih belum diperpanjang karena terkendalanya perizinan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain perkara hukum yang disebutkan di atas, Bank menghadapi perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Manajemen Bank bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi tersebut.

39. Contingencies and Lawsuit

The Bank filed a lawsuit in Bandung District Court, against the National Land Agency (BPN) Bandung, Bandung Provincial Government Level I, Mrs. Elly Rosanti (Previous Land's Owner) and Weike Loppies S.H. (Notary) (all as "Defendant") related to the objection on the application for the extension of Certificate of Building Rights (HGB) No. 470/Braga, owned by the Bank which is located in Bandung that matured in 2008. Based on the execution decision of Bandung District Court dated on June 9, 2021, decides to approve the Bank's request, therefore, the Defendant is required to process the extension of SHGB. However, as of the date of financial statement, the SHGB has not extended yet due to permit issue from Provincial Government of West Java.

In addition to the above lawsuit mentioned, the Bank is a party to certain lawsuits or claims arising from their ordinary course of business. The Bank's management and legal counsels believe that the resulting liabilities under these lawsuits or claims, if any, will not have a material effect on the financial statements, thus, no provision has been made for these contingent liabilities.

40. Perjanjian dan Ikatan

Perjanjian Sewa - Bank sebagai Lessee

Pihak dalam perjanjian/ *Counterparties*	Item yang disewa/ *Leased items*	Periode perjanjian/ *Period of agreement*
Pihak ketiga/ *Third parties*		
Rony Hartono Ng In Soen	Sewa bangunan/*Building lease*	September 2022 - Februari 2023/ *September 2022 - February 2023*
Lina	Sewa bangunan/*Building lease*	Juni 2022 - November 2022/ *June 2022 - November 2022*

Perjanjian sewa pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut di atas tidak diperpanjang masa sewanya.

40. Agreements and Commitments

Lease Agreements - Bank as Lessees

The lease agreement on December 31, 2022 stated above was not extended.

41. Informasi Lainnya

Bank telah menghitung beberapa rasio pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (tidak diaudit) sebagai berikut:

41. Other Information

Bank has calculated certain ratios as of December 31, 2022, 2021 and 2020 (unaudited) as follow:

	2022	2021	2020	
Non Performing Finance (NPF)				Non Performing Finance (NPF)
NPF secara bruto	1,81%	9,54%	4,73%	NPF gross
NPF secara neto	1,36%	3,72%	2,96%	NPF net
Piutang dan pembiayaan terhadap jumlah dana pihak ketiga	78,40%	65,26%	74,05%	Receivables and financing to total deposits
Return On Assets (ROA)	0,45%	0,71%	0,16%	Return On Assets (ROA)
Return On Equity (ROE)	1,54%	1,79%	(0,09)%	Return On Equity (ROE)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak terdapat pembiayaan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

As of December 31, 2022, 2021, and 2020 there is no financing granted and related to third parties which has exceeded the Bank's Maximum Financing Limit (MFL).

42. Rekonsiliasi Liabilitas yang Berasal dari Aktivitas Pendanaan

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Bank yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

42. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The table below details changes in Bank liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

	1 Januari/ *January 1*, 2022	Arus kas pendanaan/ *Financing cash flows*	Perubahan Nonkas Pergerakan valuta asing/ *Non-cash Changes Changes in foreign exchange*	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Liabilitas sewa	3.772.307.075	(2.174.070.046)	-	1.598.237.029	Lease liabilities

	1 Januari/ *January 1*, 2021	Arus kas pendanaan/ *Financing cash flows*	Perubahan Nonkas Pergerakan valuta asing/ *Non-cash Changes Changes in foreign exchange*	31 Desember/ *December 31*, 2021	
Liabilitas sewa	8.028.813.492	(4.256.506.417)	-	3.772.307.075	Lease liabilities

	1 Januari/ *January 1*, 2020	Arus kas pendanaan/ *Financing cash flows*	Perubahan Nonkas Pergerakan valuta asing/ *Non-cash Changes Changes in foreign exchange*	31 Desember/ *December 31*, 2020	
Liabilitas sewa	10.910.599.408	(2.881.785.916)	-	8.028.813.492	Lease liabilities

43. Hal Lain

Pada tahun 2022, salah satu cabang Bank telah ditutup. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan Bank, manajemen sedang dalam proses verifikasi dan validasi atas temuan yang berkaitan dengan operasional cabang tersebut dan masih belum dapat memastikan dampak dari temuan tersebut terhadap laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, ataupun tidak dapat menentukan apakah terdapat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan Bank.

43. Other Matter

In 2022, one of the branches of the Bank has been closed. As of the date of the completion of the Bank's financial statements, the management is in the process of verification and validation of findings related to operations of the aforementioned branch and is still uncertain as to the impact of those findings on the Bank's financial statements for the year ended December 31, 2022 nor unable to determine if there are any adjustments that need to be made on the Bank's financial statements.

44. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2022

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2022, relevan bagi Bank namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan maupun sebelumnya:

- Amandemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Amandemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan.
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 73: Sewa

44. New Financial Accounting Standards

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Adopted during 2022

The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2022 and relevant for the Bank, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the current or prior year's financial statements:

- Amendment to PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts – Contract Fulfillment Costs
- Amendment of PSAK No. 71: Financial Instruments
- Annual Improvement of PSAK No. 73 - "Lease"

Terkait siaran pers DSAK IAI mengenai "Atribusi Imbalan pada Periode Jasa" pada April 2022, Bank telah mengubah kebijakan atas atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai dengan ketentuan pada PSAK No 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja No 11/2020 dan PP35/2021. Dampak dari perubahan perhitungan sebesar Rp 1.245.072.041 (Catatan 34) tidak material terhadap Bank, sehingga dampak atas perubahan dibukukan pada laporan keuangan tahun berjalan.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amandemen atas PSAK yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material
- Amandemen PSAK No. 16, Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amandemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- Amandemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amandemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

1 Januari 2024

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

Regarding the DSAK IAI press release "Attributing Compensation in the Service Period" in April 2022, the Company changed the policy related to attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in PSAK No 24 for the general fact pattern of pension programs based PP35/2021. The impact of the change in the calculation amounting to Rp 1,245,072,041 (Note 34) is not considered material to the Company, thus, the impact of the changes is recorded in the financial statements for the current year.

Issued but not yet effective

Amendements to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2023

- Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies that Change the Term "Significant" to "Material" and Provide Explanations of Material Accounting Policies
- Amendments to PSAK No. 16, Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- Amendments to PSAK No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Erros: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK No. 46, Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction
- Amendment to PSAK No. 107, "Ijarah Accounting"

January 1, 2024

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendment to PSAK No. 73, "Leases" regarding Lease Liabilities in Sale-and-lease Back Transaction

45. Kondisi Ekonomi Saat Ini

Selama tahun 2022, pandemi Covid-19 masih mempengaruhi Indonesia. Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, telah mengambil tindakan untuk memitigasi dampak lebih lanjut dari pandemi di Indonesia yang meliputi, antara lain, meningkatkan program vaksinasi nasional, membuka kembali kegiatan bisnis dan mengizinkan kegiatan sosial, serta membuat peraturan yang mengarah pada perbaikan kondisi perekonomian di Indonesia. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat dampak buruk dari pandemi terhadap operasi Perusahaan dan keseluruhan rencana bisnis, termasuk kinerja pendapatan dan kondisi keuangan nasabah, dan lain-lain. Namun demikian, durasi dan besarnya dampak pandemi Covid-19, jika ada, bergantung pada perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat ditentukan secara akurat pada saat ini. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan terus mengevaluasi dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan, dan hasil operasi Bank.

45. Current Economic Condition

During 2022, Covid-19 pandemic continues to affect Indonesia. The Government of Indonesia, however, has initiated actions to mitigate further adverse impact of the pandemic in Indonesia which include, among others, ramping up its national vaccination programme, reopening businesses and allowing social activities, as well as came up with regulations geared toward improvement in the economic condition in Indonesia. Management believes that there would be no adverse impact of this pandemic on the Company's operations and over- all business plans, including revenue performance and financial condition of its debitur, etc. However, the duration and extent of the impact of the Covid-19 pandemic, if any, depends on future developments that cannot be accurately determined at this point in time. Management will closely monitor the development of the Covid-19 pandemic and continue to evaluate its impact on the Bank’s businesses, financial position and operating results.

****